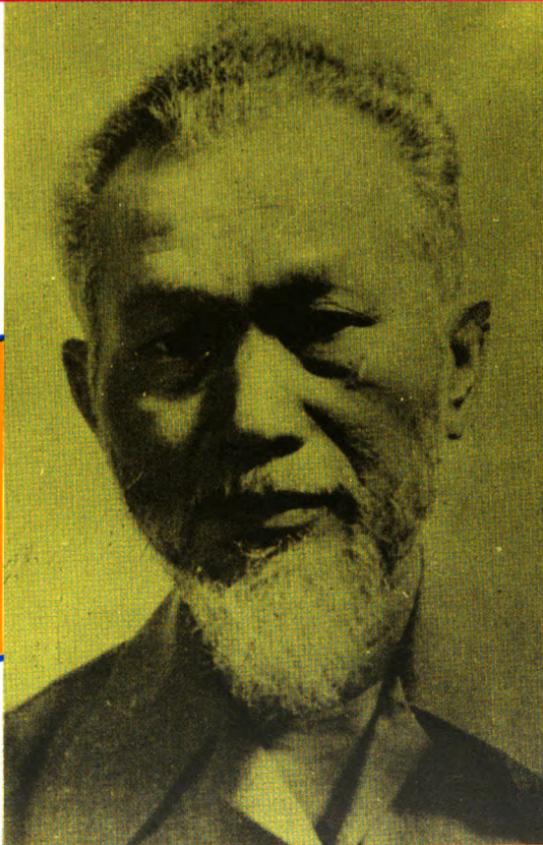


# **DR. FERDINAND LUMBAN TOBING**

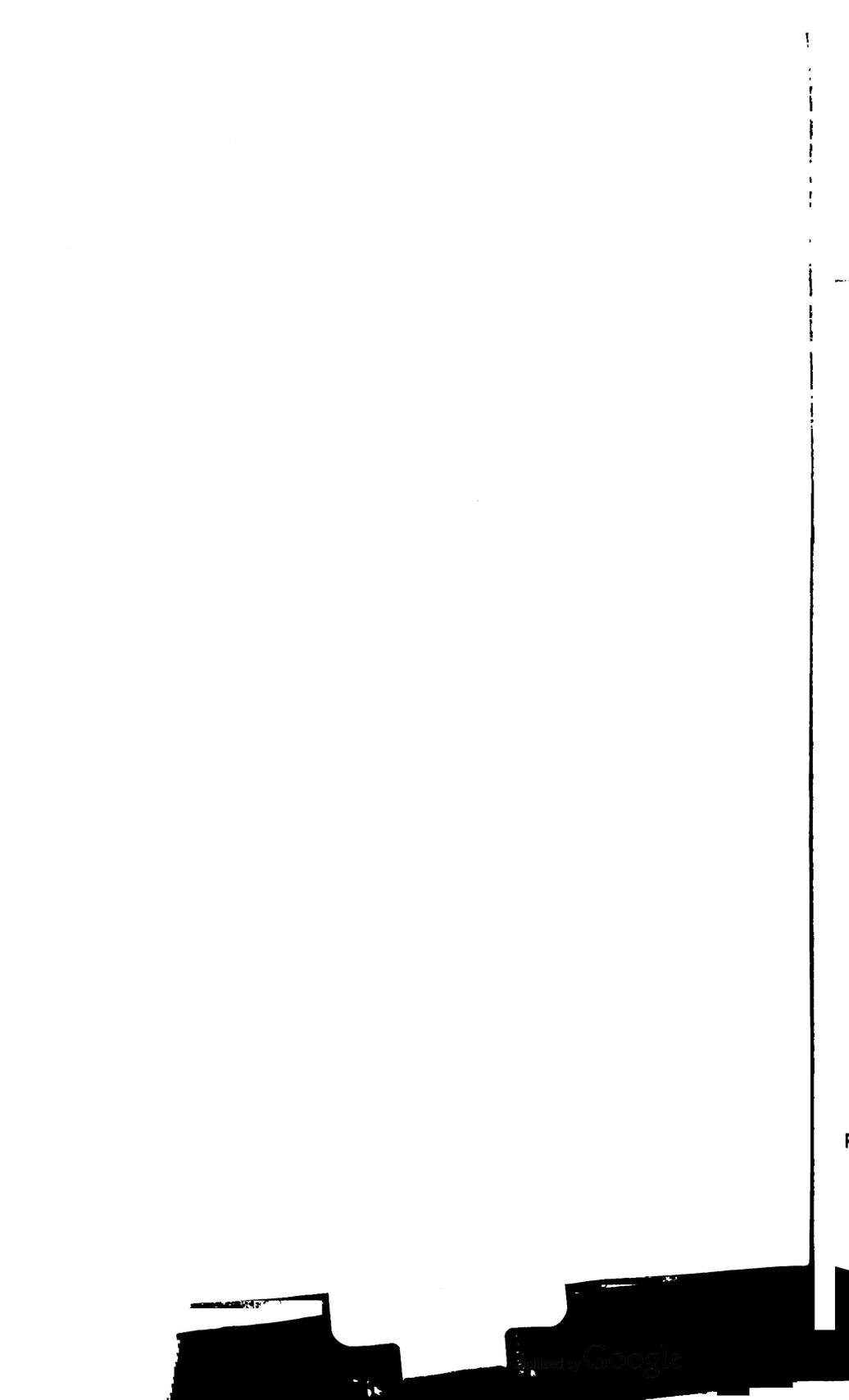
**Oleh : Dra. Nana Nurliana S.**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
1983/1984**



Milik Departemen P da  
Tidak diperdagangkan



# **DR. FERDINAND LUMBAN TOBING**

**Oleh : Dra. Nana Nurliana S.**

*2<sup>nd</sup> ed.*

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
1983/1984**

52032176

**COPYRIGHT PADA :**  
**PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL**  
**DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL**

Cetakan I, tahun 1980

Cetakan II, tahun 1983

**Penyunting :**

**Sutrisno Kutoyo**

**Drs. M. Soenjata Kartadarmadja**

DS 644

.1

T6 N36

1984

MAIN

**Gambar kulit oleh :**  
**Iswar K.S.**

## **SAMBUTAN**

### **DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan.

Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Desember 1980  
Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio  
NIP. 130119123.

## KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain mengerjakan penulisan biografi Pahlawan Nasional, yang sudah memperoleh pengesahan dari Pemerintah. Adapun ketentuan umum bagi Pahlawan Nasional, ialah seseorang yang pada masa hidupnya, karena terdorong oleh rasa cinta tanah air, sangat berjasa dalam memimpin suatu kegiatan yang teratur guna menentang penjajahan di Indonesia, melawan musuh dari luar negeri atau pun sangat berjasa baik dalam lapangan politik, ketatanegaraan, sosial-ekonomi, kebudayaan, maupun dalam lapangan ilmu pengetahuan yang erat hubungannya dengan perjuangan kemerdekaan dan perkembangan Indonesia.

Tujuan utama dari penulisan biografi Pahlawan Nasional ini ialah membina persatuan dan kesatuan bangsa, membangkitkan kebanggaan nasional, mengungkapkan nilai-nilai budaya bangsa, dan melestarikan jiwa dan semangat, kepahlawanan dalam kehidupan bangsa dan negara.

Di samping itu penulisan biografi Pahlawan Nasional juga bertujuan untuk mengungkapkan kisah kehidupan para Pahlawan Nasional yang berguna sebagai suri-tauladan bagi generasi penerus dan masyarakat pada umumnya. Penulisan itu sendiri merupakan kegiatan memelihara kenangan tentang para Pahlawan Nasional yang telah memberikan dharma baktinya kepada nusa dan bangsa. Sekaligus juga bermakna sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kesadaran dan minta akan sejarah bangsa dan tanah air.

Selanjutnya penulisan biografi Pahlawan Nasional merupakan usaha dan kegiatan pembangunan yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan pribadi warga negara, serta bermanfaat bagi pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, Desember 1980  
PROYEK INVENTARISASI DAN  
DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL

## **KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA**

Mengingat besarnya perhatian serta banyaknya permintaan masyarakat atas buku-buku hasil terbitan Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN), maka pada tahun anggaran 1983/1984 Proyek melaksanakan penerbitan/pencetakan ulang atas beberapa buku yang sudah tidak ada persediaan.

Pada cetakan ulang ini telah dilakukan beberapa perubahan redaksional maupun penambahan data dan gambar yang diperlukan.

Semoga tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai.

Jakarta, Mei 1983

**Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi  
Sejarah Nasional**

22A  
22B  
22C  
22D  
22E  
22F  
22G  
22H  
22I  
22J  
22K  
22L  
22M  
22N  
22O  
22P  
22Q  
22R  
22S  
22T  
22U  
22V  
22W  
22X  
22Y  
22Z

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
SAMBUTAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA .....	vii
PENDAHULUAN.....	1
BAB I. LAHIRNYA SEORANG "OMPU" .....	6
BAB II. JAMAN JEPANG – DOKTER F.L. TOBING TERJUN KEDUNIA POLITIK .....	23
BAB III. PROKLAMASI BERKUMANDANG DI TAPANULI .....	39
BAB IV. RESIDEN YANG DOKTER BERGERILYA MENEGAKKAN REPUBLIK INDONESIA .....	59
BAB V. PENGABDIAN DR. F.L. TOBING DI LAPANGAN PEMERINTAHAN .....	83
CATATAN .....	107
DAFTAR SUMBER .....	111



## PENDAHULUAN

Orang arif berkata bahwa kita belajar dari sejarah. Orang yang bijak berpesan agar kita belajar dari pengalaman, karena pengalaman itu adalah guru kehidupan. Maka oleh karena itu sepatutnyalah kita belajar dari pengalaman hidup orang-orang yang dianggap arif dan bijaksana, yaitu para Pahlawan.

Siapakah Pahlawan itu? Sukar memang memberi batasan yang tepat, sebab setiap bangsa mempunyai pahlawannya dan pahlawan itu dilahirkan oleh jamannya. Kita di Indonesia mengenal misalnya Pahlawan Perjuangan Kemerdekaan, Pahlawan Pergerakan Nasional, Pahlawan Pembela Kemerdekaan, Pahlawan Revolusi dan Pahlawan Ampera. Bukanlah suatu hal yang mustahil bila dalam era pembangunan ini akan muncul Pahlawan Pembangunan!

Namun suatu hal yang sudah pasti, bahwa orang menjadi Pahlawan bukan karena keturunannya, bukan karena jabatannya, dan bukan pula karena kedudukannya. Gelar Pahlawan dianugerahkan kepada mereka yang telah berjasa karena perbuatannya, karena dharma bhaktinya. Bangsa Indonesia juga menghargai jasa para Pahlawannya, dan satu di antaranya adalah dr. Ferdinand Lumban Tobing, seorang putra Batak yang menjadi tokoh nasional.

Maka dalam lembar-lembar berikut ini penulis akan mencoba menggambarkan apa dan bagaimana perbuatan dr. F.L.Tobing sehingga pada tahun 1962 Pemerintah mengangkatnya menjadi Pahlawan Kemerdekaan Nasional RI. Memang tidak mudah untuk melukiskan kepribadian manusia seutuhnya, karena sifatnya yang sangat kompleks itu. Seorang Pahlawan pada hakekatnya seorang manusia biasa juga. Ia tidak terlepas dari lingkungan dan jaman di mana dia dilahirkan, hidup dan mengembangkan segala aktifitasnya. Oleh sebab itu agar mendapat gambaran yang lebih lengkap tentang tokoh Pahlawan itu, perlulah kita mencoba menghayati dan memahami masa dan masyarakat tempat hidupnya. Kita harus dapat menempatkannya pada semangat jamannya.

Dalam hal ini tidaklah cukup hanya berdasarkan studi sumber-sumber tertulis saja, sebab biasanya sumber tertulis tidak mampu

merekam suasana dengan setepat-tepatnya. Semangat jaman memang sukar diungkapkan, lebih-lebih oleh mereka yang tidak mengalaminya sendiri. Karena itu untuk melengkapinya penulis berusaha mendapatkan tambahan keterangan dari mereka yang mengenalnya dan hidup sejaman dengannya. Tidak sedikit sumbangan keterangan dan bahan penulisan yang berhasil penulis peroleh. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya yang tidak kecil itu, di sini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasihnya yang sebesar-besarnya. Tanpa bantuan itu tak mungkin penulis menyelesaikan tugas ini. Kemudian penulis pun hendak menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada berbagai pihak yang telah memungkinkan karya ini berhasil diselesaikan.

Riwayat hidup dr. F.L.Tobing ini terdiri dari lima bab yang sifatnya kronologis. Bab I menceritakan tentang asal usul putra Batak yang sejak kecil sudah harus meninggalkan kampung halamannya dan sanak keluarganya. Mungkin inilah yang disebut suratn takdir. Karena harus hidup di rantau dan kemudian karena tugasnya harus berpindah-pindah tempat maka dr. F.L. Tobing dapat memahami kemajemukan masyarakat Indonesia. Dalam bab II lagi-lagi kita melihat bagaimana takdir itu telah membawanya memasuki dunia baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Setelah lulus dari STOVIA ia terus menekuni tugasnya sebagai dokter dan tidak turut aktif di dunia politik seperti yang dilakukan oleh beberapa orang rekannya dalam pergerakan kebangsaan. Namun kedatangan kekuasaan Jepang telah mengubah jalan hidupnya!

Keadaan terus membawanya semakin jauh dari profesinya. Dalam bab III dan bab IV kita melihat bagaimana sang dokter menjelma menjadi seorang gerilyawan yang ulet dan tabah. Memang pada waktu itu Ibu Pertiwi memanggil putra dan putrinya yang berjiwa patriot untuk menyumbangkan jiwa dan raganya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Akhirnya dalam bab V kita saksikan dr. F.L.Tobing menjadi negarawan yang mengemban tugas mengisi kemerdekaan yang tidak ringan itu.

Demikianlah dari riwayat hidup dr. F.L.Tobing kita melihat sifat dan sikapnya yang patut menjadi contoh dan suritauladan. Ketekunan, kejujuran, kesabaran, ketabahan, kebijaksanaan dan semangat kerja yang dilengkapi dengan kesederhanaan telah menjadikan dr. F.L.Tobing seorang tokoh yang patut dihargai. Ia tidak pernah menuntut balas jasa atau menonjolkan diri. Prinsip yang dianutnya adalah bahwa kepercayaan yang diberikan kepadanya adalah penghormatan dan penghargaan yang tidak ternilai tingginya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari perjuangan para Pahlawan yang telah mendahului kita.

Selanjutnya sebagai pelengkap Pendahuluan ini perlu kita utarakan beberapa hal tentang diri dr. F.L.Tobing yang pokok-pokok saja.

Surat kabar berbahasa Inggris "*Indonesia Observer*" pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 1962 memuat berita sebagai berikut :

#### **Dr. F.L. Tobing passes away**

*"Dr. F.L. Tobing former Minister of Information Ministry died here yesterday morning at the age of 63 year. The deceased left five sons and two daughters.*

*The late dr. Tobing was very active during the revolution, first as Resident Administrator then as Governor of Tapanuli, North Sumatra. During the Dutch military agressor, dr. Tobing was appointed military Governor of Tapanuli and led the people in guerilla warfare together with the Army. For this services during this difficult years, the late dr. Tobing was awarded the guerilla medal. In 1953 he was appointed Information Minister and in 1957 Minister for Regional Relation then Minister for Transmigrations".*

(Dr. F.L. Tobing telah pergi. Dr. F.L. Tobing bekas Menteri Penerangan meninggal dunia di sini kemarin pagi dalam usia 63 tahun. Almarhum meninggalkan lima putra dan dua orang putri.

Dr. Tobing almarhum sangat aktif semasa revolusi, mula-mula sebagai Residen kemudian sebagai Gubernur Tapanuli, Sumatera Utara. Dalam masa agresi militer Belanda, dr. Tobing diangkat sebagai Gubernur Militer Tapanuli dan memimpin

rakyat bergerilya bersama-sama TNI. Untuk jasanya di masa yang sukar ini dr. Tobing almarhum dianugerahi Bintang Gerilya. Pada tahun 1953 dia diangkat sebagai Menteri Penerangan dan tahun 1957 Menteri Hubungan - Antar Daerah dan kemudian Menteri Transmigrasi).

Pada waktu itu para pembaca surat kabar segera mengetahui siapa dr. F.L. Tobing yang diberitakan baru meninggal dunia kemarin pagi. Terbayanglah gambaran orang tua yang berwajah tenang dan anggun, berjanggut putih dan berpeci hitam yang tampak agak lusuh. Bajunya jas dan pantalon putih, bertongkat dan tersenyum penuh kebijaksanaan.

Demikianlah gambaran dr. F.L. Tobing yang nampak lebih seperti seorang pendeta dari pada seorang Gubernur Militer. Memang jauh sekali penampilan dr. F.L. Tobing dari gambaran seorang Gubernur Militer yang di masa revolusi memimpin rakyat Tapanuli bergerilya melawan Belanda.

Biasanya gambaran kita akan seorang pemimpin gerilya adalah seorang muda yang gagah dan tegap, berwajah garang dan senjata selalu siap. Seperti yang biasanya kita lihat digambarkan dalam film-film perang. Dan gambaran seorang Gubernur Militer tentunya adalah seorang Jendral yang tegap, berbaju militer dengan bintang di pundak dan pistol di pinggang. Kenyataannya penampilan dr. Tobing jauh dari stereotipe seorang Gubernur Militer ataupun seorang pemimpin gerilya. Memang pada waktu itu bila kita kebetulan sedang berjalan di ladang di pedesaan Sibolga dan berpapasan dengan seorang tua yang berjanggut, bersarung dan berbaju lusuh, mungkin kita tidak akan menduga bahwa orang itu adalah seorang pemimpin gerilya dan Gubernur Militer yang sedang dikejar-kejar oleh serdadu Belanda. Kita akan menyangka, bahwa dia adalah seorang kakek yang sedang menengok ladangnya untuk mencari ubi dan jagung.

Boleh dikatakan kemungkinan besar dr. F.L. Tobing lah satu-satunya Residen R.I. yang memegang jabatannya sejak meletusnya Revolusi Indonesia pada bulan Agustus 1945 sampai pulihnya kedaulatan pada akhir tahun 1949. Walaupun sudah beratus-ratus pasukan Belanda yang pilihan, seperti Pasukan Komando Baret

Hijau beroperasi untuk menangkapnya, dr. F.L. Tobing tetap selamat dan luput dari sergapan.

Semuanya ini berkat kesiap siagaan para gerilyawan Indonesia di Tapanuli yang tidak hanya terdiri dari TNI dan para pemuda yang tergabung dalam lasykar-lasykar, tetapi juga karena jasa segenap rakyat terutama yang berdiam di pedesaan dan di pelosok-pelosok hutan dan gunung yang boleh dikatakan telah bertindak sebagai pelindung. Memang dr. F.L. Tobing adalah seorang pemimpin yang dikenal oleh rakyat dan dicintai. Ia juga adalah seorang penganut agama yang saleh, yang selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu dr. F.L. Tobing mendapat panggilan akrab *Ompu* atau kakek yang dalam kebudayaan Batak merupakan sebutan kehormatan yang paling tinggi.

Ia memang patut mendapat panggilan demikian sebab sejarah hidupnya telah menunjukkan sifat-sifatnya. Ia sangat bijaksana dalam bertindak, sabar dan penuh pengertian terhadap sesamanya. Segala sesuatu selalu dipertimbangkan seobyektif mungkin. Walaupun sifatnya lemah-lembut, penuh kebapaan, kalau perlu ia bisa marah. Ia paling tidak suka kepada mereka yang tidak mempunyai disiplin, kejujuran, dan ketekunan, sebab ia berpendapat bahwa ketiga hal itu merupakan landasan dari keberhasilan. Ia juga sangat menekankan pentingnya keberhasilan dalam segala hal, seperti yang dikemukakan dalam lima hukum hidup yang patut dijalani, yaitu :

#### Patik Hanogloean (Hukum Hidup)<sup>1</sup>

1. *Paias Pekaranganmoena* (bersihkan pekaranganmu)
2. *Paias Djeboemoena* (bersihkan rumahmu)
3. *Paias Badjoebadjoemoena* (bersihkan pakaianmu)
4. *Paias Pamatangmoena* (bersihkan badanmu)
5. *Paias Rohamoena* (bersihkan jiwamu)

Sifat-sifat yang patut diturut untuk kehidupan yang baik ini memang merupakan cermin dari sifat-sifat F.L. Tobing sebagai seorang dokter. Apakah jadinya nasib seorang pasien bila ia dirawat oleh seorang dokter yang tidak mempunyai sifat-sifat

tersebut di atas? Bagaimana pula nasib seorang korban kecelakaan misalnya yang tidak segera mendapat pertolongan karena para petugas di rumah sakit tidak mempunyai disiplin kerja, atau tidak jujur dan tekun serta bersih hidupnya? Sifat-sifat tersebut di atas selalu ditekankan oleh dr. F.L. Tobing untuk menjadi landasan hidup.

Generasi masa kini tentu akan bertanya-tanya, siapakah dr. F.L. Tobing yang mendapat Bintang Gerilya dan diangkat menjadi Pahlawan Kemerdekaan Indonesia? Bahkan negara besar seperti Amerika Serikat juga telah menghormatinya dengan menganugerahkan penghargaan melalui Legiun Veteran Amerika Serikat pada tanggal 12 November 1953 atas jasa-jasanya berperang menghadapi Belanda.

### I. LAHIRNYA SEORANG "OMPU" INDONESIA

Ditilik dari namanva dr. Ferdinand Lumban Tobing pasti orang Batak, atau paling tidak berasal dari Tapanuli – *Tapan nan uli*, artinya Tepian Nan Indah. Sesungguhnya Tanah Batak, tempat tumpah darah dr. F.L. Tobing adalah tempat yang terkenal keindahan dan kesuburannya. Danau Toba dengan pulau Samosirnya, Teluk Sibolga dengan nyiur melambainya, dan Bukit Barisan yang ditutup oleh hutan rimba yang menghijau dan lembah-lembahnya yang subur adalah lingkungan alam di mana dr. F.L. Tobing dilahirkan, tempat ia berjuang dan tempat ia berbaring untuk selama-lamanya.

Dr. F.L. Tobing dilahirkan pada tanggal 19 Februari 1899 di sebuah rumah kayu yang sederhana di tengah-tengah keindahan dan kesuburan alam Tanah Batak. Kehadiran bayi laki-laki yang diberi nama Ferdinand di desa Sebuluan ini sangat menggembirakan keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Memang suatu karunia dan rahmat Tuhan telah dilimpahkan pada keluarga Herman Lumban Tobing Gelar Raja Guru yang bersahaja hidupnya itu. Kehadiran Ferdinand memang sangat diharapkan oleh ayah-bundanya dan oleh ketiga kakak wanitanya. Sebab dalam sistem kekerabatan orang Batak yang berdasarkan konsep patrilineal, pihak laki-lakilah yang akan meneruskan garis keturunan.

Anak perempuan kalau menikah akan mengikuti keluarga suaminya dan bila mempunyai anak maka anak-anaknya akan membawa dan meneruskan garis keturunan ayahnya. Oleh sebab itu bila Herman Tobing tidak mempunyai anak laki-laki, maka suku Lumban Tobing dari pihak Herman L. Tobing akan berakhir.

Untuk memahami keadaan masyarakat tempat asal dr. F.L. Tobing perlulah kita tinjau bagaimana pranata masyarakat Batak dan kehidupan anggota-anggota masyarakat itu. <sup>2)</sup>

Tanah Batak meliputi wilayah yang cukup luas dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara, berbatasan dengan Aceh

Timur, berbatasan dengan Sumatra Timur

Selatan, berbatasan dengan Sumatra Barat

Barat, berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Selain dataran rendah yang subur juga daerahnya terdiri dari bagian Bukit Barisan di mana terdapat beberapa gunung yang penting seperti Sibayak, Sinabung, Martimbang dan Sibual-buali, sedang dataran tingginya antara lain Tanah Karo, Toba, Balige, Porsea dan Humbang. Sehingga bila kita bepergian melalui darat dari Medan di Sumatera Timur ke Sibolga di pantai barat maka kita akan melalui jalan yang meliuk-liuk, berkelok-kelok menyusuri punggung gunung dan perbukitan dengan jurang yang dalam di sisi kiri atau kanan kita. Lingkungan alamnya penuh rimba yang diselingi oleh padang lalang atau ladang penduduk.

Alamnya sangat indah dan selalu hijau sepanjang tahun karena cukup curah hujan dan subur tanahnya. Itulah sebabnya banyak penduduk Tapanuli yang mata pencahariannya bercocok tanam atau mengambil hasil hutan seperti karet, damar dan rotan. Dari hasil hutan, karet memegang peranan yang penting. Dalam bertani orang Tapanuli mengenal cara bertani di sawah dan di ladang. Pengerjaan tanah umumnya tidak seintensif di Jawa, karena tanah yang luas dan jumlah penduduk yang relatif kecil. Itulah sebabnya panen hanya setahun sekali, walaupun ada yang sudah bisa panen dua kali yaitu di tempat yang beririgasi, tetapi ini hanya sedikit sekali.

Di samping bercocok tanam, orang Tapanuli juga mengenal peternakan. Mereka memelihara kerbau, sapi, babi, kambing, ayam dan itik. Kerbau banyak dipakai sebagai hewan penghela dan juga untuk diambil dagingnya. Kerbau dan babi banyak disembelih pada waktu upacara adat dan rupanya orang Batak yang beragama Kristen terutama lebih banyak makan daging kerbau dan babi dari pada daging ternak lainnya. Ternak peliharaan yang lain seperti sapi, kambing, ayam dan itik terutama banyak dijual ke kota-kota. Perikanan juga memegang peranan penting terutama bagi mereka yang berdiam di tepi danau Toba, di pulau Samosir dan di pantai Teluk Sibolga. Hasil tangkapan ikan banyak yang dijual di kota dan banyak juga yang dikeringkan untuk kemudian dijual ke luar daerah.

Wilayah Tapanuli biasanya disebut Tanah Batak karena didiami oleh suku bangsa Batak yang terdiri dari beberapa kelompok dan berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda.

Dalam garis besarnya dapat dibagi dalam enam sub suku yaitu :

1. *Karo* berdiam di daerah sebelah utara yang meliputi dataran tinggi Karo. Langkat Hulu, Deli Hulu, Serdang Hulu dan sebagian dari Dairi.
2. *Simalungun* di timur laut berdiam di daerah Simalungun.
3. *Toba* berdiam di daerah selatan dan barat daya Danau Toba, pulau Samosir, dataran tinggi Toba, daerah Asahan, Silindung, daerah antara Barus dan Sibolga dan daerah pegunungan Bahal dan Habinsaran. Jumlah mereka yang terbesar dibandingkan sub suku-suku yang lain dan mereka biasanya yang dianggap benar-benar orang Batak.
4. *Pakpak* berdiam di daerah Dairi.
5. *Angkola* berdiam di wilayah yang meliputi Angkola, Sipirok, sebagian Sibolga dan Batang Toru dan bagian utara Padang Lawas.
6. *Mandailing* berdiam di daerah Mandailing, Ulu, Pakatan dan bagian Selatan dari Padang Lawas.

Sub suku itu mempunyai unsur-unsur kebudayaan yang berbeda dan masing-masing mempunyai kekhususannya sendiri-sendiri. Namun walaupun demikian menurut cerita-cerita lama orang Batak (*tarombo*), semua sub suku Batak itu berasal dari nenek moyang yang satu, yaitu Si Raja Batak.

Sebenarnya asal usul orang Batak sendiri masih kabur dan banyak legenda mengenai hal itu. Misalnya diceritakan bahwa Si Raja Batak turun dari langit di Gunung Pusuk Bukit di pantai barat Danau Toba. Tetapi dalam kenyataannya, menurut penelitian para ahli, orang Batak bukanlah suatu suku bangsa yang asli, yang belum mendapat pengaruh dari luar. Sama seperti suku-suku bangsa lainnya di Indonesia orang Batak juga banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur dari luar. Lebih-lebih bila diingat sejak jaman purba Selat Malaka merupakan jalan lalu lintas yang ramai. Misalnya dalam hal bahasa dan huruf, serta konsep-konsep dan praktek keagamaan menunjukkan banyak pengaruh dari India. Hanya memang perlu diteliti lebih jauh tentang cara bagaimana dan bilamana pengaruh luar itu masuk ke Tanah Batak.

Orang Batak mempunyai sistem kekerabatan yang lain dari orang Jawa misalnya. Selain terbagi dalam sub suku, mereka masih terbagi-bagi lagi dalam suatu kelompok kerabat yang lebih kecil yang disebut *marga* (klen). Sebenarnya terdapat perbedaan istilah marga pada orang Karo dan orang Toba. Pada orang Karo, marga (*merga*) berarti satu kesatuan tanpa menghiraukan adanya satu nenek moyang, sedangkan pada orang Toba nama marga menunjukkan asal nenek moyang yang sama.<sup>3)</sup> Selain itu pada orang Toba marga juga bisa berarti gabungan klen atau sub-klen.

Seperti telah disinggung di muka, orang Batak memperhitungkan hubungan-hubungan keturunan yang diatur secara patri-lineal, artinya garis keturunan ditarik dari pihak ayah yang sama dan kakek yang sama. Itulah sebabnya anak laki-laki sangat diharapkan hadirnya di kalangan keluarga Batak sebagai penyambung garis keturunan. Karena itu juga perkawinan merupakan suatu hal yang penting, yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi juga menjalin hubungan-

hubungan yang lain, yaitu antara kerabat si laki-laki dengan kerabat si wanita.

Perkawinan di Batak ini bersifat *exogami* artinya harus kawin dengan orang di luar marganya. Marga yang memberikan anak gadis (*hula-hula*) mendapat kedudukan dan status yang lebih tinggi dan terhormat dibandingkan dengan marga yang menerima gadis (*anak boru*). Sehingga pada umumnya seorang mempunyai tiga hubungan kerabat, yaitu keluarganya sendiri (*dongan sabutuhan*), keluarga istrinya (*hula-hula*), dan keluarga suami saudaranya (*anak boru*) dan ketiga hubungan ini yang merupakan suatu prinsip hubungan kekerabatan pada orang Batak dinamakan *dalihan na tolu*.

Agama orang Batak pada umumnya adalah Kristen Protestan dan Islam. Agama Islam banyak dianut oleh orang di Mandailing dan Angkola, sedang di daerah Toba, Simalungun, Karo dan Dairi umumnya penduduk beragama Kristen. Baik agama Islam maupun agama Kristen masuk dan tersebar di Tanah Batak pada sekitar abad ke-19, walaupun di daerah pantai Tapanuli agama Islam sudah masuk lebih awal lagi.

Di samping itu masih banyak terdapat unsur-unsur kepercayaan yang berasal dari agama asli, yang bersifat animistis, politeistis dan pemujaan pada arwah nenek moyang. Menurut kepercayaan asli, manusia, hewan, tumbuhan dan benda-benda tertentu seperti rumah misalnya mempunyai *tondi* atau jiwa. Tondi ini bisa keluar meninggalkan tubuh wadagnya, misalnya pada waktu orang tidur. Bila tondi yang keluar itu tidak kembali, maka orang itu akan mati. Tondi yang luar biasa atau istimewa disebut *sahala*. Seperti guru terhadap muridnya, orang tua terhadap anaknya, hula-hula terhadap anak borunya atau harimau dan halilintar mempunyai *sahala*. Sesungguhnya *sahala* ini adalah manifestasi dari kekuatan gaib. Orang yang mempunyai *sahala* patut menerima kehormatan atau *hasangapon* dan bila ada yang tidak menghormatinya maka orang itu bisa kena tulah atau mendapat bahaya. Orang Batak juga percaya bahwa orang yang mempunyai *sahala* itu mempunyai rahmat yang besar. Mereka yang kaya atau banyak anak cucunya

dianggap juga mempunyai sahala dan patut mendapat *hasangapon*. Demikianlah kepercayaan tradisional ini terus hidup walaupun agama Islam dan agama Kristen berusaha melarang dan menenkannya.

Agama Kristen masuk dan berkembang di Tapanuli sejalan dengan perluasan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda melalui aktifitas zending Belanda dan Jerman. Yang terkenal adalah seorang pendeta dari Jerman yang bernama Dr. L.I. Nommensen yang datang di Sibolga pada tahun 1862. Para anggota zending ini bekerja keras dan tidak mengenal lelah untuk memberi penerangan tentang agama Kristen kepada penduduk. Mereka tidak segan-segan untuk berjalan berpuluh kilometer melalui hutan rimba dan menyeberangi sungai-sungai mendatangi desa-desa yang terpencil. Selain memberi penerangan tentang agama dan beribadat para anggota zending ini memberi pelajaran dengan membuka sekolah-sekolah yang mengajarkan membaca, menulis, berhitung, kesehatan dan lain-lain pengetahuan umum. Mereka juga memberi petunjuk kepada rakyat yang didatangi tentang cara bertani misalnya. Sedang di bidang kesehatan banyak pusat-pusat kesehatan yang didirikan untuk melayani penduduk, seperti rumah sakit di Balige dan Tarutung dan poliklinik-poliklinik di banyak kecamatan di daerah Tapanuli.

Memang kita hidup tidak hanya asal cukup makan dan minum serta pakaian dan perumahan saja, juga kita memerlukan perawatan kesehatan dan pendidikan. Orang Batak pun menyadari akan hal ini dan banyak mengirimkan anak-anaknya bersekolah bahkan sampai ke luar daerah atau luar pulau Sumatra. Demikian juga dengan dr. F.L. Tobing yang berasal dari keluarga pengurus gereja dan pendidik itu.

Seperti telah disebut di muka ayahnya adalah Herman L. Tobing dan ibunya bernama Laura Ború Sitanggung. Bapak Herman L. Tobing mendapat gelar Raja Guru karena ia menjadi guru di sebuah sekolah desa di Sibuluan. Ayah Herman L. Tobing atau *Raja Guru*, yaitu Raja Mangalu (Raja Mangaloe) menjadi zending di Kolang suatu desa antara Sibolga dan Barus. Kakek dr. F.L.

Tobing ini agaknya menghendaki anaknya mengikuti jejaknya mengabdikan pada masyarakat mengirimkan Herman bersekolah ke *Zending School* di Depok. Di sini Herman L.T. bertemu dengan seorang siswa lain yang berasal dari daerah sebelah timur Indonesia, yaitu Jonathan Pasanea. Terjalinlah persahabatan yang akrab antara dua pemuda yang berasal dari daerah yang sangat berjauhan letaknya tetapi mempunyai tujuan hidup yang sama. Setelah selesai studinya ternyata keduanya secara kebetulan bertugas di tempat yang tidak berjauhan. Herman L.Tobing kembali pulang kampung dan Jonathan Pasanea ditempatkan di Sibolga. Dengan demikian jalinan persahabatan keduanya semakin erat. Lebih-lebih ketika Herman L.Tobing juga ditugaskan di Sibolga. Karena bertugas di bidang yang sama dan berdiam di daerah yang tidak berjauhan seringkali kedua sahabat itu kunjung-mengunjungi dan berbincang-bincang dan Jonathan Pasanea yang orang Ambon itu sudah dianggap sebagai salah seorang anggota keluarga di rumah Herman L.Tobing.

Jonathan memahami ada satu masalah besar yang sedang dihadapi oleh sahabatnya itu. Setelah sekian lama menikah istri Herman belum juga mempunyai anak laki-laki walaupun sudah tiga orang putri dilahirkannya. Padahal, seperti telah disinggung di muka, keturunan laki-laki sangat didambakan oleh keluarga Batak untuk meneruskan garis keturunan keluarga. Rupanya pada suatu hari tercetus pernyataan dari Herman L.T. bahwa bila istrinya melahirkan lagi Jonathan boleh mengambil anak itu dan mengangkatnya sebagai anaknya sendiri walau anak laki-laki sekalipun.

Sementara itu Jonathan Pasanea harus meninggalkan Sibolga untuk kembali bertugas di Depok. Sedang Herman L.Tobing juga dipindahkan ke Sipange kemudian ke Sibuluan. Selain menjadi pengurus gereja Herman L.Tobing juga ditugaskan mengajar di sebuah sekolah desa di situ. Itulah sebabnya ia kemudian diberi gelar Raja Guru. Di desa inilah anak laki-lakinya yang pertama lahir sebagai anak keempat dalam keluarganya. Tak kepalang berbahagianya keluarga Herman menyambut kelahiran bayi laki-

laki tersebut. Rupanya ia pun tak ingat akan pernyataannya yang pernah dicetuskan pada sahabatnya yang sekarang berdiam di Depok.

Waktu pun berjalan terus tanpa terasa dan Ferdinand sekarang telah berumur lima tahun. Ia tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat berkat rawatan ayah-ibu dan keluarganya. Tambahan alam pedesaan yang bersih dan murni memang besar pengaruhnya pada pertumbuhannya. Ia juga sekarang sudah mempunyai dua orang adik laki-laki, sehingga keluarga Bapak Herman L.T. bertambah besar. Bapak Herman tidak terlalu cemas lagi sekarang, karena ia telah mempunyai tiga orang calon penerus garis keluarga Lumban Tobing. Ia sangat bersyukur pada karunia Tuhan Yang Maha Besar itu. Semua anak-anaknya cepat besar dan tumbuh dengan sehat. <sup>5</sup>)

Pada suatu hari di tahun 1904 datanglah seorang tamu yang tak disangka, Bapak Jonathan Pasanea berkunjung dari Depok. Alangkah gembiranya hati kedua sahabat karib yang lama tidak berjumpa. Segera Pak Pasanea dipersilakan masuk dan diminta tinggal menginap di situ. Memang pada waktu itu sarana perhubungan masih sukar, sehingga tidak mudah untuk berkomunikasi dari satu pulau ke pulau lainnya. Bahkan hubungan antar daerah pun sulit — belum ada pesawat terbang, kereta api atau pun mobil. Sehingga kunjungan Bapak Pasanea benar-benar membawa kebahagiaan pada Bapak Herman L.T. sekeluarga. Tidak terkecuali Ferdinand kecil yang sudah pandai bercakap-cakap walaupun belum bersekolah. Ia sangat bijak sehingga menyenangkan hati orang yang ada di dekatnya. Demikian juga dengan Bapak Pasanea yang segera saja tertarik hatinya pada si kecil Ferdinand. Ia pun teringat akan janji ayah Ferdinand untuk memberikan anaknya yang ke empat kepada Bapak Pasanea sekalipun anak itu laki-laki. Bapak Jonathan Pasanea pun bertanya kepada Bapak Herman L.T. apakah masih ingat akan janjinya yang pernah dicetuskan kira-kira lima tahun yang lalu. Dan Bapak Herman pun sadar bahwa ia belum memenuhi janjinya itu.

Sebagai seorang Kristen yang saleh Herman Lumban Tobing sadar bahwa apa yang telah diucapkannya harus ditepati dan setiap

janji harus dijunjung tinggi. Disampaikanlah kepada Bapak J. Pasanea bahwa Ferdinand kecil boleh diangkat anak walaupun hati seluruh keluarga berat melepaskannya. Namun Bapak Herman L. Tobing dan keluarga yakin pula bahwa Ferdinand akan berbahagia hidupnya di bawah lindungan bapak pendeta Pasanea yang baik hati itu. Lebih-lebih Bapak J. Pasanea tidak bermaksud memutuskan sama sekali ikatan Ferdinand dengan keluarganya. Ia hanya ingin mengasuh dan mendidik anak yang cerdas itu. Oleh karena itu nama Ferdinand tidak diganti dan tetap dipakai lengkap dengan nama keluarga Lumban Tobing. Setelah beberapa lama Bapak J. Pasanea bertamu di rumah keluarga Lumban Tobing, tibalah saatnya untuk pulang kembali ke Depok. Memang tak terkirakan berat hati Bapak Herman, ibu Laura serta kakak-kakak, adik-adik dan sanak saudara lainnya karena harus berpisah dengan si kecil Ferdinand. Mereka semua berdoa agar perjalanan Ferdinand dan Pak Pasanea selamat dan agar mereka dapat berjumpa kembali. Ferdinand sendiri sangat gembira hatinya karena akan bepergian dan ia belum menyadari akan arti perpisahan. Sejak itulah Ferdinand hidup sebagai anak angkat Jonathan Pasanea, pendeta dari Depok.

Ketika Ferdinand mencapai usia tujuh tahun, tibalah saatnya untuk masuk sekolah. Pak Jonathan berhasil memasukkannya ke sekolah Belanda ELS (*Europese Lagere School*) di Depok. Kemudian dipindahkan ke ELS di Bogor sampai ia selesai tahun 1914.

Harus diingat bahwa pada waktu itu tidak mudah bagi orang Indonesia untuk bersekolah, lebih-lebih di sekolah Belanda. Walaupun Pemerintah Hindia Belanda mulai membuka sekolah-sekolah untuk orang Indonesia, jumlahnya terbatas sekali dan tidak setiap anak mendapat kesempatan yang sama. Hanya anak-anak dari golongan tertentu yang dapat bersekolah — anak-anak orang berpangkat atau anak-anak golongan masyarakat yang mendapat keistimewaan seperti orang Indo, orang Ambon, orang Menado, dan orang Cina. Beruntunglah Ferdinand mendapat kesempatan yang jarang diperoleh orang Indonesia pada masa itu.

Setelah lulus dari ELS, F.L. Tobing bercita-cita bekerja di

Jawatan PTT — menjadi *ambtenaar*. Namun tak disangka-sangka datang panggilan dari STOVIA untuk mengikuti testing.<sup>6)</sup> Ini sangat mengherankan karena baik orang tuanya sendiri maupun orang tua angkatnya tidak pernah mendaftarkannya ke STOVIA. Bersama ayah angkatnya Ferdinand pergi ke Batavia (Jakarta sekarang) untuk mencari keterangan tentang surat panggilan yang mengherankan itu. Di kantor STOVIA mereka mendapat penjelasan bahwa benar surat panggilan itu untuk yang bernama F.L. Tobing sedang di Depok tak ada lagi orang yang bernama F.L. Tobing. Jadi pastilah Ferdinand L.T. lulusan ELS Bogor anak Pak Jonathan Pasanea yang dimaksud.

Dengan demikian hilanglah keragu-raguan F.L. Tobing dan dengan dorongan ayah angkatnya, dia mengikuti ujian masuk. Ia berpikir bahwa seandainya tidak lulus, tidaklah akan terlalu kecewa karena memang ia tidak mempersiapkan diri untuk ujian tersebut. Dan lagi bukan cita-citanya hendak menjadi dokter. Setelah ujian masuk selesai diikutinya dan pengumuman dikeluarkan, alangkah terkejut dan gembira hatinya. Ia lulus dan diterima sebagai mahasiswa STOVIA. Ia menyadari akan kemampuannya dan bertekad untuk belajar sungguh-sungguh agar kesempatan baik yang diperolehnya itu tidak sia-sia. Sebab tidaklah mudah diterima menjadi siswa di STOVIA. Hanya anak-anak orang terkemuka dan yang pandai sajalah yang dapat memasuki sekolah tersebut. Bapak pendeta Pasanea sendiri memang tidak pernah meragukan kemampuan anak angkatnya ini yang memang cerdas dan rajin serta tekun bekerja. Dengan tanpa lelah selalu didorong semangatnya.

Karena kesibukan-kesibukan yang dihadapi tanpa terasa tiga tahun telah berlalu. Selama ini F.L. Tobing tidak pernah gagal dalam studinya berkat kerajinan dan ketekunannya. Seperti umumnya para mahasiswa lain ia tinggal di asrama Jln. Kwini Kwitang<sup>7)</sup> yang juga merupakan gedung sekolah STOVIA. Sesuai dengan keadaan pada masa itu, semuanya masih serba sederhana bila dibandingkan dengan ukuran jaman sekarang. Para siswa tinggal di ruangan besar bersama-sama, masing-masing

mendapat sebuah tempat tidur dan sebuah lemari tempat pakaian dan milik pribadi masing-masing. Pengaturan ruangan seperti keadaan di barak rumah sakit, di mana tempat tidur itu dijajar sepanjang dinding saling berhadapan. Tak ada tirai atau pun penyekat yang memisahkan satu dari yang lain. Juga tidak ada hiasan.<sup>8)</sup> Hanya mahasiswa tingkat tinggi yang mendapat tempat lebih khusus.

Kehidupan di sekolah dan asrama sangat keras, mirip kehidupan militer. Semuanya berjalan menurut peraturan dan disiplin yang ada. Pada sore dan malam hari setelah makan semuanya belajar, baik di ruang belajar maupun di ruang perpustakaan yang memang tersedia di situ. Mahasiswa yang sudah senior menjadi pengawas dari mahasiswa yunior dan juga membantu mereka yang mendapat kesukaran. Hubungan sangat akrab, seperti satu keluarga besar. Kehidupan memang berat, namun selalu ada waktu bersantai. Pada siang hari setelah selesai kuliah atau lelah belajar, para siswa bisa beristirahat di halaman *STOVIA* yang sejuk dengan rumput yang hijau dan pohon-pohon yang rindang. Ada yang bercakap-cakap dengan teman-temannya, ada yang membaca buku-buku cerita yang disukainya, ada juga yang bermain musik seperti gitar atau biola. Tidak sedikit yang menggunakan waktu istirahatnya untuk tidur siang — ber-*siesta* kata orang Spanyol — untuk menghilangkan lelah. Pada malam hari, setelah lelah belajar ada yang berjalan-jalan ke Pasar Senen yang terletak tidak terlalu jauh dari gedung *STOVIA*. Biasanya mereka berjalan kaki sambil menghirup udara malam yang segar atau naik sepeda. Sebab pada waktu itu mobil atau motor belum umum dimiliki. Kendaraan bermotor hanya ada satu dua buah yang biasanya dimiliki oleh orang Belanda atau pejabat-pejabat tinggi pemerintah Hindia Belanda. Bila perlu bepergian agak jauh, penduduk biasanya memakai kereta kuda. Pada waktu-waktu istirahat ini Ferdinand senang bermain biola. Bila telah lelah belajar, diambil biolanya dan sambil duduk beristirahat digeseknya biola kesayangannya itu. Karena kegemarannya bermain biola inilah ia sempat berkenalan dengan seorang gadis Menado yang tinggal tidak jauh dari gedung *STOVIA*.

Anna Paulina Elfringhoff Kincap nama gadis yang manis itu yang karena minatnya kemudian belajar bermain biola pada pemuda Ferdinand L. Tobing. Pergaulan mereka semakin erat dan diakhiri dengan ikatan perkawinan yang berbahagia setelah F.L. Tobing lulus dari *STOVIA*.

Demikianlah kehidupan di *STOVIA* berjalan dari tahun ke tahun. Pada suatu hari tahun 1917 ketika F.L. Tobing sudah menyelesaikan studinya di tingkat tiga, ia dipanggil oleh pimpinan *STOVIA*. Ia ditanya bagaimana caranya bisa masuk dan kuliah di *STOVIA*. Di hadapan pimpinan *STOVIA* dan disaksikan oleh petugas bagian pendaftaran ia mengemukakan asal mulanya ia mendapat panggilan yang tidak disangka-sangka, dan setelah dicek ia diizinkan ikut ujian masuk, lulus dan terus kuliah sampai saat itu. Petugas bagian pendaftaran juga membenarkan keterangan F.L. Tobing.

Sebabnya ia diminta keterangan itu karena ternyata telah datang seorang calon siswa yang juga bernama Lumban Tobing yang telah menanti tiga tahun lamanya tapi belum mendapat panggilan juga. Setelah diadakan penelitian dan penilaian akan berkas-berkas dan prestasi F.L. Tobing selama ini, maka pimpinan *STOVIA* berkesimpulan bahwa kesalahan yang terjadi tidak terletak pada F.L. Tobing, lebih-lebih karena prestasinya selama ini sangat baik, maka diputuskan bahwa Ferdinand diizinkan meneruskan studinya. Sedang si calon siswa yang sudah menanti lama itu diizinkan turut ujian masuk pada kesempatan berikutnya.

Pada tahun 1920 kuliah dipindahkan ke gedung yang baru di Salemba karena gedung lama di Jln. Kwini sudah tidak memenuhi syarat lagi. Lebih-lebih untuk tempat praktek yang fasilitasnya sangat terbatas. Padahal bagi seorang calon dokter sangat penting mendapat kesempatan praktek yang cukup. Tambahan lagi gedung yang baru di Salemba itu sangat dekat dengan Rumah Sakit Umum Pusat (*CBZ* pada masa itu) yang menjadi tempat praktek yang sangat baik bagi para mahasiswa kedokteran. Gedung *STOVIA* di Jln. Kwini hanya menjadi asrama, tempat tinggal para siswa kedokteran saja.

Ketika masih kuliah ini, seperti para pemuda Indonesia lainnya yang berhasil mengecap pendidikan Barat, Ferdinand terjun ke lapangan pergerakan yang mencita-citakan kemajuan dan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sebelum tahun 1926 nama Indonesia memang belum umum dipakai, walaupun para mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda sudah memakainya untuk menamakan perkumpulan mereka *Indonesische Vereniging* atau Perhimpunan Indonesia. Pada waktu itu bangsa dan tanah Indonesia disebut Kepulauan Hindia Belanda atau Hindia Timur dan penduduknya disebut orang "India" (*Indier*).

Demikianlah Ferdinand mula-mula memasuki *Jong Batak Bond* yaitu suatu organisasi para pemuda dari Batak. Kemudian ia menggabungkan diri ke dalam *Jong Sumatranen Bond (JSB)* yang dipimpin oleh Mohammad Hatta dan Muhammad Yamin dan didirikan pada tanggal 9 Desember 1917. Ferdinand merasa bahwa JSB lebih luas ruang geraknya dari pada *Jong Batak Bond* dan dia memang menghendaki persatuan di kalangan yang lebih luas serta mengurangi batas-batas kedaerahan yang sempit. Idee yang mendasari sikapnya ini akan tampak jelas ketika ia di kemudian hari bertugas dalam jabatan tinggi negara Republik Indonesia.

Walaupun semasa menjadi mahasiswa Ferdinand aktif dalam gerakan kebangsaan, dalam kenyataannya ia tidak suka politik. Setelah lulus sekolah ia tidak memasuki sesuatu partai politik yang ada pada waktu itu. Demikian juga sampai hari tuanya ia tidak pernah mau menjadi anggota sesuatu partai politik karena menurut pengamatannya partai-partai politik itu hanya menjadi tempat untuk *interest* pribadi atau golongan saja dan sedikit yang benar-benar bekerja untuk rakyat atau memperjuangkan nasib rakyat. Tambahan pula ia berpendapat bahwa semua golongan turut berjuang membela Tanah Air. Hanya sekali ia pernah menjadi anggota suatu partai kecil pada tahun 1952 yaitu Sarikat Kerakyatan Indonesia (SKI) yang berpusat di Samarinda. Partai ini dibentuk oleh dr. H. Diapari Siregar suami dari kakak iparnya dan F.L. Tobing dibujuk untuk memasukinya. Ternyata SKI ini pun tidak berusia lama.

Setelah kuliah sekian tahun lamanya, akhirnya pada tanggal 20 Desember 1924 F.L. Tobing berhak memakai gelar dokter (pada waktu itu disebut *Indische Arts*). Ia diwisuda bersama beberapa orang rekannya karena jumlah mahasiswa yang diterima belajar di perguruan tinggi sangat terbatas. Lebih-lebih orang Indonesia, jumlahnya dapat dihitung dengan jari dan boleh dikatakan tidak terbuka kesempatan bagi kaum wanita. Ia segera ditugaskan di bagian penyakit menular di *CBZ* (Rumah Sakit Umum Pusat dr. Cipto Mangunkusumo sekarang). Mulailah tugas pengabdianya pada kemanusiaan dan masyarakat. Di situ dilihatnya penderitaan manusia, lebih-lebih di bagian penyakit menular ini, seperti misalnya cacar dan kolera para pasien dijaga ketat sekali. Hubungan dengan dunia luar dibatasi bahkan dengan sanak keluarganya sendiri, karena bila tidak demikian sangat berbahaya sebab si pengunjung dapat ketularan penyakit itu dan dapat menyebarkannya ke lingkungan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu dokter dan perawat di bagian ini tidak hanya berusaha menyembuhkan dan menolong si sakit tetapi juga bertugas menjadi teman dan menghiburnya agar tidak terasa seperti diasingkan. Juga merangkap menjadi juru penerang agar disadari oleh para penderita bahwa penyakitnya harus dicegah pengembangannya dengan jalan mengasingkannya.

Tak lama setelah lulus, pada tanggal 21 Maret 1925 dilangsungkanlah pernikahan dr. F.L. Tobing dengan nona Anna Paulina Elfringhoff Kincap, gadis Minahasa yang berdarah Jerman dan Bugis. Kakek nona Anna Paulina adalah seorang Jerman yang berpangkat kapten yang sewaktu bertugas di Bone terpikat hatinya dengan seorang gadis Bugis. Kemudian salah seorang putranya mempersunting gadis Menado.

Demikian dalam tubuh istri dr. F.L. Tobing tercampur darah Jerman, Bugis dan Menado, kemudian dia sendiri serta kedua orang kakak wanitanya menikah dengan putra-putra Batak.<sup>9)</sup> Karena seorang Batak penganut sistem kekeluargaan patrilineal, maka Ibu F.L. Tobing ini harus membeli marga dengan upacara-

upacara menurut adat Batak. Setahun kemudian lahirlah putra pertama mereka yang kemudian disusul dengan putra kedua dan ketiga sehingga dr. F.L. Tobing terjalin garis keturunan keluarganya.

Sesuai dengan peraturan kedinasan Pemerintah Hindia Belanda, setelah satu tahun bertugas di Jakarta, dr. F.L. Tobing dikirim bertugas ke Tenggarong ibu kota Kesultanan Kutai (Kalimantan Timur). Memang pada waktu itu pemerintah selalu dalam waktu-waktu tertentu memindahkan para pegawainya dari satu tempat ke tempat lainnya, atau dari satu pulau ke pulau lainnya. Maksudnya agar mereka mengetahui situasi dan kondisi wilayah Indonesia yang sangat berbeda-beda itu. Tambahan lagi diusahakan agar para tenaga ahli itu yang juga sangat diperlukan tenaganya di tempat-tempat yang jauh dari pusat jangan bertumpuk di pulau Jawa atau di kota-kota besar saja. Justru penduduk di pelosok-pelosok yang jauh dari pusat yang lebih memerlukan bantuan dan layanan pemerintah. Selama bertugas di Tenggarong ini dr. F.L. Tobing mengalami suatu peristiwa yang mengesankan. Sultan Kutai menderita sakit parah yang cukup lama. Walaupun segala usaha telah dilakukan tampak tidak banyak menolong. Akhirnya dengan ketekunan dan keakhlian serta kesabarannya dr. Tobing berhasil menyembuhkan. Sultan beserta segenap keluarga kerajaan sangat bersyukur dan berterima kasih kepada dokter muda kelahiran Tanah Batak ini. Sebagai tanda terima kasih maka dr. F.L. Tobing diangkat sebagai ayah oleh Sultan Kutai.<sup>10)</sup>

Lima tahun lamanya dr. F.L. Tobing bertugas di Kalimantan Timur. Tidak sedikit pengalaman yang didapat yang memperkaya pengetahuannya. Seperti kata pepatah bahwa pengalaman adalah guru kehidupan yang utama. Demikian juga pengalaman hidup dr. F.L. Tobing dapat menjadi cermin bagi kita semua.

Pada waktu itu dokter yang ada di Indonesia jumlahnya sedikit sekali. Lebih-lebih dokter Indonesia, sangat terbatas jumlahnya. Oleh karena itu pekerjaan seorang dokter memang berat. Ia harus merawat sejumlah besar penduduk di daerah yang luas. Ada satu peraturan yang digariskan oleh Pemerintah Hindia

Belanda bahwa dokter yang ditempatkan di sesuatu tempat berkewajiban menjalankan tugasnya sampai ke pelosok-pelosok yang termasuk wilayah itu. Karena itu seorang dokter pada masa itu sering mengadakan perjalanan tugas atau *tournee*, tak terkecuali dr. F.L. Tobing. Perjalanan tugas ini sering makan waktu berminggu-minggu terutama bila tempat-tempat yang dikunjungi itu jauh di pedalaman, sedang sarana komunikasi dan transportasi masih sangat terbatas. Dalam hal ini dorongan semangat dan hiburan dari anak dan isterinya sangatlah besar.

Tahun 1931 datang surat dari Pemerintah Pusat di Batavia bahwa dr. F.L. Tobing dipindahkan ke Surabaya. Masyarakat Tenggarong, lebih-lebih keluarga Sultan Kutai sangat sedih mendengar berita kepindahan ini. Namun mereka harus melepaskan dr. F.L. Tobing juga karena tugas lain menanti dia. Bagi keluarga dr. Tobing sendiri juga merasa berat untuk meninggalkan Tenggarong dan Kutai pada umumnya karena selama lima tahun tak sedikit pengalaman yang diperolehnya. Lebih-lebih keluarganya sudah bertambah dengan dua orang anak laki-laki yang lahir di situ.

Di Surabaya dr. F.L. Tobing ditugaskan di bagian penyakit dalam sambil memperdalam pengetahuannya di bidang ilmu bedah (*chirurgie*). Ia juga mendapat tugas mengajar di *NIAS* sebagai Asisten bersama-sama dokter Jaapar Hutagalung dan dr. Diapari Siregar yang keduanya kemudian menjadi adik iparnya. Keluarga dr. Tobing tinggal di kompleks Rumah Sakit Umum Pusat sehingga mudah dijumpai sewaktu-waktu diperlukan dan memang dia selalu siap sedia sehingga seringkali kepentingan keluarga dikesampingkan. Ia berusaha meningkatkan pengetahuan mantri-mantri yang membantunya dengan jalan menunjukkan kasus-kasus penyakit yang diderita oleh pasiennya. Dengan demikian sambil bekerja menambah pengetahuan.<sup>11)</sup>

Kurang lebih lima tahun ia tinggal di Surabaya dan ilmu bedah pun sudah difahaminya. Pada tahun 1935 ia mendapat surat pindah untuk bertugas di Padang Sidempuan. Seperti kata pepatah "kerbau pulang ke kandang", demikianlah halnya dengan dr.

Tobing. Sekali ini ia mendapat tugas di bumi kelahirannya – Tanah Batak. Memang sudah cukup lama Tapanuli ditinggalkannya. Walaupun sekali dua ia pernah pulang menengok kampung halaman. Baru sekali ini tiba kesempatan untuk bekerja bagi daerah kelahirannya. Namun bagi dr. Tobing tidaklah menjadi suatu masalah di mana ia akan bekerja atau ditempatkan. Baginya di manapun bumi Indonesia adalah sama – Tanah Airnya juga. Semangat bertanah air satu: Indonesia memang sejak lama telah dihayatinya. Itulah sebabnya ia tidak merasa canggung untuk bertugas di Kalimantan Timur atau pun di Surabaya.

Sama seperti tugasnya di Tenggaraong, selama ditempatkan di Padang Sidempuan dan kemudian di Sibolga dr. F.L. Tobing, juga harus sering mengadakan perjalanan tugas ke daerah-daerah seperti Kota nopan dan Penyabungan. Bila keadaan mengijinkan sang istri turut mendampingi karena hubungan lalulintas di sini lebih baik ketimbang di daerah Kutai. Ternyata perjalanan tugas selama menjadi dokter ini sangat berguna kelak, ketika harus memimpin rakyat Tapanuli bergerilya menghadapi Belanda. Pada tahun 1937 ia ditugaskan menjadi dokter di Sibolga terus sampai Balatentara Jepang berkuasa dan baru tahun 1944 ditarik oleh keadaan untuk terjun ke dunia pemerintahan. Walaupun demikian profesinya sebagai dokter yang bertugas menolong dan mengobati orang sakit terus dijalankannya juga selama waktu mengizinkan. Bahkan ketika bergerilya di mana keadaan memungkinkan ia menolong rakyat yang menderita sakit.

## II. JAMAN JEPANG – DOKTER F.L. TOBING TERJUN KE DUNIA POLITIK

Kedatangan kekuasaan Jepang di Indonesia pada awal tahun 1942 telah mendorong dokter F.L. Tobing bersama puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang Indonesia lainnya memasuki suatu kehidupan yang belum pernah dikenalnya. Dalam perjalanan Sejarah Indonesia Jepang yang terjun ke dalam kancah Perang Dunia II telah memeras sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia untuk kepentingan militerismenya. Di mana pun mereka berada rakyat menderita.

Keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II yang dahsyat ini dimulai pada suatu pagi yang tenang di awal Desember 1941. "*Tora, tora, tora*", demikianlah seruan Jepang yang berkumandang di minggu pagi yang sejuk, ketika orang masih lelap tidur setelah bersantai pada malam harinya. Bersamaan dengan gema seruan perang itu muncullah berpuluh-puluh pesawat udara Jepang dari balik cakrawala dan menghujani pangkalan armada Amerika Serikat di Bandar Mutiara (Pearl Harbour), Hawai dengan bom-bom mautnya. Panik, kacau balau dan penderitaan telah mengubah suasana pagi yang tenang dan tentram itu. Tidak terhitung korban yang jatuh di pihak pelaut dan warga Amerika Serikat akibat serangan pesawat-pesawat udara Jepang yang berpangkalan di kapal induknya di Samudera Pasifik. Maka pada tanggal 7 Desember 1941 waktu belahan bumi bagian barat meletuslah Perang Dunia II di wilayah Pasifik, sehingga peristiwa dahsyat itu sering juga dinamakan Perang Pasifik.

Serentak dengan serangan yang tiba-tiba itu Jepang juga melancarkan perang kilatnya ke selatan dan dengan cepat daerah demi daerah, pulau demi pulau khususnya di Asia Tenggara jatuh ke tangannya. Indonesia juga tidak luput dari nasib yang sama. Pada bulan Januari 1942 pasukan Jepang sudah mendarat di Tarakan, sebuah pulau kecil di sebelah timur laut Kalimantan yang banyak menghasilkan minyak bumi. Kemudian dengan gerak

cepat, pasukannya menyerbu ke selatan tanpa menghadapi banyak kesukaran sebab pasukan Belanda yang pada waktu itu bertugas mempertahankan Indonesia tidak berdaya menghadapi serangan hebat dari utara itu. Akhirnya takdir tak dapat ditolak. Pada tanggal 8 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Penanda-tanganan penyerahan itu dilakukan oleh Letnan Jenderal Hein ter Poorten kepada Panglima pasukan Jepang Jenderal Imamura di Kalijati, Jawa Barat. Sejak saat itulah seluruh wilayah Hindia Belanda jatuh di bawah kekuasaan *Dai Nippon*.

Wilayah yang luas ini yang tadinya berada di bawah satu kekuasaan sipil yang berpusat di Batavia, (sekarang Jakarta), oleh Jepang dipecah menjadi tiga kekuasaan militer yaitu Jawa dan daerah sekitarnya dikuasai oleh Komando Tentara ke-16 yang berpusat di Jakarta; Kalimantan, Sulawesi dan daerah Kepulauan Indonesia bagian timur lainnya di bawah Komando Tentara Laut dengan pusat di Makasar (sekarang Ujung Pandang); sedang Sumatra digabung dengan Semenanjung Malaya dikuasai oleh Komando Tentara ke-25 yang berpusat di Singapura. Tetapi kemudian pada tahun 1943 dengan terjadinya perubahan situasi di medan pertempuran, dirasakan perlunya untuk mengubah susunan organisasi komando militernya. Pada bulan April 1943 dibentuklah dua komando Gabungan Tentara yaitu Komando Gabungan Tentara ke-II dan Komando Gabungan Tentara ke-VII yang masing-masing berpusat di Rantepao (Sulawesi Tengah) dan di Singapura. Komando Gabungan Tentara ke-VII membawahi Komando Tentara ke-16 Jawa yang bermarkas besar di Jakarta, Komando Tentara ke-26 yang kini hanya menguasai Sumatera saja dan bermarkas besar di Bukittinggi, serta Komando Tentara ke-29 yang menguasai Kalimantan Utara dengan markas besarnya di Taiping. Sedang wilayah Indonesia lainnya berada di bawah kekuasaan Komando Gabungan Tentara ke-II.

Pemerintah Balatentara Jepang menyatakan bahwa tujuan penyerbuan adalah untuk membentuk suatu wilayah politik yang disebut "Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya" di bawah

naungan kemaharajaan Jepang. Akan tetapi maksud yang sesungguhnya adalah menjadikan daerah-daerah dan pulau-pulau di selatan yang kaya itu sebagai sumber kehidupan rakyat Jepang. Pada waktu itu Pimpinan Pemerintahan Jepang menyadari bahwa tidak lama lagi besar kemungkinannya bumi Jepang tak akan mampu menampung kehidupan warganya. Sedang daerah-daerah dan pulau-pulau di sebelah selatannya begitu kaya dan subur.

Sudah tentu niat yang dikandung oleh para penguasa Jepang ini tidak difahami oleh rakyat Indonesia, kecuali beberapa orang pemimpin politik Indonesia yang sudah sejak lama mencurigai perkembangan fasisme Jepang. Mereka merasa khawatir akan ancaman bahaya fasisme itu. Karena pada umumnya rakyat tidak tanggap rasa terhadap bahaya yang tersembunyi itu, maka kedatangan tentara Jepang telah disambut dengan gembira di mana-mana, demikian pula di daerah Sumatera khususnya di Tapanuli. Propaganda yang sudah lama dikumandangkan oleh Jepang bahwa mereka adalah "Saudara tua" rakyat Indonesia yang datang untuk membebaskan "Saudara mudanya" yang terjajah telah meninggalkan kesan yang dalam pada sanubari rakyat Indonesia. Lebih-lebih propaganda Jepang itu memang menjadi kenyataan. Jepang mengizinkan rakyat Indonesia mengibarkan bendera Merah Putih berdampingan dengan bendera Jepang *Hinomaru* (Matahari Terbit), menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan melarang pemakaian bahasa Belanda serta menganjurkan pemakaian bahasa Indonesia. Rakyat berharap bahwa tak lama lagi perang akan berakhir dan kemerdekaan yang sudah sejak lama diperjuangkan dan dicita-citakan akan tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Apa daya harapan rakyat itu semakin lama semakin melenyap sejalan dengan perubahan sikap penguasa Jepang dan pasukan-pasukannya. Bukannya kebebasan dan kemerdekaan yang dinikmati rakyat, tetapi penindasan dan penderitaan yang diberikan oleh penguasa fasis itu. Sang Merah Putih kemudian dilarang dikibarkan dan demikian juga dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilarang dinyanyikan. Orang Indonesia dipaksa belajar

bahasa Jepang dengan tulisan *Katakana* dan *Hiragana* atau tulisan aksara Jepang. Bila bertemu dengan orang Jepang rakyat dipaksa memberi hormat dengan membungkuk sedalam-dalamnya. Lupa melakukan hal ini pukulan, tempeleng dan macam-macam siksaan yang lain pasti akan diderita. Selain dari itu segala organisasi rakyat, terutama partai-partai politik yang sudah berdiri sejak lama pada masa Hindia Belanda dibubarkan. Sebagai gantinya Jepang membentuk organisasi-organisasi rakyat untuk menunjang usaha perangnya.

Demikian pula dengan rakyat Tapanuli, hidupnya pun sangat menderita. Mereka tidak hanya diperas sumber kehidupannya seperti penyerahan wajib bahan makanan atau hasil kebunnya, tetapi juga tenaganya. Banyak orang yang dijadikan *romusha*. Mereka dipaksa bekerja keras tanpa mendapat jaminan hidup yang layak, bahkan tidak sedikit yang dikirim ke luar daerah, jauh dari tempat tinggalnya dan terpisah dari sanak keluarganya. Tidak sedikit korban yang jatuh akibat perlakuan Jepang pada para *romusha* yang di luar batas perikemanusiaan itu.

Walaupun rakyat Tapanuli dipaksa menyerahkan makanan sehari-hari mereka seperti beras, jagung, ternak seperti ayam dan babi, namun kelaparan yang parah tidak sampai melanda mereka. Alam Sumatera yang kaya dan subur serta jumlah penduduk yang tidak sepadat pulau Jawa sedikit banyak telah mengurangi beban penderitaan mereka. Lebih-lebih tanah Batak yang memang subur itu. Keladi, ubi, terong, macam-macam sayuran dan umbi-umbian yang lain serta buah-buahan seperti pisang dan nenas masih bisa dimanfaatkan oleh rakyat. Namun walaupun demikian kebutuhan pokok lainnya seperti pakaian dan obat-obatan boleh dikatakan tak dapat diperoleh sama sekali. <sup>1)</sup>

Pada masa ini dr. F.L. Tobing bertugas sebagai dokter Rumah Sakit Umum Sibolga. Tugas ini dijabatnya sejak tahun 1937 ketika ia dipindahkan dari Padang Sidempuan. Di samping tugasnya di rumah sakit ia meneruskan usahanya menolong rakyat dengan terus membuka praktek di rumahnya pada sore hari setelah me-

nyelesaikan tugasnya di rumah sakit. Karena ia bertempat tinggal tidak jauh dari rumah sakit, maka tidak jarang ia dipanggil ke rumah sakit karena ada pasien yang memerlukan pertolongannya. Lebih-lebih sebagai ahli bedah bila ada pasien yang gawat dan perlu dioperasi tak ayal lagi dr. FL. Tobing lah yang menanganinya karena pada waktu itu jumlah dokter di Indonesia dapat dihitung dengan jari. Dengan demikian boleh dikata jam kerjanya adalah dua puluh empat jam. Ini semuanya dilakukannya dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi sesuai dengan sumpah kedokteran yang diucapkannya pada waktu pelantikan dulu. Tempat praktek di rumah juga selalu penuh. Ia benar-benar membaktikan dirinya sepenuhnya pada profesinya. <sup>2)</sup>

Sebagai dokter benar-benar dia dapat memahami dan menghayati betapa besar penderitaan yang ditanggung orang Indonesia pada waktu itu. Setiap saat boleh dikatakan dia menghadapi pasien-pasien dengan berbagai macam penyakit, yang terutama adalah penyakit kurang gizi seperti beri-beri, penyakit malaria dan penyakit kulit seperti patek. Pada umumnya kesehatan rakyat sangat buruk, tambahan lagi karena kekurangan vitamin mudah berjangkit. Keadaan ini sangat menyedihkan dr. F.L. Tobing. Lebih-lebih hatinya sangat tertekan karena kelangkaan obat-obatan. Maka dengan kemampuan yang ada padanya dr. F.L. Tobing berusaha membantu mengurangi beban rakyat. Dengan persediaan obat-obatan yang terbatas ia berusaha menyembuhkan yang sakit sambil terus memberi nasehat kepada yang sehat agar berusaha mencegah untuk tidak jatuh sakit. Selain itu karena Rumah Sakit Umum Sibolga dipakai oleh Jepang, maka dr. F.L. Tobing memindahkan prakteknya untuk melayani rakyat umum ke kompleks gereja Angin Nauli, yaitu gereja tertua yang didirikan pertama kali oleh Zending Jerman. Dengan demikian dicoba untuk tidak terlalu sering berhubungan dengan Jepang dan lebih leluasa membantu penderitaan rakyat. <sup>3)</sup>

Yang sangat memerlukan hati dr. F.L. Tobing adalah tugasnya untuk mengawasi kesehatan para *romusha* yang dipakai bekerja untuk membuat pertahanan di teluk Sibolga yang permai itu.

Namun keindahan alam tidaklah dapat mengobati dan menyenangkan badan yang sakit dan kelaparan. Perlakuan Jepang terhadap para *romusha* ini sering melampaui batas perikemanusiaan. Mereka dimasukkan ke dalam barak-barak yang sangat buruk, yang tak memenuhi syarat sebagai tempat tinggal, pakaiannya compang-camping dan makanan yang mereka terima tidak mencukupi untuk tubuh mereka yang terperas tenaganya. Tambahan lagi para pengawal Jepang banyak yang kejam, yang memperlakukan para *romusha* yang badannya sering hanya tinggal kulit pembalut tulang dengan sewenang-wenang. Apa daya dr. F.L. Tobing tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk menghentikan penderitaan kawan sebangsanya. Namun dengan kemampuan yang ada padanya dia berikhtiar untuk mengurangi penderitaan sesamanya. Sifatnya yang lembut dan kebapaan sudah merupakan suatu hiburan yang akan mengurangi penderitaan, bagi mereka yang menderita.

Bagaimanapun lama-lama dalam diri dr. F.L. Tobing timbul perasaan tidak senang terhadap orang-orang Jepang. Agaknya perasaannya itu tercermin dalam tindak-tanduknya, sehingga dia dicurigai. Bahkan ada desas-desus bahwa penguasa Jepang mempunyai sebuah daftar hitam yang memuat nama para pemimpin Indonesia yang harus disingkirkan atau dimusnahkan dan nama dr. F.L. Tobing termasuk dalam urutan teratas. Penguasa Jepang memang selalu mencurigai kaum terpelajar atau kaum cerdik pandai lebih-lebih yang telah mendapat didikan Barat. Mereka dikhawatirkan akan menentang kekuasaan Jepang dan membantu Sekutu. Seperti yang terjadi di Kalimantan Barat, boleh dikatakan semua kaum terpelajar di situ telah dibunuh Jepang. Akan tetapi akhirnya dr. F.L. Tobing terhindar dari nasib buruk yang akan menyimpannya berkat keahliannya sebagai dokter dan sifatnya yang penuh tanggungjawab pada tugasnya. Prinsipnya walau musuh sekalipun kalau memerlukan pertolongan patut dibantu sebab tugas seorang dokter adalah mengabdikan pada kemanusiaan.

Suatu kejadian telah menghiasi lembaran sejarah hidup dr. F.L. Tobing. Pada suatu hari seorang perwira *Kempei Tai* (Polisi Militer

Jepang) yang bernama Inoue jatuh dari mobil ketika sedang belajar mengemudi. 4) Para dokter Jepang dan pembantunya segera memberikan pertolongan dan berusaha menyelamatkan Inoue yang luka parah itu. Namun tampaknya usaha mereka akan sia-sia; si sakit keadaannya semakin mencemaskan. Dr. F.L. Tobing yang sejak semula berusaha menawarkan bantuannya mendesak agar diperkenankan membantu mengobati keadaan Inoue yang gawat itu. Orang Jepang ragu-ragu untuk meluluskan permintaan sebab mereka khawatir bahwa dr. F.L. Tobing yang dicurigai itu beriktikat tidak baik dan mungkin akan membinasakan Inoue. Tambahan lagi mereka meragukan kemampuan dokter Indonesia ini yang mutunya menurut pendapat orang Jepang, jauh di bawah mutu para dokter Jepang sendiri. Namun tak ada jalan lain. Orang Jepang sudah putus asa dan keadaan perwira *Kempei Tai* itu semakin gawat.

Akhirnya diambil suatu keputusan. Karena para dokter Jepang sudah tidak mampu lagi menolong Inoue apa salahnya bila kepada dr. F.L. Tobing diberi kesempatan. Jika Inoue meninggal di tangan dr. F.L. Tobing maka akan ada alasan untuk menghukum dokter yang dicurigai itu karena menurut perhitungan mereka Inoue kecil kemungkinannya akan dapat hidup. Tuhan memang Maha Besar. Dengan keahliannya dan pengalamannya dr. F.L. Tobing berhasil menolong perwira *Kempei Tai* yang mempunyai kedudukan penting itu. Sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur Inoue sembuh kembali.

Ternyata Inoue adalah orang yang tahu berterima kasih. Ia dan orang-orang Jepang lainnya mulai hilang kecurigaannya pada dr. F.L. Tobing dan pertolongan yang telah diberikan benar-benar sangat dihargai.

Memasuki tahun 1943 terjadi perubahan baik pada diri dr. F.L. Tobing maupun pada pemerintah Balatentara *Dai Nippon*. Jepang mulai terdesak di medan pertempuran. Mereka harus bersikap defensip karena serangan Sekutu semakin hebat. Mulailah timbul kesadaran pada para penguasa Jepang bahwa untuk mempertahankan kedudukannya bantuan dan dukungan rakyat sangat

dibutuhkan. Jepang tidak bisa bersandar pada kekuatan pasukannya saja. Untuk mempertahankan wilayah penduduk setempat harus diikuti-sertakan untuk membela diri. Mulai dicari jalan untuk membujuk penduduk yang sudah benci kepada Jepang akibat tindakan Jepang yang banyak menyebabkan penderitaan.

Pada pertengahan tahun 1943 Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo berkunjung ke Indonesia. Pada tanggal 7 Juli 1943 diadakan rapat raksasa di lapangan IKADA (Medan Merdeka Selatan sekarang) di Jakarta di mana P.M. Tojo mengemukakan bahwa kepada orang Indonesia akan diberikan kesempatan untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan .

Yang dimaksud dengan "turut mengambil bagian dalam pemerintahan" adalah menempatkan orang-orang Indonesia dalam jabatan tinggi dalam pemerintahan, sebagai penasehat pada Pemerintah Militer dan sebagai anggota dari badan-badan pertimbangan baik di pusat maupun di daerah yang akan dibentuk. Sudah barang tentu pernyataan P.M. Tojo ini disambut dengan penuh harapan oleh segenap rakyat Indonesia, sebab hal ini berarti bahwa idam-idaman yang sudah sejak lama terpendam untuk mengatur dirinya sendiri akan terpenuhi.

Kenyataan acapkali berbeda dari harapan. Badan-badan pertimbangan yang merupakan wakil rakyat baik di pusat maupun di daerah yang dibentuk tidaklah merupakan badan perwakilan rakyat yang dapat menyuarakan kehendak hati rakyat yang sebenarnya. Tugas badan-badan tersebut hanyalah mengajukan usul kepada Pemerintah serta menjawab pertanyaan-pertanyaan Pemerintah mengenai soal-soal politik. Pada hakekatnya Pemerintah Militer Jepang bertindak sendiri, karena sebetulnya pembentukan kedua badan ini hanyalah sebagai alat pemikat bagi rakyat Indonesia agar rela berkorban lebih besar lagi dalam membantu Jepang.

Bila di Jawa Badan Pertimbangan Pusat (*Cuo Sangi In*) sudah dibentuk pada bulan September 1943, *Cuo Sangi In* Sumatra baru dibentuk pada tanggal 24 Maret 1945. Hal ini disebabkan karena Komando Pasukan ke-25 yang membawahi Sumatra mempunyai pandangan yang berbeda dari Komando Pasukan yang ke-26 yang menguasai Jawa. Komando Sumatra masih enggan untuk membe-

rikan konsesi politik kepada orang Indonesia. Akan tetapi pada bulan Nopember 1943 di sepuluh keresidenan di Sumatera dibentuk juga Badan Perwakilan Daerah yang dinamakan *Syu Sangi Kai*. Untuk keresidenan Tapanuli dr. F.L. Tobing diangkat sebagai ketuanya. Ada dugaan hal ini mungkin merupakan tanda terima kasih orang Jepang kepadanya yang telah menyelamatkan nyawa seorang kawan mereka. Namun yang pasti adalah bahwa sejak itu dr. F.L. Tobing mulai terjun ke dunia baru — dunia politik. Akan tetapi dia tetap meneruskan profesinya, mengabdikan pada kemanusiaan dan membantu meringankan penderitaan mereka yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit.

Walaupun pada waktu bersekolah di *STOVIA* dia pernah aktif di *Jong Sumatranen Bond*, sejak lulus dan bertugas boleh dikatakan tidak pernah turut aktif dalam pergerakan politik. Sehingga dunia politik sebenarnya adalah dunia yang asing baginya. Tetapi karena tugas dan kewajibannya ia tidaklah merasa asing dengan kehidupan politik, tambahan lagi perasaannya sangat peka terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Dengan demikian ia tidak merasa canggung ketika memasuki dunia baru ini. Sifat pribadinya juga merupakan modal kekuatan yang menunjang pelaksanaan tugas. Ia jujur, dan teliti dan tekun bekerja. Sebagai pemimpin ia tidak suka omong-kosong dan bersikap sebagai komandan, artinya bisa memberi contoh dan petunjuk dan tak segan-segan memberi teguran yang mendidik kepada yang bersalah. <sup>5)</sup>

*Syu Sangi Kai* atau Badan Pertimbangan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah ini mula-mula bertempat di Sibolga. Kemudian terpaksa dipindahkan ke Tarutung karena Sekutu mulai menggempur Sibolga dari laut. Anggota *Syu Sangi Kai* yang kira-kira berjumlah 40 orang meliputi hampir segala unsur masyarakat seperti wakil-wakil kelompok nagari, wakil kepala adat, wakil kelompok agama, wakil kaum wanita dari *Fujinkai* dan lain sebagainya. Dalam tugas sehari-hari sebagai Ketua dr. F.L. Tobing dibantu oleh Sahil Sitompul yang menjabat sebagai sekretaris muda merangkap menjadi sekretaris pribadi. Sahil Sitompul inilah yang antara lain juga terus mendampingi dr. F.L. Tobing bergerilya bersama kaum republik lainnya setelah Jepang kalah dan Belanda berusaha menjajah kembali. <sup>6)</sup>

Sesungguhnya tidak ringan tugas yang dijalankan oleh dr. F.L. Tobing serta orang-orang Indonesia lainnya di masa Jepang ini. Di satu pihak mereka harus melaksanakan perintah-perintah Jepang yang menjadi atasan dan di pihak lain mereka harus melindungi rakyat umum yang sudah sangat menderita dari kesewenang-wenangan fasisme. Untunglah dr. F.L. Tobing dilindungi dan didampingi oleh orang-orang yang mencintainya, terutama isteri dan anak-anaknya. Isterinya adalah seorang wanita yang aktif dan suka bekerja. Ia bergabung dalam kerukunan wanita masa itu yang disebut *Fujinkai*. Berbagai macam tugas yang harus dijalankan oleh *Fujinkai*, terutama di lapangan pendidikan dan kesejahteraan. Salah satu tugas yang harus dilakukan adalah konveksi, yaitu membuat pakaian untuk para prajurit. Dalam melakukan tugas inilah pada kesempatan untuk mengambil sebagian dari kain yang harus dijahit untuk diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan itu, di mana sudah banyak orang yang berpakaian karung goni dan kulit kayu (disebut *taki*), maka secarik kain merupakan barang yang berharga. <sup>7)</sup>

Kedudukan Jepang semakin sulit karena desakan Sekutu semakin hebat. Bantuan tak mungkin lagi diharapkan akan datang dari negerinya. Tak lain Jepang hanya mengandalkan pada kekuatan yang ada dan terpaksa lebih mengerahkan bantuan dan dukungan rakyat Indonesia. Pertahanan di dalam negeri lebih diperhebat. Jepang membangun tentara garis kedua yang terdiri sepenuhnya dari orang-orang Indonesia. Untuk keperluan ini dibuka kesempatan sebesar-besarnya bagi para pemuda Indonesia untuk dapat menguasai ilmu dan pengetahuan militer guna perjuangan kemerdekaan. Kesempatan yang semacam ini tidak pernah diperoleh pada jaman penjajahan Belanda.

Berbeda dengan sikap Belanda, Jepang tidak merasa takut untuk mengajarkan ilmu dan pengetahuan militer kepada para pemuda Indonesia. Jepang bahkan telah turut juga menanamkan semangat keprajuritan dan kebangsaan kepada para pemuda Indonesia, agar mereka dengan keyakinan penuh dapat membela Tanah Airnya. Sudah tentu maksud dan tujuan Jepang bukanlah

untuk membiarkan para prajurit itu untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Maksud yang sesungguhnya adalah agar para pemuda Indonesia dengan penuh semangat membantu usaha perang Jepang. Padahal kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Para pemuda itu menjadi pejuang-pejuang yang gigih dan bersemangat dalam revolusi fisik mempertahankan Kemerdekaan.

Demikianlah ketika terbuka kesempatan untuk menjadi PETA berbondong-bondong pemuda Indonesia mendatangi kantor-kantor pendaftaran untuk mencatatkan diri menjadi anggotanya dan untuk mendapat kesempatan mempelajari ilmu kemiliteran. Bisa difahami betapa bergairahnya para pemuda Indonesia itu dalam menyambut seruan untuk memasuki tentara. Mereka penuh diliputi oleh semangat patriotik dan harapan-harapan baru.

Di Tapanuli segera dibentuk Badan Pertahanan Negeri (BAPEN) yang dipimpin oleh dr. F.L. Tobing sendiri. Dr. F.L. Tobing segera menerima tugas yang dibebankan oleh Jepang ini, tetapi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Tapanuli lainnya yang duduk dalam Pimpinan BAPEN secara diam-diam menyusun rencana sendiri untuk memperjuangkan kemerdekaan yang sudah tentu bertentangan dengan kepentingan Jepang.

Pada lahirnya para pemimpin itu berpura-pura berpropaganda untuk Jepang, akan tetapi pada hakekatnya mereka berusaha keras untuk membangkitkan kesadaran nasional di kalangan rakyat. Memang keadaan pada waktu itu sangat menguntungkan sebab Jepang sendiri selalu mendung-dungungkan propaganda membela Tanah Air. Untuk ini semangat kebangsaan harus ditanamkan dan dikembangkan di kalangan rakyat, khususnya para pemuda. Salah satu jalan yang sejak awal dilakukan oleh Jepang adalah mengorganisasi para pemuda dalam barisan-barisan seperti *Seinendan* dan *Keibodan* yang dibentuk sampai ke pelosok-pelosok yang jauh. Agaknya Jepang mempunyai keyakinan bahwa dalam keadaan bahaya biarlah konsesi-konsesi diberikan dengan harapan bila perang berakhir dengan kemenangan Jepang maka dengan mudah Jepang akan memperketat cengkeramannya lagi.

Karena kekuatan pasukan Jepang semakin susut, sedang kekuatan Sekutu terus-menerus mendesak, maka penguasa Jepang lebih memperluas konsesi yang diberikan kepada Indonesia. Para pemuda, khususnya yang berpendidikan dipanggil untuk dididik menjadi Pasukan Pembela Tanah Air (PETA). Di Sumatera namanya *Gyu-Gun* atau dalam bahasa Indonesianya "Tentara Rakyat".

Akan tetapi istilah "Tentara Rakyat" ini tidak pernah menjadi populer.<sup>8)</sup> Berbeda dengan di Jawa di mana pengorganisasian dan latihan dipusatkan, di Sumatera diadakan di beberapa tempat berdasarkan pembagian wilayah yang ada pada waktu itu.

Untuk daerah Sumatera Utara yang mencakup daerah Sumatera Timur dan Tapanuli diadakan di Siborong-borong. Lamanya latihan antara enam dan sembilan bulan. Pendaftaran untuk menjadi calon anggota dilakukan oleh suatu badan seperti BAPEN di Tapanuli. Kesempatan ini pun tidak dibiarkan berlalu oleh Paul Tobing anak dr. F.L. Tobing yang waktu itu baru berumur belasan tahun dan duduk di SMP Sibolga. Sesungguhnya dalam suasana perang, orang sering melupakan kepentingan sendiri dan anak-anak cepat menjadi dewasa. Pengalaman di masa Jepang ini sangat berguna bagi Paul Tobing dan saudara-saudaranya yang terus membantu dan mendampingi ayahandanya selama bergerilya menghadapi Belanda.

Memang para pemuda yang berhasil masuk ke dalam *Gyu-Gun* atau PETA mendapat gemblengan fisik dan mental yang berat. Mereka mendapat latihan dasar kemiliteran yang intensif sekali walaupun dalam hal penggunaan senjata sangat dibatasi. Bahkan sering dipakai senjata dari kayu saja. Namun hasilnya benar-benar patut dibanggakan, seperti terbukti dalam revolusi fisik yang beberapa waktu kemudian benar-benar harus dihadapi oleh para pemuda Indonesia itu.<sup>9)</sup>

Sebenarnya yang paling penting adalah gemblengan semangat yang dilakukan terutama oleh pemuka-pemuka daerah, seperti tokoh-tokoh BAPEN di Tapanuli. Para pemuka ini seperti dr. F.L. Tobing dan tokoh-tokoh nasional lainnya secara jelas menggambarkan jahatnya penjajahan dan ditanamkan semangat anti-Barat seperti yang diinstruksikan oleh para penguasa Jepang diselipkan

ajaran-ajaran yang membangkitkan semangat Kebangsaan dan Kemerdekaan. Para pemuda itu pun akhirnya faham bahwa Jepang yang tak berbeda dari Belanda adalah penjajah juga.

Berbeda dari *Heiho*, *Gyu-Gun* direncanakan untuk mempertahankan daerahnya sendiri, kampung halamannya, dan tidak dikirim ke medan perang yang sering jauh dari daerah asalnya. Oleh karena itu mereka dididik untuk mengenal situasi alam sekitarnya. Di samping itu hubungan dan kerja sama dengan segala lapisan masyarakat di wilayahnya dipererat. Terjadilah saling-pengenalan yang lebih erat dan terbinalah hubungan yang akrab. Keadaan ini sungguh menguntungkan sebab dalam perang gerilya menghadapi Belanda kemudian, bantuan rakyat tak ternilai harganya.

Dalam keadaan seperti ini tanggungjawab dr. F.L. Tobing menjadi semakin berat. Dia harus bertindak benar-benar sebagai seorang ayah yang sedang mengasuh anak-anaknya dan melindunginya dari bahaya. Sifat pembawaannya yang tenang, bijaksana, jujur, tapi juga tegas<sup>10)</sup> banyak membantunya. Seperti dikatakan oleh S.Sitompul yang selalu mendampinginya, "Kalau perlu Bapak dr. F.L. Tobing bisa geprak meja".

Bahkan anaknya sendiri juga mempunyai penilaian yang sama. Paul L.T. menyatakan bahwa, "Dalam tugas, walaupun terhadap anaknya sendiri Bapak bertindak sebagai Komandan". Tidak pernah dr. F.L. Tobing membedakan apakah orang itu anaknya sendiri atau orang lain. Pendeknya siapa pun harus menjalankan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih dr. F.L. Tobing adalah seorang yang suka bekerja keras dan tekun, maka dia sering menuntut dari orang lain hal yang sama. Dalam keadaan gawat pernah ia bekerja tiga hari tiga malam di rumah sakit dan tidak pulang ke rumah, walaupun rumahnya dekat sehingga ia lupa akan tanggal dan hari.<sup>11)</sup> Sudah tentu hal semacam ini akan berat ditanggung oleh keluarganya, lebih-lebih isterinya, bila tidak memahami sifat tabiat dr. F.L. Tobing sedalam-dalamnya.

Memasuki tahun 1944 keadaan semakin buruk bagi Jepang. Pada bulan April pesawat-pesawat terbang Sekutu sudah mulai menyerang Sabang, pelabuhan dan gudang-gudang di Belawan

(Sumatera Timur), dan tangki-tangki minyak di Pangkalan Berandan. Ternyata musuh sudah di depan hidung Jepang. Pertahanan, dengan demikian, harus diperkuat dan untuk ini pengerahan penduduk setempat harus lebih ditingkatkan. Maka dibentuk sebuah organisasi yang bertujuan untuk pengerahan massa dan disebut *Gyu Hokookai*. Dr. F.L. Tobing diangkat sebagai ketuanya dan dibantu oleh Abdul Hakim, Sutan Naga, Cornellius Sihombing, Raja Saul Lumban Tobing dan beberapa pemuka Tapanuli lainnya. Badan ini yang oleh Jepang dimaksudkan untuk meningkatkan bantuan rakyat, oleh para pemuka rakyat digunakan untuk mendidik rakyat agar faham akan artinya kemerdekaan. Selain itu beban yang diletakkan di pundak dr. F.L. Tobing bertambah berat karena dia diangkat sebagai *Fuku Sumu Bucho* atau Wakil Muda Pemerintah. Hal ini terjadi karena Jepang yang merasa kedudukannya sudah goncang memerlukan orang Indonesia sebagai pendamping.<sup>12)</sup>

Keadaan medan pertempuran semakin memburuk bagi Jepang. Rupanya harapan untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya semakin hilang. Maka pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Koiso yang menggantikan Tojo mengumumkan di depan sidang istimewa Parlemen Jepang bahwa daerah Hindia Timur (Indonesia) diperkenankan merdeka di kelak kemudian hari.<sup>13)</sup>

Pemerintah Jepang di Tapanuli khususnya melalui badan-badan dan alat-alat propagandanya melancarkan dan mengumumkan janji kemerdekaan itu sampai ke pelosok-pelosok kampung.<sup>14)</sup> Hal ini di kemudian hari sangat menguntungkan Indonesia sebab ketika proklamasi kemerdekaan disebarluaskan, rakyat pada umumnya sudah siap sedia menerimanya.

Untuk melaksanakan "Janji Koiso" itu maka pada bulan Mei 1945 dibentuk *Cuo Sangi In Sumatera* (Dewan Penasehat Sumatera) yang beranggotakan wakil-wakil dari setiap keresidenan di Sumatera. Dr. F.L. Tobing termasuk tokoh Tapanuli yang diangkat menjadi anggotanya. Badan ini diketuai oleh Mohammad Syafei dari Sumatera Barat dengan wakilnya Mr. A. Abas dari Sumatera Selatan dan Teuku Nya Arif dari Aceh. Sedang yang dijadikan Panitera adalah Adinegoro dari Sumatera Timur.<sup>15)</sup>

Sebelumnya pada bulan April 1945 dr. F.L. Tobing diangkat menjadi Tapanuli *Fuku Cokan* (sama dengan kedudukan Wakil Residen). Sehingga ia menjadi salah satu dari hanya dua orang Indonesia di Sumatera yang mencapai kedudukan yang tinggi itu dalam Pemerintahan di masa Jepang. Yang seorang lagi adalah dr. A.K. Gani yang menjabat *Fuku Cokan* di Palembang. Selain itu dua orang Wakil Sumatera, yaitu Mr. Teuku Muhammad Hassan dan dr. M. Amir berangkat ke Jakarta dengan pesawat terbang Jepang untuk menghadiri sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu suatu badan yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 sebagai ganti dari Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (*Dokuritsu Jumbi Cosukai*). Dari Mr. Teuku Mohammad Hassan, yang waktu kembali dari Jakarta singgah di Tarutung tanggal 28 Agustus inilah dr. F.L. Tobing menerima berita tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan mulailah dipikirkan dan dipersiapkan tentang cara yang sebaik-baiknya untuk melaksanakan Proklamasi itu.

五  
六  
七  
八  
九  
十  
十一  
十二  
十三  
十四  
十五  
十六  
十七  
十八  
十九  
二十  
二十一  
二十二  
二十三  
二十四  
二十五  
二十六  
二十七  
二十八  
二十九  
三十  
三十一  
三十二  
三十三  
三十四  
三十五  
三十六  
三十七  
三十八  
三十九  
四十  
四十一  
四十二  
四十三  
四十四  
四十五  
四十六  
四十七  
四十八  
四十九  
五十  
五十一  
五十二  
五十三  
五十四  
五十五  
五十六  
五十七  
五十八  
五十九  
六十  
六十一  
六十二  
六十三  
六十四  
六十五  
六十六  
六十七  
六十八  
六十九  
七十  
七十一  
七十二  
七十三  
七十四  
七十五  
七十六  
七十七  
七十八  
七十九  
八十  
八十一  
八十二  
八十三  
八十四  
八十五  
八十六  
八十七  
八十八  
八十九  
九十  
九十一  
九十二  
九十三  
九十四  
九十五  
九十六  
九十七  
九十八  
九十九  
一百

### III. PROKLAMASI BERKUMANDANG DI TAPANULI

Waktu Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 rakyat di wilayah-wilayah yang dikuasai Jepang pada umumnya tidak ada yang mengetahuinya. Demikian juga dengan penduduk di Tapanuli boleh dikatakan tak ada seorang pun yang mendengar berita tersebut. Hanya di kalangan orang Jepang rupanya berita itu mereka dengar sebab keputusan penyerahan tak bersyarat Pemerintah Jepang kepada Sekutu itu disiarkan melalui radio. Di Indonesia semua pesawat radio milik orang Indonesia telah disita oleh Jepang atau gelombangnya dibatasi sehingga hanya dapat menangkap gelombang siaran tertentu saja, siaran Pemerintah.

Akan tetapi bagi yang tekun mengamati akan tampak perubahan sikap pada orang-orang Jepang. Wajah mereka diliputi oleh suasana kebingungan dan keresahan, juga nampak kekesalan, kemarahan dan putus asa. Mereka tampaknya tidak terlalu garang lagi. Kemudian orang-orang Indonesia yang bekerja pada kantor-kantor dinas pemerintahan serta yang menjadi anggota *Heiho* dan lain-lain badan kemiliteran diberitahu untuk tidak usah masuk kantor lagi. Yang menjadi anggota badan-badan kemiliteran dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Mereka diberi pesangon baik berupa uang, bahan makanan atau pun pakaian yang didapat dari gudang-gudang penyimpanan. <sup>1)</sup>

Demikian pula dengan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta oleh Sukarno-Hatta, beritanya tidak segera terdengar oleh rakyat di Tapanuli. Memang terdengar desas-desus dan bisikan-bisikan bahwa Jepang sudah kalah perang dan bertekuk lutut kepada Sekutu. Kepastian beritanya baru diperoleh pada tanggal 22 Agustus 1945 ketika Penguasa Perang Jepang di Sumatera mengumumkan bahwa Perang Asia Timur Raya sudah berakhir dengan semua organisas-organisasi pertahanan rakyat yang dibentuk oleh Jepang dibubarkan.

Rakyat menjadi bingung dan tidak tahu apa yang hendak dilakukan. Tidak ada persiapan untuk menghadapi kemerdekaan itu walaupun harapan untuk datangnya hari bersejarah itu tidak pernah pudar. Agaknya memang suatu hal yang biasa bila kita mengharapkan sesuatu hal yang kecil kemungkinannya akan tercapai dan ternyata harapan itu menjadi kenyataan, maka kita tidak segera dapat bertindak waktu menghadapinya.

Pada waktu itu Tapanuli mempunyai tiga pusat kegiatan politik yaitu Sibolga, Tarutung dan Padang Sidempuan; dua yang pertama terkemuka sebab pernah menjadi pusat pemerintahan baik pada masa Hindia Belanda maupun pada jaman Jepang. Ketiga tempat tersebut menerima berita proklamasi kemerdekaan pada waktu yang tidak bersamaan.

Sibolga merupakan kota yang pertama mendengar berita gembira itu. Pada tanggal 26 Agustus 1945 seorang anggota Badan Keamanan Rakyat (BKR) dari Jakarta yang bernama Hadely Hasibuan tiba di pelabuhan Sibolga dengan menumpang sebuah kapal kecil. Ia datang dengan membawa teks Proklamasi Kemerdekaan, Susunan Kabinet Republik Indonesia yang pertama dan peraturan-peraturan tentang pembentukan BKR.

Segera setelah berita itu didengar maka beberapa tokoh di Sibolga antara lain Sjariful Alamsjah bekas anggota Gerindo membentuk sebuah Panitia Partai Nasional Indonesia dengan tujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan Proklamasi itu. Teks Proklamasi yang dibawa oleh Hadely Hasibuan diperbanyak dan dijadikan pamflet. Juga sebuah surat-surat selebaran yang lain terutama berisi seruan untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah. Pada tanggal 28 Agustus 1945 dengan bantuan para pemuda yang berhasil dikumpulkan surat-surat selebaran termasuk yang berisi teks proklamasi disebarluaskan dan ditempelkan di seluruh kota Sibolga. Pada waktu itu pula dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Semua aktivitas ini dijalankan dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi karena khawatir Jepang akan menghalangi walaupun mereka sudah kalah perang dari Sekutu.

Sudah tentu penduduk Sibolga banyak yang terkejut ketika membaca surat-surat selebaran itu. Mereka bertanya-tanya dengan agak kurang percaya apakah benar Indonesia sudah merdeka. Tetapi mengapa orang-orang Jepang itu masih memegang senjata walaupun mereka sudah menyerah kepada Sekutu? Apakah mereka masih berkuasa? Tampaknya tak ada perubahan apa pun dalam lapangan pemerintahan. Sehingga suasana Sibolga diliputi oleh keraguan dan seribu satu pertanyaan. Sementara itu Panitia PNI terus bekerja membuat rencana-rencana untuk melaksanakan Proklamasi itu. Pada tanggal 7 September 1945 setelah kurang lebih 10 hari bekerja diambil keputusan bahwa esok hari akan secara resmi diumumkan tentang Kemerdekaan Indonesia setelah bersembahyang Idulfitri. Kebetulan hari Raya Idulfitri jatuh pada tanggal 8 September 1945.

Tanggal 8 September pagi berbondong-bondong umat Islam di Sibolga menuju ke Mesjid Raya atau ke tanah lapang kotapraja untuk bersembahyang Ied bersama-sama. Laki-laki, perempuan dan anak-anak dengan pakaian yang bersih dan terbaik yang mereka punyai berkumpul di kedua tempat itu.

Setelah selesai sembahyang Syariful Alamsyah di muka Jemaat di lapangan kotapraja mengumumkan bahwa Sukarno-Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus yang lalu, bahwa kini Indonesia sudah merdeka dan semuanya dianjurkan mengibarkan Sang Saka Merah Putih.

Rakyat menyambut pengumuman itu dengan bersuka cita karena jelaslah sekarang apa yang telah terjadi. Tanah Airnya telah merdeka, telah bebas dari belenggu penjajahan. Tapi keraguan pun timbul kembali, mengapa orang-orang Jepang itu masih berkuasa? Apa benar bangsa Indonesia telah merdeka? Keraguan mereka semakin besar ketika keesokan harinya Penguasa Jepang mengumumkan bahwa semuanya dilarang mengibarkan bendera Merah Putih dan merayakan Kemerdekaan. Barangsiapa yang melanggar akan ditangkap. Bahkan malam itu juga Syariful Alamsyah dicari akan ditangkap. Untunglah ia sempat menyingkir dan bersembunyi sehingga terhindar dari penangkapan. Dengan demikian

pelaksanaan pengumuman tentang Proklamasi Kemerdekaan di Sibolga terlambat.

Lain lagi di Tarutung yang pada waktu itu menjadi pusat Pemerintahan Keresidenan Tapanuli. Berita tentang Proklamasi diterima lebih lambat lagi. Dr. F.L. Tobing, *Fuku Cokan* Tapanuli pada tanggal 28 Agustus 1945 sore hari kedatangan tamu yaitu Mr. Teuku Mohammad Hassan dan dr. M. Amir dua orang wakil Sumatera dalam PPKI di Jakarta. Mereka singgah di Tarutung dalam perjalanan kembali ke Medan melalui darat. Mr. Teuku M. Hassan memberitahukan kepada dr. F.L. Tobing bahwa Indonesia telah merdeka dan ia membawa perintah dari pusat agar menyiarkan dan mengumumkan berita tentang Proklamasi Kemerdekaan dan juga agar segera dibentuk Pemerintahan Republik Indonesia di Tapanuli. Kedua orang tamu itu menceritakan bahwa mereka baru pulang dari Jakarta pada tanggal 24 Agustus yang lalu dengan pesawat terbang Jepang yang mendarat di Palembang. Kemudian mereka meneruskan perjalanan melalui darat dan singgah di Bukit Tinggi berita Proklamasi dan instruksi dari Jakarta sudah mereka teruskan untuk dilaksanakan.

Kedatangan kedua orang tamu tokoh Sumatera Timur itu sangat menggembirakan dr. F.L. Tobing; lebih-lebih berita yang didengarnya. Betapa semua orang memang telah menantikan dengan harap-harap cemas berita semacam itu. Indonesia Merdeka kini menjadi kenyataan. Tapi harus dipikirkan, bagaimana caranya melaksanakan pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia? Lebih-lebih Jakarta menginstruksikan agar pemindahan kekuasaan ke tangan orang Indonesia dilaksanakan dengan "Seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya". Pemindahan kekuasaan itu bisa berlangsung dengan cepat bila kita merebutnya dari Jepang. Tapi ini bisa berbahaya karena Jepang masih bersenjata lengkap dan tampaknya masih berkuasa, oleh sebab itu perlu dicari cara yang sebaik-baiknya. Hal-hal inilah yang dibicarakan oleh dr. F.L. Tobing keesokan harinya dengan beberapa tokoh di Tarutung. <sup>2)</sup>

Sebagai seorang dokter ia sudah terbiasa menghadapi masalah-masalah gawat dari para pasien yang dirawatnya. Walau bagaimanapun kritisnya keadaan si sakit, seorang dokter tidak boleh bertindak gegabah sebab nyawa manusia yang ditanggungnya. Bila ia bertindak tanpa diagnose yang seksama, kemungkinan besar akibatnya bisa fatal. Lebih-lebih seorang ahli bedah dituntut untuk lebih berhati-hati dan penuh perhitungan, sebelum menjalankan tugasnya mengoperasi pasiennya.

Demikianlah yang dilakukan oleh dr. F.L. Tobing ketika mendapat berita bahwa kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan. Emosi kegembiraan boleh meluap-luap, tapi kepala harus tetap dingin. Segala tindakan yang akan diambil dan segala kemungkinan yang akan terjadi harus diperhitungkan sebab nasib bangsa Indonesia yang dipertaruhkan. Ketika pertengahan September Syariful Alamsyah tiba di Tarutung dari Sibolga ia pun segera menemui dr. F.L. Tobing untuk membicarakan situasi terakhir di Indonesia. Pada waktu itu pemuka-pemuka masyarakat di Tarutung seperti Sutan Naga, Mr. Rufinus L. Tobing dan dr. F.L. Tobing belum mengambil sikap yang tegas. Padahal Proklamasi kemerdekaan itu sudah diumumkan di Sibolga pada tanggal 8 September seperti telah dibicarakan di atas.

Karena sifat dr. F.L. Tobing yang berhati-hati dan penuh perhitungan, ia sering dituduh sebagai orang yang kurang radikal dan kurang berani bertindak tegas. Sebagai seorang dokter dia memang tidak akan lekas-lekas atau tergesa-gesa mengambil sesuatu tindakan karena semboyannya adalah menghidupkan terus dan menyetatkan mereka yang sakit. <sup>3)</sup>

Sebenarnya semua pihak di Tarutung sepakat bahwa kekuasaan Jepang yang berpusat di Tarutung harus diambil-alih. Akan tetapi timbul masalah tentang bagaimana caranya. Dr. Luhut Lumban Tobing yang merupakan salah seorang pemimpin pemuda pada jaman Jepang mencoba menghubungi pimpinan-pimpinan pemuda yang pernah dikenalnya untuk berkumpul dan membicarakan tentang bagaimana kelanjutan sikap terhadap Proklamasi Kemerdekaan itu. Pertemuan ini antara lain dihadiri oleh para

pemuda dari Humbang, Toba, Samosir, Dairi dan Tarutung sendiri. Selain para pemuda juga hadir beberapa tokoh masyarakat Tapanuli yaitu Mr. Rufinus Lumban Tobing, Mr. Humala Silitonga, dan Raja Saul Lumban Tobing. Disepakati oleh yang hadir pada waktu itu bahwa segala rencana patut dibicarakan terlebih dahulu dengan dr. F.L. Tobing sebagai pemimpin rakyat Tapanuli.<sup>4)</sup>

Maka dikirimlah sebuah utusan yang dipimpin oleh dr. Luhut L. Tobing sendiri. Ternyata dr. F.L. Tobing memang sedang memikirkan bagaimana cara pengambilalihan kekuasaan pemerintahan dari tangan Jepang dan bila saatnya yang tepat. Setelah perundingan disepakati bahwa bagaimanapun mereka harus menemui pimpinan tentara Jepang. Namun dr. F.L. Tobing memperingatkan bahwa kita harus berhati-hati sebab Jepang masih bersenjata lengkap, sebab orang Indonesia hanya bermodalkan semangat yang berkobar-kobar. Walaupun jiwa patriot membakar dada, namun tindakan harus tetap tenang. Inilah pesan dr. F.L. Tobing terhadap para pemuda yang dianggap seperti anak-anaknya sendiri itu.

Pada waktu itu sebenarnya dr. F.L. Tobing masih memegang jabatan *Fuku Co-kan* sebab secara resmi pemerintahan Republik Indonesia belum dibentuk. Pimpinan tentara Jepang di Tarutung rupanya tidak berusaha untuk menahan emosi rakyat Indonesia dan ia menyatakan bahwa ia setuju untuk memindahkan kekuasaan pemerintahan di keresidenan Tapanuli dari tangan Jepang kepada orang Indonesia. Namun penguasa Jepang itu mengancam bahwa bila terjadi kekerasan dalam pengambil-alihan kekuasaan itu, maka tentara Jepang pun masih siap untuk menghadapinya.<sup>5)</sup>

Betapa gembiranya hati rakyat Tarutung, terutama para pemudanya demi mengetahui sikap penguasa Jepang itu. Berkat kebijaksanaan dr. F.L. Tobing pemindahan kekuasaan itu dapat berlangsung dengan tertib tanpa terjadi pertumpahan darah. Maka dengan sebuah truck yang didapat dari Jepang para pemuda berkeliling kota Tarutung untuk memberitahukan berita gembira bahwa Indonesia telah merdeka. Pamflet-pamflet dibuat dan disebarikan ke pelosok kampung. Mereka juga membuat bendera

Merah Putih kecil-kecil dari kertas yang dibagi-bagikan kepada rakyat dan diserukan agar penduduk mengibarkan bendera Merah Putih. <sup>6)</sup>

Dalam pada itu di Tarutung telah dibentuk suatu badan yang dinamakan Badan Keselamatan Rakyat (BKR) dipimpin oleh dr. F.L. Tobing dan Sutan Naga dengan dibantu oleh Abdul Hakim, Mr. Rufinus L.Tobing, Mr. H. Silitonga dan dr. Luhut L.Tobing. Tugas badan ini pada mulanya adalah membantu keadaan sosial rakyat misalnya dengan menjual barang-barang bekas peninggalan Jepang kepada rakyat dengan harga murah. Ke dalam BKR ini telah dilebur *Gyu Hoko Kai* Tapanuli yang tadinya dipimpin oleh dr. F.L. Tobing.

Sementara itu semangat para pemuda pun tetap berkobar-kobar. Mereka bertekad apa pun yang dihadapi kemerdekaan Indonesia akan tetap dipertahankan. Maka dr. Luhut L.Tobing ditunjuk untuk membentuk suatu barisan pemuda yang terdiri dari empat pasukan. Segala perlengkapan dan perbekalan harus diusahakan sendiri. Karena sukarnya mendapat perbekalan di Tarutung, maka para pemuda yang berasal dari daerah-daerah di luar Tarutung, seperti daerah Toba, Humbang dan Dairi kembali ke daerah masing-masing dan di situ mereka mengorganisasi diri. Pasukan-pasukan pemuda ini kemudian menjadi inti dari Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Tapanuli dan pimpinan tertinggi tetap dipegang oleh dr. Luhut L.Tobing. <sup>8)</sup>

Keadaan Tapanuli Selatan dengan pusatnya di Padang Sidempuan agak berbeda lagi. Penduduk sudah mendengar desas-desus tentang kemerdekaan Indonesia, baik dari Tarutung maupun dari Bukit Tinggi dan mereka mulai gelisah. Apakah yang sesungguhnya telah terjadi? Benarkan Tanah Air Indonesia sudah merdeka yang berarti bebas dari penjajahan? Kalau benar demikian, apakah yang harus dilakukan? Demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang meliputi pikiran rakyat Tapanuli Selatan.

Pada tanggal 24 Agustus 1945 Penguasa Jepang memanggil para pemuda Mandailing untuk berkumpul di Kotanopan. Dalam rapat umum ini diumumkan bahwa perang telah selesai. Tetapi

tidak ada pemberitaan lainnya lagi, apalagi berita tentang proklamasi kemerdekaan. Jadi desas-desus belum mendapat penjelasan. Tetapi beberapa hari kemudian kepastian berita-berita yang didesas-desuskan itu tiba dengan kembalinya bekas anggota *Heiho* warga Tapanuli Selatan. Mereka mengemukakan bahwa Indonesia telah merdeka. Namun untuk memastikan kebenaran berita yang menggembirakan ini, Raja Junjungan Lubis seorang pemuka masyarakat Mandailing yang disegani berinisiatif membentuk suatu badan untuk meneliti kebenaran desa-desus itu dan membuat rencana tindakan apa yang akan diambil. Maka Hamzah Lubis diutus untuk menemui M. Syafei atau Adinegoro di Bukit Tinggi untuk mencari keterangan yang lengkap mengenai berita proklamasi itu. Dalam pada itu Ayub Sulaeman menerima kawat dari dr. A.K. Gani dari Palembang tentang proklamasi kemerdekaan juga. Hamzah Lubis kembali dari Bukit Tinggi pada tanggal 12 September 1945 dengan membawa salinan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, peraturan tentang Komite Nasional Indonesia dan teks Proklamasi Kemerdekaan yang telah dicetak di Bukit Tinggi untuk disebar-luaskan.<sup>9</sup>) Dengan demikian tak diragukan lagi bahwa kemerdekaan Indonesia sudah benar-benar terwujud.

Raja Junjungan Lubis sebagai Ketua BAPEN (Badan Pertahanan Negeri) mengundang tokoh-tokoh anggota BAPEN dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya untuk hadir di rumah Hamzah Lubis untuk membahas tindak lanjut dari realisasi Kemerdekaan itu. Mereka membahas tentang teks Proklamasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia serta peraturan pembentukan Komite Nasional Indonesia yang dibawa oleh Hamzah Lubis dari Bukit Tinggi.

Mula-mula diputuskan bahwa teks Proklamasi itu harus diperbanyak untuk disebarakan ke seluruh tempat. Untuk melaksanakan tugas penyebaran ini para pemuda anggota BAPEN dikerahkan; ada yang bersepeda dan banyak yang berjalan kaki sebab keadaan kenderaan pada masa itu sangat kurang sekali. Kemudian putusan kedua diambil untuk mengadakan rapat umum untuk menyampaikan berita Proklamasi itu langsung kepada rakyat. *Kempei Tai*

berusaha mencegah rapat umum itu, tapi tak berhasil. Maka pada tanggal 3 Oktober 1945 berlangsung rapat umum yang dihadiri oleh segenap rakyat Mandailing yang juga datang dari pelosok-pelosok desa. Mereka ingin sekali menyaksikan peristiwa yang sangat penting itu. BAPEN kemudian diubah menjadi Pemuda Republik Indonesia.

Keputusan yang ketiga adalah tentang bagaimana melaksanakan pembentukan KNI sebagai realisasi pembentukan pemerintahan Republik Indonesia. KNI ini harus segera dibentuk untuk melancarkan jalannya pemerintahan. Setelah berunding beberapa saat lamanya mereka sepakat bahwa sebaiknya pembentukan KNI itu dilaksanakan di pusat, yaitu di Tarutung. Lebih-lebih karena para pemimpin Tapanuli sendiri seperti dr. F.L. Tobing, Abdul Hakim dan Sutan Naga berada di Tarutung. Putusan diambil bahwa Raja Junjungan akan menemui para pemimpin Tapanuli di Tarutung dengan dibekali mandat penuh sebagai wakil Rakyat Tapanuli Selatan.

Isi mandat rakyat Mandailing atau Tapanuli Selatan itu adalah sebagai berikut : <sup>10)</sup>

”Kami Rakyat Mandailing (Tapanuli) yang berjumlah 100.000 orang memberi kuasa penuh kepada Raja Junjungan untuk bermusyawarat dengan Yang mulia dokter Ferdinand Lumban Tobing, Badan Keselamatan Rakyat dan orang-orang yang terkemuka di Padang Sidempuan dan Tarutung dengan tujuan :

1. Supaya di Mandailing khususnya dan di Tapanuli umumnya diresmikan Proklamasi Ir. Sukarno Presiden Republik Indonesia yang memaklumkan ke seluruh dunia kemerdekaan Indonesia.
2. Supaya di Mandailing khususnya dan di Tapanuli umumnya dibangunkan Komite Nasional Indonesia sebagai yang diperintahkan oleh Ir. Sukarno, Presiden Republik Indonesia bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Indonesia musti didirikan Komite Nasional Indonesia untuk membantu Presiden.

Segala soal yang berhubungan dengan kedua tujuan di atas berhaklah utusan kami Raja Junjungan memutuskan dan memperbincangkannya”.

Pada tanggal 12 September 1945 itu juga Raja Junjungan, Kari Usman dan Fachruddin Nasution berangkat dari Padang Sidempuan ke Tarutung. Sesampainya di Tarutung rombongan Raja Junjungan menghubungi para pemimpin yang ada di Tarutung dan BKR dan dimulailah perundingan tentang bagaimana pelaksanaan instruksi pusat sebaik-baiknya. Akhirnya Raja Junjungan dan Pengurus BKR mencapai kesepakatan bahwa Abdul Hakim ditetapkan dan diangkat menjadi formatur pembentukan Komite Nasional Indonesia di Tapanuli. Satu hal yang masih meragukan, terutama bagi dr. F.L. Tobing yang selalu *correct* sikapnya dan hati-hati dalam tindakannya, yaitu sampai akhir September, instruksi resmi dari pusat belum datang juga. Sehingga belum ada kepastian bagaimana pelaksanaan pembentukan pemerintah Republik Indonesia di Tapanuli itu.

Namun akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1945 datang telegram dari Gubernur Sumatera; Mr. Teuku Moh. Hassan yang berisi pengangkatan dr. F.L. Tobing sebagai Residen Tapanuli. Dengan diterimanya telegram ini maka dr. F.L. Tobing mulai melaksanakan instruksi resmi Pemerintah Pusat Republik Indonesia dengan memaklumkan berdirinya Kantor Keresidenan Tapanuli di Tarutung. Selain dari itu, diinstruksikan kepada rakyat untuk mengibarkan bendera Merah Putih yang disambut dengan gembira oleh rakyat. Bersamaan dengan ini tugas dr. F.L. Tobing pun semakin berat yaitu untuk melengkapi aparatur pemerintahan dan menjalankan pemerintahan dari sebuah negara yang merdeka.

Mula-mula diadakan penyerahan kepangkatan pejabat-pejabat pemerintah seperti yang digariskan dari Jakarta. Misalnya *Kepala Urung* setingkat Wedana dan *Kepala Urung Kecil* setingkat Camat.<sup>11)</sup> Suatu hal yang menguntungkan keresidenan Tapanuli ialah bahwa raja-raja di Tapanuli seperti *Kepala Luhak*, *Kepala Negeri* dan *Kepala Kuria* mengundurkan diri dari kedudukannya secara sukarela dan mengeluarkan pernyataan patuh pada Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian hapuslah cara dan susunan pemerintahan tradisional yang feodalistis di Tapanuli dan diganti dengan pemerintahan berdasarkan pilihan rakyat.

Sehingga perubahan-perubahan yang terjadi tidak menimbulkan pertumpahan darah seperti yang terjadi di Sumatera Timur dan Aceh.

Sumatera Timur mempunyai struktur pemerintahan yang pada dasarnya merupakan pemerintahan sendiri atau Swapraja (*zelfbestuur* pada masa Belanda). Dalam struktur pemerintahan semacam ini daerah-daerah diperintah oleh Sultan, Raja, *Sibayah* dan lain-lain yang oleh Pemerintah Hindia Belanda diberi hak istimewa. Mereka itu pada mulanya adalah penguasa-penguasa setempat yang merdeka dan berdaulat di daerah kekuasaannya masing-masing dan ketika Belanda meluaskan kekuasaannya di Pulau Sumatera mereka terpaksa mengakui kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda sebagai wakil kekuasaan Mahkota Belanda dengan jalan menanda-tangani perjanjian.

Pada jaman Jepang sistem pemerintahan semacam ini dilanjutkan hanya nama-nama pejabat pemerintah pusatnya saja yang namanya diubah memakai istilah Jepang. Ketika Jepang kalah perang, banyak para penguasa daerah itu yang mengharapkan kembalinya kekuasaan Belanda agar kekuasaan dan hak-hak istimewa mereka tetap terjamin. Mereka pada umumnya tidak senang pada Negara Republik Indonesia yang kemudian terbentuk. Bahkan Sultan Deli secara terang-terangan tidak mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia. Walaupun demikian ada juga yang dapat memahami perubahan jaman dan mengakui kekuasaan Republik Indonesia.

Untuk mengatasi keadaan semacam ini Gubernur Sumatera dr. T.M. Hassan menjalankan politik damai dengan mengangkat tokoh-tokoh feodal sebagai pejabat-pejabat pemerintah untuk membantunya. Namun reaksi dari kalangan Swapraja itu tidak memuaskan. Mereka tetap berusaha mempertahankan kekuasaannya dan tidak berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan. Dalam situasi semacam ini wajarlah bila di kalangan pimpinan pemuda dan rakyat di Sumatera Timur mulai timbul pikiran-pikiran untuk menghapuskan seluruh pemerintahan swapraja yang merupakan musuh yang membahayakan negara

Republik Indonesia. Semangat kemerdekaan semakin bergelora dan beberapa bulan kemudian meledaklah revolusi sosial di Sumatera Timur.

Seperti telah disebutkan di muka keadaan di Tapanuli agak berbeda. Para penguasa setempat dengan sukarela menyerahkan kekuasaannya kepada Republik Indonesia dan pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin timbul dalam soal-soal hak kedudukan dalam adat, dinyatakan bahwa kepala-kepala kampung yang terpilih tidak dengan sendirinya menjadi kepala adat. <sup>12)</sup>

Demikianlah dengan ketekunan dan kesabaran dokter F.L. Tobing beserta para pembantunya melanjutkan pembangunan pemerintahan Republik Indonesia di Tapanuli yang untuk pertama kali dirayakan upacara kemerdekaannya di Tarutung, ibukota keresidenan Tapanuli pada tanggal 17 Oktober 1945 tepat dua bulan setelah Sukarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia mengumandangkannya di Jakarta.

Upacara perayaan Proklamasi yang pertama kali di Tapanuli ini berlangsung sangat meriah. Tanah lapang di Tarutung yang sangat luas penuh sesak dihadiri oleh ribuan orang yang datang tidak saja dari kota Tarutung, tapi juga dari segenap pelosok tempat. Karena langkanya kendaraan, banyak yang hanya berjalan kaki atau bersepeda.

Upacara diawali dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian dibacakan Proklamasi Kemerdekaan yang disusul dengan beberapa sambutan yang bersemangat. Upacara yang khidmat, mengharukan tapi juga meriah diakhiri dengan ikrar bersama sebagai berikut:

"Demi Allah, Kami rakyat Tapanuli bersumpah akan memenuhi kewajiban kami sebagai rakyat dari negara Republik Indonesia, Setia kepada Presiden, bersedia mengorbankan harta, tenaga, fikiran dan jiwa raga untuk keselamatan Negara Republik Indonesia".

Banyak para hadirin yang menitikkan airmata. <sup>13)</sup>

Pada tanggal 3 Oktober 1945 di tiap-tiap Kewedanan dibentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) setempat yang bertugas sebagai badan legislatif atau semacam DPRD pada masa sekarang. Anggota KNI ini terdiri dari bekas para anggota *Syu Sangi Kai* Tapanuli ditambah dengan pemimpin-pemimpin rakyat Tapanuli lainnya. Pada tanggal 30 Oktober 1945 KNI Tapanuli mengadakan rapat lengkap yang pertama di mana diambil patokan-patokan untuk mengendalikan dan memperkokoh Pemerintahan di Tapanuli. Badan ini menyelesaikan dan melanjutkan tindakan-tindakan pengambilalihan kekuasaan yang telah dimulai oleh para pemuda. Dengan cara berdiplomasi dan didukung oleh semangat para pemuda maka berangsur-angsur segala harta benda dan perbekalan yang ada di tangan Jepang beralih ke tangan Pemerintah R.I. Bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyerobotan barang-barang milik orang Jepang yang menimbulkan kemarahan orang Jepang, maka KNI berusaha untuk menjernihkan kekeruhan dan mendamaikan keadaan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan yang baru ini dr. F.L. Tobing menanggung beban yang besar sesuai dengan situasi dan kondisi pada masa revolusi fisik. Masing-masing wilayah menjalankan pemerintahannya menurut inisiatif sendiri, artinya mempunyai otonomi yang seluas-luasnya sehingga seolah-olah suatu republik sendiri. Hal ini memang penting karena tidak bisa mengharapkan bantuan apa pun dari pusat. Daerah-daerah juga harus mampu memenuhi keperluannya masing-masing, harus berdikari. Pemerintah pusat tidak dapat menyediakan biaya. Padahal sangat sedikit yang ditinggalkan oleh orang Jepang. Sehingga segala jalan ditempuh untuk mendapat uang asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Pada bulan Oktober 1945 dibentuk Fonds Kebangsaan yang bertugas untuk menghimpun dana untuk perjuangan. Badan ini kemudian diubah namanya menjadi Fonds Kemerdekaan.<sup>14)</sup>

Dalam keadaan sukar manusia menjadi lebih kreatif. Seperti dikatakan pepatah bahwa tak ada rotan maka akar pun berguna. Rakyat Tapanuli terpaksa berusaha mencari barang-barang kebu-

tuhan sehari-hari. Misalnya mereka harus membuat sabun sendiri sebab jumlah yang dijual sangat tidak memadai dan harganya pun mahal. Caranya dengan memasak abu dapur yang dicampur air secukupnya. Kita harus ingat bahwa pada waktu itu tidak ada orang memasak dengan kompor minyak tanah. Umumnya orang memasak memakai kayu atau arang. Jadi setiap hari akan tersedia jumlah abu yang cukup banyak. Air abu itu lama kelamaan akan berlendir, kemudian disaring. Air saringan ini bila didiamkan lama kelamaan akan menjadi keras dan bisa dipakai sebagai sabun.

Keamanan dan ketertiban merupakan tugas yang tidak ringan bagi dr. F.L. Tobing sebagai Residen beserta para pembantunya yang menjalankan roda pemerintahan R.I. di Tapanuli. Di samping menjaga keamanan hidup rakyat, maka tugas yang utama adalah mempertahankan negara.

Bahaya mulai mengancam karena dengan kemenangan Sekutu atas Jepang, Belanda mempunyai peluang yang besar untuk kembali menjajah Indonesia. Bangsa Indonesia yang sudah merasakan menderitanya hidup sebagai bangsa terjajah harus siap siaga mencegah kembalinya si penjajah. Karena bantuan dari pusat tak dapat diharapkan, maka Tapanuli pun harus mempersiapkan pasukan pertahanan dan keamanan sendiri yang juga dilakukan oleh daerah-daerah lain. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan tugas dijalankan oleh BKR dan Polisi Republik Indonesia. <sup>15)</sup>

Kemudian sejalan dengan perkembangan di pusat, pada tanggal 20 November 1945 di bawah pimpinan dr. F.L. Tobing di Tarutung diadakan pertemuan antara anggota BKR, bekas perwira *Gyu Gun* dan *Heiho*. Dalam pertemuan ini dibicarakan perlunya mengatur badan-badan keamanan dan pertahanan yang ada agar lebih efektif. Akhirnya semua yang hadir memutuskan akan melebur BKR dan badan-badan lain ke dalam satu wadah: Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan Koordinator dr. F.L. Tobing. Keputusan ini sudah tentu disambut dengan gembira oleh para pemuda Tapanuli pada umumnya dan para anggota BKR pada khususnya.

Pada hari itu ditentukan pembentukan pengurus TKR di tempat-tempat yaitu di Tarutung dengan ketuanya Raja Barita Sinambela, di Sibolga ketuanya Buttuaning Hutagalung, di Padang Sidempuan ketuanya Liano Siregar dan di Gunung Sitoli yang terpilih sebagai Ketua adalah Hassanuddin Waruwu. Status masing-masing kesatuan di keempat tempat tersebut otonom dan hanya tunduk kepada Koordinator. Pada masa awal pembentukan TKR ini pasukan-pasukan yang ada itu belum teratur dalam arti pakaiannya tidak seragam, persenjataan tidak lengkap dan peralatan lain pun tidak memadai. Namun semangat membela nusa dan bangsa tetap berkobar-kobar. Pada awal Januari 1946 BKR Laut meleburkan diri ke dalam TKR dan namanya berubah menjadi TKR bagian Laut.

TKR Tapanuli berada di bawah komando yang dinamakan Komandemen Tentara Keamanan Rakyat Sumatera yang berpusat di Lahat (Sumatera Selatan). Panglima Komandemen (Suhardjo Hardjowardojo) ditetapkan oleh dr. A.K. Gani, Wakil Menteri Pertahanan di Sumatera. Komandemen TKR Sumatera ini terdiri dari enam divisi dan TKR Tapanuli merupakan Divisi VI. Komandan Divisinya adalah Kol. Mohammad Din dan pada bulan April 1946 Pandapotan Sitompul bekas perwira *Gyu Gun* Tapanuli menjadi Kepala Markas umum dan berpusat di Sibolga. Kemudian sepasukan Pemuda Republik Indonesia di bawah pimpinan Maraden Panggabean juga menggabungkan diri ke dalam TKR Divisi VI Sumatera. Pada tanggal 24 Januari 1946 TKR berubah namanya menjadi Tentara Republik Indonesia Tapanuli (TRI) dan markas divisi berkedudukan di Sibolga.

Sehingga dengan demikian pada awal Revolusi pasukan pertahanan dan keamanan Indonesia di Tapanuli sudah berbentuk dengan kekuatan yang lumayan. Pada waktu itu terbentuk enam pasukan yaitu :

1. Pasukan Sarumpaet, berkedudukan di Sibolga yang dipimpin oleh Oloan Sarumpaet.
2. Pasukan Panggabean, dipimpin oleh Maraden Panggabean, berkedudukan di Sibolga.

3. Pasukan Sinambela, dipimpin oleh Raja Barita Sinambela, berkedudukan di Tarutung.
4. Pasukan Siregar, dipimpin oleh Liano Siregar, berkedudukan di Padang Sidempuan.
5. Pasukan Woruwu, dipimpin oleh Hassanuddin Woruwu, berkedudukan di Gunung Sitoli.
6. TKR Laut, dipimpin oleh Oswald Siahaan, berkedudukan di Pancuran Dewa (Sibolga).

Divisi VI Sumatera ini diresmikan pada tanggal 23 Maret 1946 dan dilantik oleh Panglima Komandemen Sumatera. Pada tanggal 26 April 1946 berdasarkan keputusan Kepala Markas Besar Umum TRI Sumatera, Divisi VI diubah menjadi Divisi Banteng II yang terdiri dari tiga Resimen, masing-masing di Sibolga, Tarutung dan Padang Sidempuan. Baru pada bulan Maret 1947 Divisi Banteng II direorganisasi lagi dan menjadi Brigade XI. Dengan demikian Negara Republik Indonesia di Tapanuli di bawah pimpinan Residen dr. F.L. Tobing telah siap mempertahankan diri dari serangan musuh bila mereka datang.

Pada tanggal 16 Januari 1946 KNI Keresidenan Tapanuli mengadakan rapat lengkap yang kedua bertempat di Sipoholon dekat Tarutung. Dalam rapat yang lamanya empat hari itu telah diambil banyak keputusan yang penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Dalam rapat itu KNI mengambil mosi menyatakan kepercayaan penuh terhadap kebijaksanaan Pemerintah di masa yang lalu.

Rapat juga memutuskan memberi kuasa kepada Pengurus Harian KNI untuk membentuk Badan Legislatif dan Badan Eksekutif. Pada tanggal 25 Januari 1946 terbentuklah Badan Legislatif dengan Residen sebagai Pimpinannya dan badan ini bertugas untuk merancang peraturan-peraturan. Badan Legislatif ini mulai bersidang pada tanggal 28 Januari 1946. Dalam waktu kira-kira satu setengah bulan cukup banyaklah peraturan yang dibuat antara lain :

1. Peraturan tentang memilih, mengakui, memperhatikan dan memecat anggota-anggota Dewan Negeri di Karesidenan Tapanuli.
2. Undang-undang dan peraturan tentang Dewan Kota di Tapanuli.
3. Peraturan tentang memungut 10% bakti dari hasil sawah dan ladang pada tahun 1946.
4. Peraturan tentang memungut 10% bakti dari uang yang didapat di Karesidenan Tapanuli pada tahun 1946.

Badan Eksekutif yang dibentuk bersama-sama dengan Badan Legislatif beranggotakan lima orang dan diketuai oleh Residen. Karena soal-soal kemasyarakatan semakin bertambah maka dianggap perlu untuk mengangkat dua orang Asisten Residen yang diambil dari tokoh-tokoh pergerakan.

Dalam hal keuangan yang penting peranannya pada waktu itu untuk kelancaran perjuangan maka dikeluarkan peraturan-peraturan baru. Selain kedua peraturan tersebut di atas tentang sumbangan bakti, maka pada tanggal 13 Maret 1946 dikeluarkan surat obligasi negara masing-masing bernilai Rp. 10.000,- sejumlah 4 juta rupiah dengan bunga 5% dan jaminan beras. Selain itu dana-dana kemerdekaan memperluas usaha-usahanya dalam pengumpulan uang dengan jalan mengadakan beberapa kali Pasar malam di beberapa tempat di Tapanuli. Dalam hal perkebunan kepunyaan orang asing yang dewasa itu dikuasai oleh Kantor Urusan Harta Benda Bangsa Asing mendapat perhatian istimewa. Untuk mengusahakan kebun-kebun itu dan memelihara para pekerjanya yang sangat menderita pada jaman Jepang, maka dibentuk suatu badan pengurus yang dinamakan Badan Pengurus Kebun-kebun Onderneming (BPKO) di Tapanuli.

Dengan keputusan Gubernur Sumatera, agar ibu kota Karesidenan Tapanuli dikembalikan lagi ke Sibolga, maka pada tanggal 15 Mei 1946 pemindahan itu dijalankan dengan resmi. Dengan demikian sejak tanggal tersebut di atas dengan resmi Sibolga menjadi ibu kota Karesidenan Tapanuli. Sidang KNI lengkap

dari Karesidenan Tapanuli yang diadakan di Sibolga berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Juni 1946. Dalam sidang ini kemudian disepakati perubahan KNI menjadi Dewan Perwakilan Tapanuli (DPT) yang beranggotakan 55 orang. Dari jumlah ini perinciannya adalah sebagai berikut: 15 orang mewakili partai politik, 39 orang dari kabupaten-kabupaten yang ada dan dibagi menurut banyak jiwa dari setiap kabupaten, yaitu:

19 orang untuk Kabupaten Batak

3 orang untuk Kabupaten Sibolga

11 orang untuk Kabupaten Padang Sidempuan

6 orang untuk Kabupaten Nias.

Sedang orang Cina sebagai warga asing yang terbanyak di Karesidenan Tapanuli mendapat satu wakil yang ditunjuk oleh *Hwa Kiauw Cung Hwe*. Dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Tapanuli ini maka berakhirilah sejarah KNI Tapanuli yang baru berusia delapan bulan itu. Tugas-tugasnya diteruskan oleh DPT.

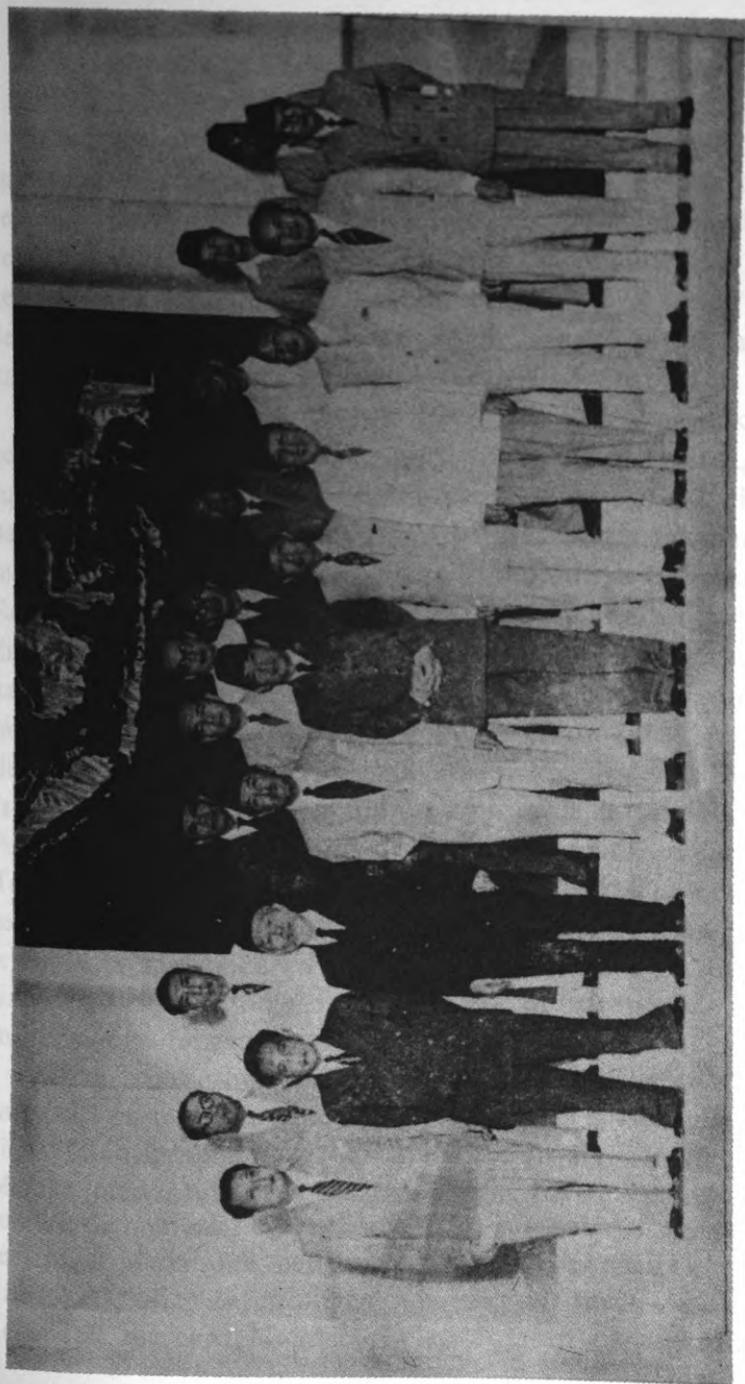
Dalam masa persiapan kedua yang berlangsung selama dua hari, tanggal 28 dan 29 Juni 1946, DPT melanjutkan usahanya memecahkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang belum selesai, di antaranya Peraturan pemilihan Kepala-kepala Kuria dan Kepala-kepala Kampung dan membentuk Dewan Agama Islam di Tapanuli.

Sementara itu daerah tetangga Tapanuli, yaitu Karesidenan Sumatera Timur, pada awal tahun 1946 mulai bergolak. Rakyat bergerak menuntut dihapuskannya pemerintahan Swapraja,<sup>16)</sup> yaitu pemerintahan di daerah-daerah istimewa yang dikuasai oleh kaum bangsawan yang turun-temurun. Banyak dari para penguasa daerah itu yang tidak senang pada Republik Indonesia bahkan ada yang mengatakan tidak mengakui Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Mereka tidak memahami akan perubahan yang terjadi dan berusaha mempertahankan kekuasaannya. Dalam situasi seperti ini maka di kalangan rakyat, khususnya di kalangan pemuda dan mereka yang berjiwa nasionalis muncullah ide-ide atau pemikiran-pemikiran untuk menghapuskan saja seluruh daerah Swapraja yang feodalistis itu. Pemerintahan Swapraja

tersebut dapat membahayakan kehidupan Negara Republik Indonesia lebih-lebih dalam usianya yang masih muda. Pemikiran-pemikiran itu semakin lama semakin berkembang dan beberapa bulan kemudian meletuslah apa yang dinamakan revolusi sosial di Sumatera Timur.

Keadaan ini sudah tentu membahayakan keadaan Tapanuli. Lebih-lebih karena di Tapanuli terdapat juga raja-raja yang menjadi kepala luhak, kepala negeri atau kepala kuria. Namun, seperti telah dikemukakan terdahulu, raja-raja itu telah dengan sukarela menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintah Republik Indonesia karena pada hakekatnya berbeda dengan di Sumatera Timur, daerah yang diperintah oleh raja-raja di Tapanuli bukanlah daerah istimewa atau pemerintah swapraja. Daerah-daerah itu merupakan bagian administrasi dari pemerintah pusat dan raja-raja itu merupakan pegawai pemerintah belaka. Walaupun demikian dr. F.L. Tobing sebagai Residen tetap harus bertindak sangat bijaksana karena dalam suasana yang kritis seperti pada masa awal Revolusi segala hal yang tak terduga dapat terjadi. Dalam hal ini sifat pribadi dan kebijaksanaannya kembali memegang peranan yang penting.





Kabinet Ali Sastroamidjojo I bergambar bersama Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta di Istana Merdeka, Jakarta, 12 Agustus 1953. Deret depan ketiga dari kiri adalah Menteri Penerangan Dr. F. Lumban Tobing. (Repro/dokumentasi Idayu/L-0769).

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

#### IV. RESIDEN YANG DOKTER BERGERILYA MENEGAKKAN REPUBLIK INDONESIA

Belum sampai satu tahun Indonesia merdeka mulailah pertentangan antara bangsa Indonesia yang berusaha mempertahankan kemerdekaannya dengan orang Belanda yang mencoba akan kembali berkuasa, dan semakin hari semakin memuncak. Belanda kembali lagi menjalankan politik kolonialisnya *divide et impera*, dengan jalan membentuk negara-negara boneka untuk melemahkan Negara Republik Indonesia.

Antata tanggal 15 – 25 Juli 1946 Belanda mengadakan Konferensi di Malino, suatu kota kecil di Sulawesi Selatan, dengan tujuan membentuk negara-negara yang dilindunginya di daerah-daerah yang baru diterimanya dari Inggris. Selain tekanan politik ini Belanda juga memperkuat tekanan militernya terhadap negara Republik Indonesia dengan terus menambah jumlahnya di Indonesia. Ancaman bahaya semakin meningkat dan ketika keadaan bahaya dimaklumkan di Jawa pada tanggal 7 Juni 1946, maka di Sibolga diadakan pertemuan antara pihak pemerintah dan militer yang bertugas menjaga keamanan rakyat. Dalam pertemuan itu disepakati dan diputuskan untuk membentuk Dewan Pertahanan Daerah Tapanuli yang diketuai oleh Residen dr. F.L. Tobing. Dewan ini dibentuk sebagai persiapan dan supaya dapat segera bekerja bila bahaya tiba. Ternyata perhitungan tidak meleset. Pada tanggal 28 Juni 1946 keadaan bahaya diumumkan untuk seluruh Indonesia dan rakyat di karesidenan Tapanuli menerimanya dengan tenang dan penuh kewaspadaan.

Sudah sejak awal tahun 1946 Pemerintah Pusat berusaha mengadakan perundingan dengan pihak Belanda untuk menghentikan tembak-menembak. Kemudian Belanda berpendapat lain. Mereka menuntut penyelesaian politik harus didahulukan baru tembak-menembak dihentikan. Inilah sebabnya mereka selalu melanggar perjanjian penghentian tembak-menembak yang telah disepakati bila perundingan tampaknya tidak sesuai dengan kehendak mereka. Memang Belanda tetap berkehendak untuk

kembali berkuasa di Indonesia. Sebaliknya orang Indonesia selalu menunjukkan kenyataan bahwa keadaan telah berubah. Indonesia telah merdeka dan sebagian besar rakyat tidak mau dijajah kembali. Pemerintah yang berkuasa dan berdaulat di Indonesia adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Pada bulan Nopember 1946 dimulai suatu perundingan di Linggajati dekat Cirebon antara pihak Indonesia yang diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir dengan pihak Belanda yang diwakili oleh Prof. Schermerhorn. Setelah beberapa waktu lamanya dihasilkan suatu naskah rencana persetujuan yang harus dirundingkan dan disetujui oleh masing-masing pemerintah. Naskah rencana persetujuan itu mendapat banyak tantangan. Baru setelah lima bulan lamanya naskah itu disetujui dan ditanda tangani pada tanggal 25 Maret 1947 oleh wakil-wakil kedua pemerintah serta disahkan.

Isi dari persetujuan Linggajati ini antara lain ialah :

1. Belanda mengakui kekuasaan *de facto* Pemerintah Republik Indonesia di Jawa, Madura dan Sumatera.
2. Disepakati bersama bahwa di Indonesia akan dibentuk sebuah Negara Serikat.
3. Antara Negara Serikat Indonesia dengan negeri Belanda akan dibentuk suatu Uni Indonesia - Belanda.

Sambutan atas persetujuan ini memang bermacam-macam, ada yang puas tapi tidak sedikit yang kecewa. Pada umumnya para pemimpin Indonesia menyambut persetujuan ini dengan baik sebagai hasil yang pertama menuju pengakuan kemerdekaan di seluruh kepulauan Indonesia. Sebagian dari rakyat berharap bahwa persetujuan ini akan membawa kedamaian yang sepenuhnya sehingga dapat dimulai membangun kehidupan yang sudah begitu parah dirusakkan oleh Jepang. Ada juga yang kecewa bahwa Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia seluruhnya. Namun walaupun demikian, Perjanjian Linggajati ini bisa memberikan kesempatan istirahat sejenak kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia. Di Sumatera dalam masa gencatan senjata ini

juga telah disepakati penentuan garis demarkasi. Belanda hanya menguasai daerah di dalam garis demarkasi yang melingkari kota Medan. Di luar garis itu RI-lah yang berkuasa. Namun walaupun demikian Belanda sering memancing keadaan dengan provokasi mereka sehingga bentrokan senjata tak dapat dihindarkan. Misalnya yang terjadi di pelabuhan Sibolga pada tanggal 9 Mei 1947. <sup>1)</sup>

Pada tanggal 9 Mei 1947 itu sebuah kapal Belanda memasuki perairan Teluk Sibolga dengan alasan akan menangkap sebuah kapal yang dituduh melakukan penyelundupan. Kapal perang Belanda yang bernama HMS *Danckaerts* bernomor JT. I berhasil menangkap kapal dagang yang dituduh menyelundup itu dan menyeretnya ke luar pelabuhan. Di atas kapal dagang yang ditahan Belanda itu terdapat beberapa anggota ALRI. Untunglah para anggota ALRI itu dapat kembali ke pantai dengan selamat.

Mengetahui adanya perbuatan kapal perang Belanda itu, maka Residen Tapanuli dr. F.L. Tobing mengirim surat kepada komandan kapal Belanda yang berisi peringatan bahwa tindakannya itu telah melanggar Perjanjian Linggajati, yaitu memasuki perairan RI yang berdaulat. Lebih lanjut dr. F.L. Tobing menekankan agar kapal itu segera meninggalkan perairan Republik. Pada malam harinya kapal perang Belanda itu mulai meninggalkan pelabuhan/perairan Sibolga.

Keesokan harinya tanpa alasan yang jelas, kapal *Danckaerts* muncul kembali di Teluk Sibolga. Komandan pasukan Indonesia di Pangkalan Sibolga menyiapkan pasukannya untuk menjaga segala kemungkinan yang akan terjadi. Kapal perang itu menurunkan sebuah sekoci yang berisi pasukan dan dikayuh menuju sebuah kapal dagang. Dr. F.L. Tobing yang mendapat laporan tentang hal itu mengirim sebuah utusan ke kapal perang Belanda di bawah pimpinan Letnan Oswald Siahaan. Ketika perahu utusan Indonesia semakin mendekat, pihak Belanda menurunkan sebuah sekoci yang penuh dengan pasukan dan mulai melepaskan tembakan-tembakan ke arah perahu utusan Indonesia. Karena tembakan-tembakan yang tidak disangka-sangka itu maka Letnan Siahaan terpaksa memerintahkan jurumudi untuk putar haluan

dan menyelamatkan diri kembali ke pantai. Karena tembakan-tembakan Belanda itu seorang anak buah Letnan Siahaan tertembak dan kemudian meninggal di rumah sakit Sibolga.

Melihat gelagat yang tidak baik ini para pemuka Tapanuli di Sibolga memerintahkan untuk mengadakan persiapan-persiapan dan memperkuat penjagaan di sepanjang pantai. Mungkin hanya mencari-cari alasan saja, Belanda melalui seorang nakhoda perahu pencalang yang ditangkapnya, mengirim surat minta agar Pemerintah RI menyerahkan dua orang awak kapal dagang itu yang katanya berada di daratan. Pihak Indonesia membalas surat Belanda itu yang menyatakan tidak tahu menahu tentang awak kapal dagang itu dan minta agar kapal perang Belanda meninggalkan perairan Sibolga sebelum jam 10.00 tanggal 12 Mei. Belanda mengabaikan permintaan pihak Indonesia dan tembakan-tembak tidak dapat dihindarkan. Meriam-meriam pantai Indonesia yang sudah dipersiapkan ternyata bekerjanya kurang efektif karena kekurangan amunisi. Sedangkan meriam-meriam kapal perang Belanda dengan mudah membalas tembakan-tembakan pihak Indonesia dan mencapai sasaran jauh ke pedalaman. Sehingga tidak sedikit kerusakan yang diderita rakyat, bahkan beberapa orang jatuh menjadi korban. Rakyat pun terpaksa mengungsi dari daerah pantai yang menjadi sasaran tembakan-tembakan Belanda. Baru pada sore harinya kapal *Danckaerts* meninggalkan perairan teluk Sibolga.

Selain mengadakan provokasi senjata, pihak Belanda juga mengadakan provokasi-provokasi politik, sehingga masa gencatan senjata tidak berlangsung lama. Pada tanggal 27 Mei 1947 Komisi Jendral Belanda menyampaikan ultimatum kepada delegasi RI yang antara lain berisi tuntutan yaitu :

1. bersama-sama membentuk pemerintah peralihan (*interim*)
2. menyelenggarakan ketertiban dan keamanan bersama, termasuk di daerah-daerah yang dikuasai Republik Indonesia.
3. Pemerintah RI mengirim beras ke daerah yang diduduki Belanda.

Belanda memberi batas waktu 14 hari kepada pemerintah RI untuk memenuhi tuntutan Belanda itu.

Awan mendung kembali meliputi Indonesia. Seluruh rakyat dan segenap anggota tentara Indonesia diperintahkan agar siap-siaga dan selalu waspada menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Jenderal Sudirman selaku Panglima Pasukan Indonesia memperingatkan bahwa Tanah Air masih menghadapi ancaman dan keselamatan negara harus dipertahankan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu Presiden Sukarno selaku Panglima Tertinggi pada tanggal 3 Juni 1947 telah mensahkan terbentuknya Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian Negara RI telah memiliki aparatur pertahanan negara yang resmi.

Pada tanggal 17 Juli 1947 Pemerintah Indonesia mengirim nota jawaban yang berisi penolakan Indonesia terhadap ultimatum Belanda itu. Keesokan harinya Van Mook yang mewakili Pemerintah Belanda menjelaskan bahwa jawaban RI itu tidak bisa diterima. Dua hari kemudian dia mendapat kuasa penuh dari pemerintahnya untuk mengadakan "aksi polisionil" dan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu. Tengah malam itu gedung-gedung milik RI di Jakarta diduduki oleh serdadu Belanda dan tanggal 21 Juli 1947 dengan serangan Belanda ke daerah Republik meletuslah Perang Kemerdekaan Pertama. <sup>2)</sup>

Kedadaan genting yang dihadapi oleh Pemerintah Pusat RI diikuti dengan kewaspadaan dan keprihatinan di seluruh Tanah Air juga di karesidenan Tapanuli. Dr. F.L. Tobing sebagai Residen dan Ketua Dewan Pertahanan Daerah Tapanuli bertindak cepat. Walaupun Belanda belum memasuki Tapanuli, tapi dr. F.L. Tobing sudah mengadakan persiapan untuk menghadapinya. <sup>3)</sup> Karesidenan Tapanuli yang semula terdiri dari empat kabupaten dibagi lagi menjadi sembilan kabupaten dan masing-masing harus mengerahkan tenaga untuk pertahanan. Maksud pembagian dalam unit-unit yang lebih kecil itu akan mudah mengkonsolidasi diri dan bertahan serta memenuhi keperluan sendiri. Selain itu di tiap-tiap kampung atau desa dianjurkan dibentuk lumbung untuk

keperluan para gerilyawan. Sehingga bila pasukan gerilya Indonesia harus mundur, kampung-kampung atau desa-desa itu sudah siap menerimanya. Semua usaha ini berjalan dengan baik berkat kesetiaan kepala-kepala Negeri dan kegiatan para pemudanya.<sup>4)</sup>

Pusat pemerintahan karesidenan Tapanuli kemudian dipindahkan dari Sibolga ke Aek Sitahuis — yang juga disebut Sibolga II untuk mengecoh musuh — sebuah desa di Bukit Barisan, jauh di pedalaman agar dapat menyusun kekuatan untuk bergerilya. Jalan-jalan dan tempat-tempat yang mempunyai arti penting dari segi pertahanan diberi rintangan-rintangan untuk menghambat kedatangan musuh. Dari Sibolga II inilah pemerintahan di karesidenan Tapanuli dijalankan.

Pada waktu ini secara kebetulan Wakil Presiden, Drs. Moh. Hatta sedang mengunjungi Sumatera Utara dan berada di Sibolga. Ibu kota Sumatera Utara juga telah dipindahkan dari Medan ke Pematang Siantar karena musuh sudah berhasil menguasai Medan. Pada tanggal 22 Juli 1947 Wakil Presiden meninggalkan Sibolga menuju Tebing Tinggi untuk mengadakan pertemuan dengan para pemimpin pasukan dan lasykar. Untuk melaksanakan instruksi Presiden, maka diresmikan pembentukan TNI dan pengintegrasian lasykar-lasykar ke dalamnya. Misalnya lasykar *Harimau Liar* yang dipimpin oleh Selamat Ginting menjadi Brigade A dan pasukan Bejo menjadi Brigade B yang bertugas di daerah Deli — Serdang.

Sementara itu Belanda terus memperkuat diri. Pada tanggal 28 Juli 1947 mereka mendaratkan pasukannya secara besar-besaran di Pantai Cermin, kira-kira 70 km dari Tebing Tinggi. Mereka terus mendesak pasukan-pasukan Republik sehingga pertempuran-pertempuran tak dapat dihindari. Karena desakan pasukan musuh yang lebih lengkap alat perseniataannya, terpaksa sambil bergerilya para pejuang Indonesia mengundurkan diri ke daerah-daerah yang dikuasai Indonesia yaitu ke Aceh, Tanah Karo dan Tapanuli. Akhirnya Pematang Siantar pun jatuh juga. Untunglah pejabat-pejabat pemerintahan sempat mengundurkan diri sehingga tidak tertawan musuh.

Agaknya Belanda hanya berniat menguasai daerah perkebunan Sumatera Timur saja, yaitu daerah yang banyak menghasilkan uang sehingga dijuluki "tanah dolar". Sebab setelah berhasil menduduki Pematang Siantar, pasukan-pasukan Belanda itu tidak meneruskan gerakan ofensifnya. Berbeda dengan gerakannya dalam Perang Kemerdekaan kedua pada tahun 1949, yang sungguh-sungguh bermaksud menghancurkan kedudukan Republik dengan menerobos dan menguasai daerah-daerah RI bahkan sampai jauh masuk ke pedalaman.

Dalam Perang Kemerdekaan pertama itu, walaupun Belanda tidak menyerbu ke Tapanuli, tetapi tidak ringan beban yang ditanggung oleh karesidenan Tapanuli. Karena serangan Belanda di Sumatera Timur itu, tidak sedikit, bahkan ratusan ribu rakyat mengungsi meninggalkan kampung halamannya, rumahnya dan harta bendanya. Mereka tidak mau dijajah kembali walau apa pun propaganda yang didengung-dengungkan oleh Belanda. Tidak sedikit jumlah pengungsi yang memasuki Tapanuli, Aceh dan Tanah Karo, yaitu daerah-daerah yang mereka anggap aman karena dikuasi Republik. Jelaslah bahwa rakyat lebih cinta pada kemerdekaan dan pada Republik yang mempertahankan kemerdekaan itu.

Tidak sedikit kesukaran dan penderitaan yang dialami oleh para pengungsi itu. Dalam keadaan yang kacau ada saja manusia-manusia jahat yang sangat memalukan dan memilukan karena ulah anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab itu. Banyak yang miliknya dirampok, ada yang dianiaya, diperkosa bahkan dibunuh. Syak wasangka dan saling mencurigai sering membawa korban. Tambahan lagi Belanda selalu berusaha mengacau daerah Republik dengan menyelundupkan mata-matanya atau kaki tangannya. Dalam keadaan semacam ini tidak sedikit korban jatuh di kalangan mereka yang tidak bersalah.

Dr. F.L. Tobing sebagai Residen Tapanuli dan sebagai Ketua Dewan Pertahanan Daerah Tapanuli tentu saja tidak tinggal diam. Lebih-lebih bagian terbesar dari kaum pendatang itu adalah wanita, anak-anak dan orang-orang tua yang tak berdaya dan

benar-benar memerlukan bantuan. Residen mengeluarkan perintah kepada para Bupati dan kepala-kepala Daerah lainnya untuk menampung dan sejauh kemampuan yang ada membantu para pengungsi itu. Penduduk Tapanuli mengusahakan dapur umum untuk meringankan beban saudara-saudaranya itu. Ibu F.L. Tobing dan kedua orang putrinya aktif dalam dapur umum itu. Selain itu banyak pula yang sakit dan membutuhkan perawatan, sehingga peranan Palang Merah tidaklah kecil dalam merawat dan mengobati para penderita. Dalam keadaan sukar semangat perikemanusiaan, betapa kecilnya sangatlah berharga. Tambahan lagi tidak hanya rakyat biasa, juga banyak pegawai pemerintah, tentara dan lasykar yang memasuki Tapanuli karena terpaksa mundur dari Sumatera Timur. Walaupun semuanya tanpa persiapan dan dilakukan dengan tergesa-gesa dan dengan peralatan yang terbatas, tidak sedikit jasa penduduk Tapanuli dalam mengurangi penderitaan para pendatang itu.

Selain itu karena didesak oleh keadaan maka dengan kekuasaan dan tanggung jawab yang penuh dr. F.L. Tobing pada tanggal 15 Agustus 1947 memerintahkan mencetak Orita (Oeang Republik Indonesia Tapanuli) dengan harga masing-masing Rp. 5,- dan Rp. 10,-<sup>5</sup>) Maksudnya adalah untuk memudahkan penukaran Orips (Oeang Republik Indonesia Sumatra) yang banyak dibawa oleh para pengungsi itu. Orita ini dikeluarkan dengan pengetahuan Pemerintah Pusat dan menjadi alat pembayar, penukar dan penilai yang sah di daerah Tapanuli. Untuk mencegah pemalsuan setiap lembar Orita ditandatangani oleh tujuh orang termasuk dr. F.L. Tobing sebagai Residen dan Ketua Dewan Pertahanan Daerah dan Sahid Sitompul sebagai Sekretaris Residen. Karena banyaknya lembar yang harus ditanda-tangani satu per satu, tangan dan jari sampai sakit. Walaupun demikian masih ada saja yang berhasil membuat pemalsuan. Ternyata tidak sedikit uang palsu yang beredar sehingga mengacaukan perekonomian rakyat. Memang ada juga unsur kesengajaan dalam pengacauan ini untuk menyabot perjoangan Kemerdekaan rakyat Indonesia.

Selain menghadapi membanjirnya kaum pengungsi dari Suma-

tera Timur, dr. F.L. Tobing khususnya dan rakyat Tapanuli pada umumnya harus menghadapi suatu masalah lain yang cukup pelik, yaitu pertentangan antar lasykar yang tidak sedikit membawa korban.<sup>6)</sup> Selain harus menampung para pengungsi, Tapanuli juga menjadi tempat pengunduran diri pasukan-pasukan dari Sumatera Timur, baik pasukan TNI maupun lasykar-lasykar. Mereka terpaksa meninggalkan kedudukannya sebagai ketentuan dari persetujuan Renville yang ditanda-tangani pada tanggal 17 Januari 1948 yang menentukan antara lain, bahwa TNI dan pasukan-pasukan RI lainnya harus mengosongkan dan meninggalkan kedudukannya – yang sering dinamakan kantong-kantong gerilya – dan kembali ke daerah Republik.

Walaupun para anggota lasykar ini sudah diintegrasikan ke dalam TNI, masih ada ciri-ciri khasnya dan sifat-sifatnya yang tertinggal. Pada umumnya para anggota lasykar ini mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pemimpinnya dan mereka cenderung untuk berkedudukan di daerah asalnya, sehingga hubungan dengan penduduk setempat pun erat.

Keadaan sangat menyulitkan untuk mengintegrasikan mereka sepenuhnya ke dalam organisasi TNI yang resmi, karena sukar membagi-bagi dan memisahkan mereka dalam organisasi militer yang ada. Lebih-lebih dalam keadaan yang kacau sangat sulit untuk mengatur organisasi ketentaraan yang sempurna. Maka dalam keadaan darurat semacam itu dengan mudah pertentangan meletus. Terjadilah tragedi yang terkenal sebagai Perang Saudara di Tapanuli pada tahun 1948 di mana para Komandan Brigade yang tidak puas saling bertentangan yang melibatkan bentrokan senjata. Dr. F.L. Tobing sebagai Ketua Dewan Pertahanan Daerah Tapanuli segera memanggil para anggota Dewan itu bersidang dan akhirnya keputusan diambil untuk menyerahkan soal ketentaraan itu kepada wakil Pemerintah Pusat yang ada di Bukit Tinggi.

Di Tarutung Jen. May. Sutopo dari Markas Komando Tentara Sumatera di Bukit Tinggi melakukan perundingan dengan para pejabat dan kesimpulan yang diambil adalah terpaksa harus melakukan penangkapan terhadap para pengacau itu. Keputusan ini

rupanya bocor sehingga Rajin Simamora dengan pasukan Legiun Penggempurnya bergerak dari Balige menyerang Tarutung. Sebagian dari Brigade B yang dipimpin oleh May. Bejo dari Sibolga digerakkan menuju ke Tarutung untuk menghadapi pasukan Legiun Penggempur. Pertempuran tak dapat dielakkan. Sipirok, Gunung Tua dan Balige silih berganti dikuasai oleh Brigade B dan Legiun Penggempur. Hampir semua pemuda anggota Legiun Penggempur terdiri dari pemuda Tapanuli. Untuk menghadapi Inggris banyak dari pemuda Tapanuli ini yang pergi ke Sumatera Timur terutama di Medan Area. Mereka ini mengalami kebebasan dan keleluasaan bertindak di Medan Area dan ketika Belanda melancarkan agresinya para pemuda tersebut juga terpaksa mundur kembali ke Tapanuli, maka mereka bawa serta sikap kebebasan ini.

Pada mulanya rakyat Tapanuli tidak menyukai sikap para pemudanya yang demikian itu. Demikian pula sebaliknya para pemuda itu tidak merasa tenang kembali ke kampung-kampungnya yang diikat oleh asas pertalian kekeluargaan yang kokoh. Sudah tentu dibutuhkan waktu untuk mereka dapat saling menyesuaikan diri kembali.

Legiun Penggempur (LP) kemudian membubarkan diri. Para bekas anggota LP ini bersama-sama dengan kesatuan Napindo yang dipimpin oleh Liberty Malau membentuk kesatuan baru yaitu Banteng Negara. Pembentukan kesatuan baru ini tidak membantu meredakan keadaan. Bahkan keadaan semakin kacau karena terjadinya bentrokan-bentrokan antara satu pasukan dengan lainnya. Seluruh Tapanuli dikuasai oleh Brigade A, Brigade B, dan Brigade Banteng Negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan pada rakyat serta para pejabat pemerintahan di Tapanuli sebab ketiga kesatuan itu berasal dari lasykar rakyat di Sumatera Timur.

Sementara itu keadaan semakin kacau dengan adanya desas-desus bahwa pasukan-pasukan yang berasal dari Sumatera Timur akan merebut kekuasaan di Tapanuli. Situasi bertambah panas ketika PKI memberontak di Madiun pada bulan September 1948

dan muncul desas-desus baru bahwa pasukan Mayor Bejo mempunyai hubungan dengan gerakan komunis itu. <sup>7)</sup>

Dengan rasa tanggung jawab yang sepenuhnya, seperti yang selalu ditunjukkan dan dengan keprihatinan yang mendalam dr. F.L. Tobing tidak henti-hentinya menghimbau kepada pihak-pihak yang bertentangan untuk menghentikan pertentangan mereka dan segera diadakan perundingan. Sebab pertentangan-pertentangan bersenjata itu sedikit membawa penderitaan bagi rakyat yang sudah sangat sukar hidupnya itu. Salah satu suratnya yang ditujukan kepada Mayor Bejo diumumkan secara terbuka. Surat yang bertanggal 17 Oktober 1948 itu berbunyi sebagai berikut :

Surat Residen Dr. F.L. Tobing kepada Mayor Bejo, tertanggal 27 Oktober 1948, No. 9677 : <sup>8)</sup>

Jth. Paduka Tuan Majoor Bedjo,

1. Surat Paduka Tuan tanggal 25 Oktober 1948 dari Padangsidempuan saja telah terima tadi malam jang dibawa oleh Pengawal Polisi Pentji. Dalam surat Tuan, Tuan njatakan, bahwa Tuan tidak akan berunding dan mengadakan perembukan dengan pendjahat-pendjahat dan pengatjau-pengatjau dalam Republik Indonesia, walaupun siapa dianja, akan tetapi bersedia berunding dan berembuk dengan siapapun djuga jang bernegara Republik dan mematuhi hukumnja.
2. Didalam surat saja jang saja kirim kepada Paduka Tuan taggal 23 Oktober 1948, tidak ada saja mintak jang Tuan harus adakan perundingan atau perembukan, hanja saja mintak, supaja Tuan, berhubung dengan kedatangannja, Komisariat Pemerintah Pusat serta Panglima Sumatera dan rombongan beliau-beliau :

menghentikan pertempuran  
menghentikan segala offensif dan supaja  
masing-masing tinggal dulu pada tempatnja jang sekarang,  
sampai urusan landjutan.

Sebetulnja saja mengharapkan menerima surat dari Tuan jang berisi bahwa, Tuan bersedia memenuhi permintaan kita itu, dan seterusnya melakukan usaha, agar tudjuan itu selekas

mungkin dapat tertjapai. Tetapi saja tidak melihat kerelaan Tuan tentang itu dalam surat Tuan kirim pada saja. Itulah jang membikin saja amat ketjewa.

3. Pada tanggal 25 Oktober 1948 saja menjuruh pula sampaikan pada Paduka Tuan salinan kawat dari Panglima Tertinggi Territorial Sumatera no. 1470/5 tanggal 23 Oktober 1948, jang berisi :

”Rombongan saja dan Ketua Komisariat Negara hari Senin tanggal 25 – 10 – 1948 berangkat ke Tapanuli”. Tembak-menembak supaja sebelum kita datang diberhentikan. Siapa jang menjerang saja anggap melanggar perintah saja.

Itulah jang diperintahkan oleh Panglima, dan salinan kawat itu Tuan djuga telah terima kemaren, tetapi djuga saja tidak dapat kepastian, bahwa Tuan akan taati perintah itu.

4. Berhubung dengan jang tertulis di atas ini, saja serukan terus menerus pada Tuan :

hentikan dulu tembak-menembak, segala offensief, serangan-serangan, tindakan-tindakan jang menimbulkan pertambahan kekalutan.

Kekalutan sudah tjukup, lebih dari tjukup besarnja.

Pemeriksaan dari atasan sudah tiba di Tapanuli.

Hentikan sifat dan sikap untuk meneruskan faham Tuan sendiri.

Orang-orang lain, Pemerintah Tapanuli dan Rakjat Tapanuli pun ada mempunjai faham, jang Tuan patut harus hormati.

Tuan sendiri telah bilang dalam surat Tuan, jang Tuan bersedia bernegara Republik dan mematuhi peraturan hukumnja. Njatakan itu dengan perbuatan jang selaras dengan peraturan Hukum.

Salah satu dari itu ialah :

Mendengar dari Pemerintah Tapanuli dan mendengar permintaan Rakjat Tapanuli dan melaraskan diri dan langkah pada permintaan ini.

5. Dalam surat ini, untuk keselamatan dan ketertiban Rakjat dan Pemerintah Republik Indonesia saja tidak kehendaki jang Tuan memasuki Kota Sibolga.

Suasana dan iklim tidak mengizinkan jang Tuan serta pengikut jang bersendjata datang di Sibolga. Lantaran itu tinggalah ditempat Tuan jang sekarang.

Inilah jang saja mau njatakan dengan tegas.

Dan saja harap sangat jang Paduka Tuan sebagai seorang Opsir Republik Indonesia musti dapat menafsirkan pernyataan ini, jang diberikan oleh seorang Residen dari Republik Indonesia.

6. Saja berseru pula :

Sabarlah Tuan, sabarlah Tuan.

Pemeriksaan atasan telah tiba di Tapanuli.

Pemeriksaan dari Negara kita telah dimulai.

Tuan harus memberi kesempatan jang sebaik-baiknja, agar pemeriksaan-pemeriksaan itu dapat berlalu setjepat-tjepatnja, sedalamnja, dan seteliti-telitianja.

Inilah salah satu kewadajiban Tuan sebagai Opsir dari Republik Indonesia jang saja harap Tuan akan benarkan sepenuh-penuh-nja.

Demikianlah permintaan, seruan dan nasehat saja.

**MERDEKA,**

Residen Tapanuli dari Republik Indonesia  
Ketua Dewan Pertahanan Daerah Tapanuli.

Dr. F. Lumbantobing.

Dalam pada itu dr. F.L. Tobing beserta keluarga dan para pejabat pemerintah lainnya yang menyingkir ke Tarutung karena Sibolga berhasil diduduki oleh Major Bejo dengan pasukannya.

Pasukan Banteng Negara di bawah pimpinan Liberty Malau menyerbu Sibolga dengan bantuan pasukan ALRI, sedang pasukan Bejo tetap bertahan dengan bantuan Polisi. Karena keadaan semakin gawat ini, Let.Kol. A.E. Kawilarang seorang perwira dari Divisi Siliwangi yang ditugaskan untuk memegang komando di Tapanuli dan Sumatera Timur datang di Sibolga pada pertengahan bulan Nopember 1948 bersama Wakil Presiden Dr. Moh.Hatta. Segera dilakukan usaha-usaha untuk mendekati mereka yang saling bertempur menghentikan tembak-menembak dan perundingan dimulai.

Setelah diadakan beberapa kali pembicaraan dan perundingan dapat diambil kesepakatan Let.Kol. Kawilarang mengakui semua pasukan yang ada di Tapanuli dan dimasukkan ke dalam daerah komando yang dinamakan Sub-Territorium VII Komando Sumatera. Kemudian ia menugaskan masing-masing komandan membentuk batalyonnya sendiri-sendiri dan daerahnya juga ditentukan. Sektor III yang meliputi wilayah Dairi-Pakpak dengan komandanya Mayor Selamat Ginting, dan Sektor IV yang meliputi daerah Tapanuli Tengah, Sibolga dan Barus di bawah komando Kapten Oloan Sarumpaet yang kemudian diganti oleh Mayor Maraden Panggabean. Sedang Sektor S dikuasai oleh pasukan ALRI di bawah komando Let.Kol. Haposan Simanjuntak.<sup>9)</sup>

Setiap pertentangan atau ketegangan yang terjadi di daerah RI digunakan oleh Belanda sebagai bahan propaganda untuk menyatakan kepada dunia luar bahwa keadaan di daerah Republik Indonesia tidak aman. Belanda berusaha meyakinkan dunia luar bahwa RI tidak mampu memerintah dan menjamin kehidupan warganya sehingga dengan demikian akan timbul gambaran bahwa orang Indonesia memang tidak atau belum mampu berdiri sendiri.

Sesungguhnya sudah dapat dipahami bahwa dalam setiap perjuangan dan revolusi akan terjadi disintegrasi yaitu perpecahan dan pertentangan. Akan tetapi bagaimanapun juga kekuatan integrasi atau semangat persatuan untuk membangun yang dilandasi oleh kesadaran kebangsaan biasanya dapat mengatasi segala gangguan dan cobaan yang membahayakan keselamatan negara. Demikianlah juga halnya yang terjadi di Sumatera, khususnya di karesidenan Tapanuli, dr. F.L. Tobing beserta mereka yang setia pada republik dengan penuh semangat memperjuangkan persatuan dan mempertahankan kemerdekaan.

Radio Belanda dari Medan berulang kali menyiarkan berita propaganda bahwa daerah Republik kacau balau. Kehidupan rakyat terancam karena gerombolan liar telah berkuasa di Tapanuli dan bahwa Bejo dan kawan-kawannya telah merebut kekuasaan pemerintahan. Selain itu taktik *divide et impera* terus dijalankan

Belanda. Mereka menyebarkan berita bahwa orang Cina terutama di Aceh sangat menderita dan terancam hidupnya. Sementara itu blokade ekonominya berjalan terus dan semakin diperketat.

Rupanya ada maksud-maksud tertentu yang dikandung Belanda dalam tindakan-tindakannya itu. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk melancarkan agresinya dengan dalih mengamankan kehidupan rakyat Indonesia. Agar tindakannya tidak dicela dunia maka propaganda-propaganda bohong itu dilancarkan keluar. Ternyata tak lama kemudian terdengar berita bahwa Belanda telah menyerbu dan menguasai ibukota RI, Yogyakarta dan berhasil menawan Pimpinan tertinggi RI, Sukarno – Hatta, beserta beberapa pejabat itnggi lainnya. Untunglah sebelumnya Sukarno-Hatta sempat mengirim radiogram kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI yang sedang berada di Sumatera. Radiogram yang berisi mandat dan instruksi itu berbunyi sebagai berikut : <sup>10)</sup>

”Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 6 pagi Belanda telah mulai serangannya atas Ibu Kota Jogyakarta. Jika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasai kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri kemakmuran Republik Indonesia Darurat di Sumatra”.

Jogyakarta, 19 Desember 1948

Presiden :

Sukarno

Wakil Presiden :

Mohammad Hatta

Dengan adanya radiogram tersebut terbentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera yang menjalankan tugasnya sampai kedaulatan Republik Indonesia dikembalikan. Sehingga walaupun pucuk pimpinan tertinggi pemerintah ditangkap dan diasingkan Belanda, Negara Republik Indonesia tidaklah runtuh. Tujuan Belanda belumlah terlaksana.

Pemerintah Darurat Republik Indonesia segera melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada waktu itu. Di Sumatera diputuskan untuk mengangkat Gubernur Militer yang memegang kekuasaan sipil dan militer. Ditetapkan bahwa yang menjadi Gubernur Militer untuk daerah Tapanuli dan Sumatera Timur bagian Selatan adalah dr. F.L. Tobing yang tadinya menjabat Residen Tapanuli. Sedang untuk Aceh termasuk daerah Langkat dan Tanah Karo ditetapkan Tengku Daud Beureuh.

Tidaklah ringan tugas yang dipikul oleh dr. F.L. Tobing sebab seperti yang terjadi di Jawa, Belanda juga melancarkan agresinya bersamaan dengan serangan ke ibukota RI. Pasukan-pasukan Belanda menerobos garis demarkasi dan memasuki Rantau Perapat di mana mereka telah membunuh beberapa anggota polisi keamanan RI yang menjaga garis *status quo*. Kemudian mereka bergerak terus menyerbu lebih jauh ke daerah Republik. Mereka menyerang daerah Tapanuli serentak dari segala jurusan, melalui darat, danau, udara dan laut.

Pada tanggal 23 Desember 1948 pasukannya yang menyeberangi Danau Toba berhasil mendarat dan menguasai Balige. Kemudian pasukan payungnya diterjunkan di lapangan terbang Silangit di Siborong-borong dan menjelang tengah hari Tarutung berhasil mereka duduki. Bahaya benar-benar sudah menusuk jantung wilayah Tapanuli. Keesokan harinya tampaklah pasukan-pasukan Belanda mendarat di Sibolga dan kali ini Wilayah Tapanuli benar-benar diduduki oleh Belanda. Agaknya sekali ini Belanda benar-benar berniat melumpuhkan pemerintah RI sehingga dalam perundingan-perundingan dan pembicaraan-pembicaraan yang diadakan, mereka akan dapat memaksakan kehendaknya. Namun kenyataannya yang terjadi berlainan dari harapan yang dicitakan. Walaupun kota-kota di Tapanuli sudah berhasil dikuasai, tidaklah berarti bahwa pemerintahan RI di karesidenan Tapanuli runtuh.

Setelah mengetahui bahwa pasukan-pasukan Belanda menyerbu Tapanuli dari berbagai arah, dr. F.L. Tobing beserta seluruh keluarganya dan beberapa pejabat pemerintahan segera bersiap-

siap dan mengundurkan diri ke pegunungan. Tak ada barang-barang yang sempat dibawa kecuali dokumen-dokumen penting dan berharga yang harus diselamatkan, sehingga walaupun Sibolga sebagai pusat pemerintahan jatuh ke tangan Belanda, pemerintahan RI di Tapanuli tetap berjalan secara bergerilya. Para pamong praja yang menyingkir melakukan apa saja yang dapat dilakukan pada waktu itu.

Sebagai Gubernur Militer dr. F.L. Tobing mempunyai kekuasaan besar untuk menghadapi perang ini. Ia dibantu oleh Komandan Sub-Territorium VII Let.Kol. A.E.Kawilarang. Tugas yang paling penting adalah untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan RI serta membina dan menyadarkan rakyat bahwa Pemerintah RI tetap tegak berdiri.

Pada hari-hari pertama Belanda melancarkan serangannya, mereka tidak banyak mendapat perlawanan dari pihak Indonesia. Tampak dengan jelas bahwa mereka telah merencanakan penyerbuan ke daerah Republik dengan sebaik-baiknya. Tambahan lagi dengan persenjataan yang lebih lengkap dan modern, sukarlah bagi para pejoang Indonesia untuk menghadapi serangan frontal dan mendadak itu. Maka terpaksa pasukan-pasukan Indonesia mengundurkan diri ke gunung-gunung dan ke hutan-hutan, untuk menjalankan taktik gerilya. Akan tetapi sambil mundur para pejuang itu masih sempat membumi-hanguskan gedung-gedung yang penting, meruntuhkan jembatan-jembatan serta membuat rintangan-rintangan di jalan-jalan yang akan dilalui musuh. Seperti halnya di Jawa, pasukan-pasukan Republik di Sumatera khususnya di Tapanuli juga dimobilisasi berdasarkan strategi dan taktik perang gerilya yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Tertinggi TNI.

Pada pokoknya strategi perang gerilya adalah pembentukan wilayah pertempuran dan pertahanan yang kecil. Maksudnya agar mudah dikuasai sepenuhnya oleh pasukan-pasukan yang ditugaskan di situ. Tugas pasukan gerilya itu selain bertempur juga harus membina daerahnya agar terhindar dari kekacauan dan kehidupan dapat berjalan terus. Dengan demikian diharapkan

usaha musuh untuk menyelundupkan kaki tangannya untuk mengacau dapat dicegah. Selain itu diusahakan juga agar musuh tidak dapat mengadakan konsolidasi baik politik maupun ekonomi.

Belanda yang dengan cepatnya berhasil menduduki kota-kota di Tapanuli, agaknya tidak menduga bahwa para pejuang Indonesia telah siap menyambut dengan taktik perang gerilya. Dalam hal ini reorganisasi pasukan Republik di Sub-Territorium VII oleh Let. Kol. Kawilarang sedikit banyak telah membantu terlaksananya taktik dan strategi perang gerilya.

Pasukan-pasukan TNI pada umumnya bertugas di wilayah yang telah mereka kenal betul medannya karena banyak anggota pasukan itu yang berasal dari daerah-daerah itu. Sudah tentu mereka faham benar-benar tentang liku-likunya jalan-jalan yang ada, hutan-hutan, jurang-jurang serta perbukitan di sekitar daerah itu. Sehingga dengan mudah mereka melakukan serangan-serangan terhadap kedudukan Belanda. Oleh karena itu rencana Belanda untuk menyusun pertahanan di tempat yang diduduki tak dapat dilaksanakan.

Sebenarnya teras perang gerilya adalah bantuan yang diberikan oleh segenap lapisan masyarakat yang tergabung dalam apa yang biasa disebut Perjuangan Rakyat Semesta. Baik unsur militer maupun sipil bersama-sama, bahu membahu menghadapi musuh. Demikianlah dengan dr. F.L. Tobing yang menyingkir dari Sibolga beserta keluarga dan beberapa pejabat pemerintah segera membuat kedudukan pemerintahan sementara di Rimba Ampolu (Tapanuli Selatan). Mereka harus berpindah-pindah terus karena pasukan Belanda selalu berusaha menangkapnya dan sampai perang selesai usaha mereka tak berhasil.

Tidak ringan penderitaan yang harus ditanggung oleh keluarga yang bergerilya ini. Naik turun Bukit Barisan yang curam dan menerobos hutan rimba Sumatera tidaklah mudah. Lebih-lebih bagi dr. F.L. Tobing yang sudah mencapai usia menjelang lima puluhan. Kesehatanya sering terganggu namun tidak dirasakannya. Semangatnya tetap tinggi dan merupakan dorongan semangat bagi

pengikutnya untuk tetap tabah menghadapi segala kesukaran dan kekurangan. Pada waktu bergerilya ini tampak jelas kepribadian dr. F.L. Tobing sebagai seorang pemimpin yang sederhana, jujur, dan teguh pendiriannya. Ia merupakan bapak, tidak saja bagi anak-anaknya, juga bagi rakyat dan gerilyawan di sekelilingnya.

Istri dr. F.L. Tobing dan putri-putrinya serta para wanita lainnya tidak pula kecil peranannya. Bersama-sama dengan rakyat desa sekitarnya mereka menyiapkan perbekalan. Untunglah bumi Sumatera yang subur dan kaya masih mampu menghidupi para pejuang dengan segala hasil bumi yang dihasilkan seperti ubi, keladi, sayur-sayuran dan buah-buahan. Beras tidak banyak didapat karena rakyat tidak sempat menggarap sawahnya. Pakaian dan obat-obatan serta amunisi sukar didapat. Umumnya hanya tergantung dari hasil selundupan yang berasal dari daerah pendudukan atau bila berhasil menerobos blokade Belanda untuk mengadakan barter dengan Singapura. Jalan lain yang ditempuh adalah minta bantuan dari Aceh yang pada waktu itu bisa bertahan dan tidak diduduki oleh Belanda. Aceh mempunyai persenjataan dan perbekalan yang cukup karena sering bisa menembus blokade Belanda dan dapat berdagang dengan Malaya dan Singapura. <sup>11)</sup>

Kaum ibu dan para pemuda serta rakyat di desa-desa juga besar jasanya dalam merawat mereka yang sakit, luka-luka atau gugur. Lebih-lebih bagi para pejuang yang jauh dari rumah dan sanak saudara sangat memerlukan hiburan dan dorongan semangat. Jarang sekali mereka dapat berjumpa dengan keluarganya yang dicintai. Di desa-desa tempat mereka singgah atau beristirahat mereka diterima sebagai sanak saudara sendiri. Demikian juga halnya dengan ibu F.L. Tobing yang sudah dianggap sebagai ibu sendiri oleh para gerilyawan yang berjoang di daerah sekitarnya. Istri dr. F.L. Tobing juga merupakan pembantu pribadi Gubernur Militer Tapanuli seperti mengurus keuangan dan lain-lain tugas bersama-sama dengan anggota-anggota pemerintahan yang bergerilya.

Selama perang kemerdekaan ini tampaklah betapa setianya rakyat kepada Tanah Airnya. Sungguh pun hidup sangat menderita, dapat dikatakan sedikit saja yang bersedia bekerja pada Belanda. Mereka lebih baik menyingkir ke hutan-hutan dan gunung-gunung dari pada hidup di daerah pendudukan. Mereka juga merupakan pelindung bagi kaum pejuang yang bergerilya. Sebuah contoh nyata adalah yang dialami oleh dr. F.L. Tobing sendiri. Pada suatu waktu pasukan-pasukan istimewa Belanda yaitu pasukan komando Baret Hijau dikerahkan ke daerah sekitar Sibolga harus mencari dan menangkap Gubernur Militer RI itu. Satu kompi bergerak dari Kolang mendaki gunung Sipakpahi dan satu peleton bergerak dari Sibolga ke Aek Raisan. Dalam operasi pasukan Belanda ini tidak sedikit kampung yang dibakar Belanda dan banyak penduduk yang ditangkap dan di-interogasi untuk mendapatkan keterangan tentang persembunyian para pemimpin gerilya Republik. Walaupun mereka itu disiksa tak sepatut kata pun rahasia persembunyian dr. F.L. Tobing dan Let.Kol Kawi-larang yang bocor.

Lagi-lagi Belanda menemui kegagalan. Terutama berkat kepribadian yang terpancar dari dirinya dr. F.L. Tobing yang dicintai oleh rakyatnya. Ia benar-benar seorang bapak yang rela menderita bersama rakyatnya. Seandainya ia mau dan hanya mementingkan dirinya sendiri saja, tentu ia tidak usah bersusah payah dan menderita bergerilya di gunung-gunung yang curam dan hutan rimba. Ia bisa tetap tinggal di kota dan pasti akan mendapat jabatan tinggi dari Pemerintah Belanda. Atau ia meneruskan membuka praktek dokternya yang akan sangat laku karena jumlah dokter yang sangat sedikit pada waktu itu. Memang tak ada penderitaan yang menggoyahkan iman serta melemahkan semangat seorang pejuang sejati.

Sampai perintah gencatan senjata diumumkan, Belanda tidak pernah berhasil menemukan dr. F.L. Tobing beserta Staf dan keluarganya walaupun berkali-kali diadakan pembersihan. Padahal seringkali tempat persembunyian mereka itu berada di sekitar desa-desa yang dibersihkan oleh Belanda. Ternyata tak ada seorang

penduduk pun yang berkhianat. Mereka mencintai pemimpin ini. Kemudian disebarkan desas-desus bahwa dr. F.L. Tobing beserta segenap pemerintahan RI telah menyingkir ke Aceh. Berita ini memang disengaja disebarkan untuk menggecoh dan mengacau Belanda.

Selama Perang Kemerdekaan RI II Belanda tidak berhasil mengadakan konsolidasi baik politik maupun ekonomi di Tapanuli. Mereka hanya menguasai kota-kota saja yang juga selalu diganggu oleh para pejoang Indonesia. Di luar garis perbatasan kota, di desa-desa dan di pelosok-pelosok hutan dan gunung gerilyawan Republik Indonesia dan Pemerintah RI yang berkuasa. Semuanya tentu serba darurat apalagi harus selalu berpindah-pindah untuk menghindari penyerangan pasukan Belanda. Kepala-kepala desa dan kepala-kepala negeri yang setia pada RI tetap menjalankan kewajibannya masing-masing dengan kemampuan yang ada pada saat itu. Dengan bantuan para pemuda dan pemudi yang bergerilya pendidikan dan kesehatan rakyat pun mendapat perhatian walaupun semuanya serba terbatas.

Agresi Belanda yang dimulai tanggal 19 Desember 1948 telah menimbulkan reaksi dari banyak negara di dunia. Pada tanggal 22 Desember 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan sidang untuk membahas masalah di Indonesia. Amerika Serikat bersama-sama dengan Kolombia dan Siria mengajukan resolusi agar Dewan Keamanan memerintahkan penghentian tembak-menembak dan masing-masing menarik kembali pasukannya ke tempat semula. Tanggal 24 Desember resolusi itu diterima dengan beberapa perubahan. Penghentian tembak-menembak dan pembebasan tawanan perang disetujui, tetapi penarikan mundur pasukan ditolak oleh Belanda. Berhubung dengan itu maka India dan Pakistan melarang pesawat-pesawat KLM milik Belanda terbang di atas wilayah kedua negara tersebut dan mendarat di lapangan terbangnya. Kemudian atas usul Perdana Menteri Burma, Jawaharal Nehru, PM India mengundang beberapa negara Asia

untuk merundingkan tentang keadaan Indonesia.

Pada tanggal 20 Januari 1949 Konperensi Asia di New Delhi dimulai. Indonesia diwakili oleh Mr. A.A. Maramis yang waktu itu sedang berada di India. Resolusi yang diputuskan dan dikirimkan ke Dewan Keamanan PBB pada tanggal 24 Januari 1949 antara lain berbunyi sebagai berikut :

1. Pemulihan Pemerintah Republik ke Jogja,
2. Pembentukan Pemerintah Interim yang mempunyai kekuasaan dalam politik luar negeri,
3. Penarikan pasukan Belanda dari seluruh Indonesia,
4. Penyerahan kedaulatan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat tanggal 1 Januari 1950.

Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949 telah menerima baik resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat, Cina, Kuba dan Norwegia yang antara lain menganjurkan agar dihentikan permusuhan, pemulihan Pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, dan diadakan lagi perundingan dengan pihak Belanda. Dalam resolusi itu juga dicantumkan bahwa penyerahan kedaulatan kepada Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat harus dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 1950.

Awal bulan Agustus 1949 baik dari pihak Indonesia maupun dari pihak Belanda dikeluarkan perintah penghentian tembakan-menembak. Kemudian kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan penyelesaian pertentangan dan mengadakan perundingan perdamaian. Lalu dimulailah Konperensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, ibu kota negeri Belanda. Sejalan dengan itu di Indonesia mulai dibicarakan tentang ketentuan-ketentuan gencatan senjata serta masalah-masalah lainnya yang berhubungan dengan pengembalian wilayah RI yang diduduki musuh selama perang berkobar. Di Jakarta dibentuk sebuah badan yang mengatur hal-hal itu dan disebut Badan Gabungan Pusat (*Central Joint Board*), sedang di daerah-daerah dibentuk panitia timbang terima yang disebut

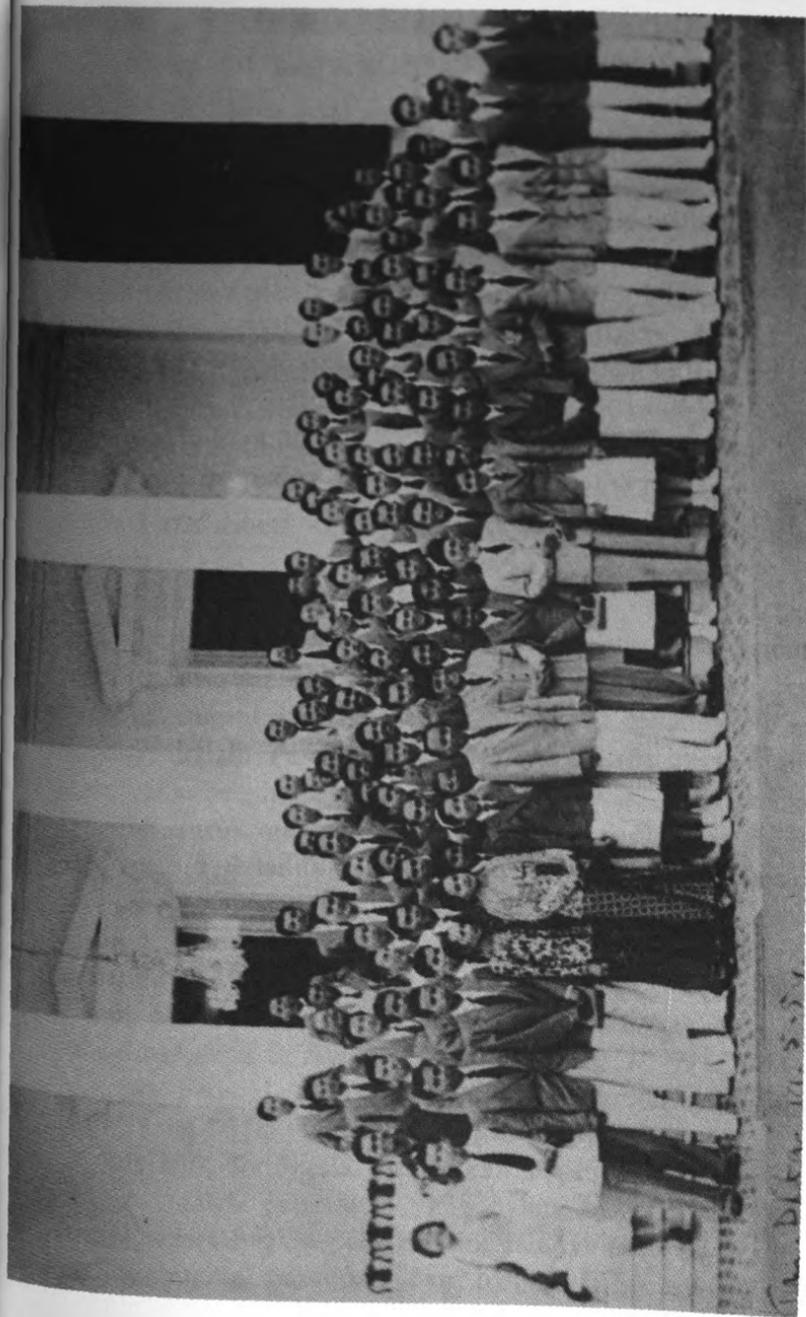
**Panitia Gabungan Setempat (*Local Joint Committee*). Panitia ini sebenarnya merupakan badan pelaksana dari Badan Gabungan Pusat di Jakarta. Tugasnya yang terutama adalah mengatur ketentuan-ketentuan mengenai gencatan senjata dan menyelenggarakan penarikan mundur pasukan Belanda dari daerah Republik.**

Di Sumatera Utara dibentuk dua panitia timbang terima ini, yaitu di Medan untuk Sumatera Timur dan di Sibolga untuk Tapanuli. Sehubungan dengan tugas pengembalian kekuasaan RI dan penarikan mundur pasukan Belanda dari daerah Republik, maka dr. F.L. Tobing beserta staf dan seluruh keluarganya turun ke Sibolga pada akhir bulan Nopember. Perundingan dimulai tentang pemulihan keamanan. Dalam perundingan-perundingan menghadapi Belanda ini kembali kepribadian dr. F.L. Tobing memegang peranan. Kesabarannya, ketenangannya, kelancarannya berfikir serta pandangannya yang tajam telah menguntungkan pihak Republik. Belanda tidak bisa banyak bertingkah lagi. Telah dicapai kesepakatan bahwa penarikan mundur pasukan Belanda dari daerah Tapanuli segera dijalankan dan seluruh daerah yang didudukinya selama perang akan dikembalikan pada pihak RI.

Tanggal 30 Nopember 1949 Sipirok mulai dikosongkan oleh tentara Belanda, menyusul Padang Sidempuan. Kemudian pasukan Belanda yang ada di Sibolga ditarik mundur pada tanggal 7 Desember, disusul oleh mereka yang ada di Tarutung dan yang terakhir adalah yang berada di Balige pada tanggal 13 Desember.<sup>12)</sup> Dengan demikian menjelang berakhirnya tahun 1949 seluruh wilayah Tapanuli sudah kembali menjadi daerah RI. Segala sesuatunya yang berhubungan dengan pengembalian kekuasaan RI dan penarikan mundur pasukan Belanda telah berlangsung dengan lancar dan baik berkat hasil perundingan yang dijalankan oleh dr. F.L. Tobing bersama para pemuka Tapanuli lainnya. Hal ini juga berkat semangat disiplin yang tinggi dari para pejoang Indonesia yang mematuhi segala perintah pemimpinnya. Mereka menyadari bahwa segala perintah itu dilandasi oleh kebijaksanaan yang telah diperhitungkan dan dipertimbangkan semasak-masaknya demi kebaikan bersama.

Dengan tercapainya persetujuan perdamaian dan sejalan dengan mundurnya pasukan Belanda, para pejoang RI mulai meninggalkan gerilyanya dan turun kembali ke kota. Rakyat menyambut dengan gembira kembalinya para pejoang dan mundurnya pasukan Belanda itu. Bagi mereka semuanya itu merupakan gambaran yang nyata dari hasil perjoangan dan penderitaan selama ini. Kemenangan telah tercapai dan kemerdekaan telah berhasil dipertahankan. Semuanya ini benar-benar dirasakan secara mendalam.

Rakyat merasa gembira dan bersyukur. Mereka tahu dan melihat bahwa perang telah berakhir, pasukan-pasukan musuh telah mundur, para pejoang telah kembali dan Indonesia benar-benar telah merdeka. Semuanya ini merupakan awal dari harapan akan tibanya kehidupan yang aman, damai dan sejahtera.



Presiden Soekarno didampingi Menteri Penerangan Dr. F.L. Tobing bergambar bersama dengan para atlet Indonesia untuk Asiade II di Manila bertempat di Istana Merdeka, Jakarta, April 1954.

*(Repro/dokumentasi Idayu/L-2557).*

THE  
HISTORICAL  
RECORDS  
OF  
THE  
CITY  
OF  
BOSTON  
FROM  
1630  
TO  
1880  
PART  
I  
1630-1700  
PUBLISHED  
BY  
THE  
CITY  
OF  
BOSTON  
1880

## V. PENGABDIAN DR. F.L. TOBING DI LAPANGAN PEMERINTAHAN

Pepeatah mengatakan "Kepalangi mandi biarlah basah" yang artinya kurang lebih bila kita telah mengerjakan sesuatu pekerjaan yang berguna, sebaiknya diteruskan saja. Demikianlah ungkapan itu yang agaknya sesuai dengan jalan hidup dr. F.L. Tobing. Setelah terseret oleh keadaan pada jaman Jepang untuk terjun ke lapangan pemerintahan tampaknya kehidupan dr. F.L. Tobing terus berlanjut bergelimang dalam kancah yang sebetulnya tidak pernah dicita-citakannya. Dengan selesainya perang gerilya dan kedaulatan Republik Indonesia telah dipulihkan, dr. F.L. Tobing tidak kembali ke profesinya sebagai dokter. Akan tetapi oleh negara terus diberi kepercayaan untuk mengemban tugas pemerintahan.

Dengan diterimanya hasil-hasil KMB maka terbentuklah negara baru di Indonesia yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari gabungan beberapa negara bagian, termasuk Republik Indonesia. Memang pada waktu Belanda melancarkan agresinya dalam Perang Kemerdekaan II, ada orang-orang Indonesia yang berpihak pada Belanda. Bahkan tidak sedikit yang berusaha untuk mengembalikan kekuasaan Belanda lagi. Lebih-lebih karena Belanda selalu melancarkan taktik memecah belah yang sangat merugikan Indonesia. Misalnya pada waktu itu dibentuk beberapa negara bagian seperti Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, dan beberapa lainnya. Mereka ini tergabung dalam apa yang dinamakan *Bijzonder Federaal Overleg (BFO)* atau Mukhtar Istimewa Federal. Sehingga ketika RIS terbentuk negara-negara bagian yang 16 jumlahnya itu bergabung ke dalamnya.

Republik Indonesia merupakan negara bagian yang terbesar dengan jumlah penduduk yang paling banyak pula. Selain itu negara-negara bagian yang penting lainnya ialah Negara Sumatera Timur, Negara Pasundan dan Negara Indonesia Timur. Yang

terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RIS pertama adalah Presiden dan Wakil Presiden R.I. yaitu Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta. Tampaklah betapa besarnya peranan R.I. dalam RIS dan juga nampak bahwa gerakan untuk mengembalikan negara kesatuan RI cukup besar. Tidak sampai satu tahun RIS berdiri, pada tanggal 15 Agustus 1950 dua hari sebelum peringatan Proklamasi Kemerdekaan dirayakan, Parlemen RIS sepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali. Demikianlah keadaan pemerintah pusat setelah perang gerilya berakhir.

Pada waktu RIS, di Sumatera Utara terdapat tiga kesatuan pemerintahan yaitu Propinsi Aceh, Negara Sumatera Timur dan Karesidenan Tapanuli dan Sumatera Timur bagian R.I. Dengan terbentuknya negara kesatuan R.I. ketiganya kemudian dijadikan dua propinsi yaitu propinsi Aceh dengan Tengku Daud Beureuh, bekas Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo menjadi Gubernurnnya. Kedua yaitu propinsi Tapanuli dan Sumatera Timur dengan Gubernurnnya dr. F.L. Tobing yang tadinya menjabat sebagai Gubernur Militer daerah tersebut.

Di Propinsi Tapanuli DPRD pertama kali bersidang pada tanggal 5 Januari 1950. Dalam sidang itu dilaporkan keadaan daerah-daerah di Tapanuli selama perang gerilya yang baru lalu. Berdasarkan laporan-laporan dan pembahasan maka setelah dimusyawarahkan diambil keputusan mengembalikan bentuk daerah ke bentuk semula yang terdiri dari empat kabupaten yaitu kabupaten Tapanuli Utara, kabupaten Tapanuli Tengah, kabupaten Tapanuli Selatan dan kabupaten Nias. Untuk sementara pemerintahan di unit-unit yang lebih kecil, seperti di kampung-kampung atau di desa-desa belum ditentukan karena perlu penelitian tentang keadaan masing-masing. Lebih-lebih bila diingat bahwa ikatan keluarga dan adat istiadat pada umumnya masih teguh. Sehingga tidaklah mudah tugas yang dihadapi oleh dr. F.L. Tobing sebagai kepala daerah. Bukan hanya soal-soal obyektif seperti keamanan, kemakmuran, kesehatan, pendidikan dan pemerintahan saja yang dihadapi, tapi banyak soal subyektif yaitu hal-hal yang sangat pribadi sifatnya, yang menyangkut soal adat

istiadat, soal kekeluargaan, soal nilai-nilai agama yang harus dipertimbangkannya. Misalnya tidak mudah untuk mengangkat seorang dari Tarutung untuk menjadi kepala desa di Padang Sidempuan, atau mengangkat seorang dari Balige menjadi lurah di Nias. Keadaan lingkungan setempat dan lebih-lebih kehendak rakyat daerah itu harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Dr. F.L. Tobing berusaha sejauh mungkin menghindari adanya ketidak-senangan yang lama-lama bisa meletus menjadi pergolakan. Padahal setelah selesai perang gerilya itu perlu diadakan konsolidasi dan reorganisasi di segala bidang. Banyak pekerjaan yang terbengkalai karena perang-perang kemerdekaan dan kerusakan keadaan akibat penjajahan Jepang pun belum sempat diperbaiki. Memang tidak mudah dan tidak ringan tugas mengisi kemerdekaan itu, bahkan mungkin lebih berat dari pada mempertahankannya.

Setelah Negara Kesatuan RI dinyatakan terbentuk pada pertengahan tahun 1950, di Medan diadakan upacara penghapusan Negara Sumatera Timur dan pengintegrasian ke dalam Negara Kesatuan RI. Dalam Negara Kesatuan RI ini pulau Sumatera dibagi menjadi tiga propinsi yaitu propinsi Sumatera Utara, propinsi Sumatera Tengah dan propinsi Sumatera Selatan. Karesidenan Tapanuli digabungkan dalam propinsi Sumatera Utara bersamaan dengan Aceh dan Sumatera Timur. Pada bulan Oktober 1950 di Sibolga dilangsungkan rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat daerah Tapanuli dan Sumatera Timur bagian Selatan. Dalam rapat ini dibicarakan soal pembentukan propinsi Sumatera Utara dan penggabungan daerah Tapanuli ke dalamnya. Antara lain diusulkan dalam pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara propinsi Sumatera Utara yang susunan anggotanya terdiri dari 13 orang dari Aceh, 13 orang dari Tapanuli dan 14 orang dari Sumatera Timur. Sebagai penutup dalam sidang terakhir dinyatakan bahwa dewan ini akan terus bekerja sampai terbentuknya Dewan Perwakilan yang baru.

Pada bulan Februari 1950 dr. F.L. Tobing secara resmi mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur Militer dengan dihapuskannya jabatan itu oleh Pemerintah Pusat. Karena kemampuan yang telah

ditunjukkan selama ini, lebih-lebih di waktu perang gerilya ia bekerja dan berjuang dengan tekun tanpa mengenal lelah, maka Menteri Dalam Negeri RI Mr. Asaat mengangkat dr. F.L. Tobing sebagai Gubernur Propinsi Sumatera Utara yang meliputi daerah Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli. Tidak disangka-sangka ia menolak jabatan tinggi yang dilimpahkan padanya itu. Orang banyak tentu bertanya-tanya, mengapa ia menolak kehormatan yang disodorkan padanya itu? Padahal tidak sedikit orang yang mengidam-idamkan jabatan tinggi setelah berevolusi sebagai imbalan dari segala pengorbanan yang telah diberikan. Tidak kurang pula mereka yang dengan terang-terangan menuntut balas jasa, padahal bila dibandingkan dengan jasa rakyat umum yang benar-benar telah turut bergerilya dan menderita, jasa mereka itu belum padananya.

Jadi sukarlah bagi orang yang tidak mengerti untuk memahami mengapa dr. F.L. Tobing menolak jabatan tinggi dan penuh kehormatan itu. Namun bagi mereka yang telah mengenalnya dari dekat dan dapat menyelami jiwanya, tindakan dr. F.L. Tobing itu adalah wajar. Sebagai seorang dokter dan yang selalu bertindak *correct* ia akan bertindak berdasarkan prinsip. Prinsip seorang dokter adalah menolong dan berusaha menyelamatkan jiwa pasien yang dirawatnya. Demikian juga halnya dengan dr. F.L. Tobing, ia tidak menyetujui penggabungan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli dalam satu kesatuan karena ketiganya mempunyai dasar kebudayaan dan adat istiadat yang sangat berbeda. Pada prinsipnya ketiganya tak dapat dipersatukan dan bila dipaksakan juga maka akibat yang tidak diharapkan bisa terjadi. Oleh karena dr. F.L. Tobing mempunyai wawasan yang dalam dan luas, berkat ketekunannya dalam belajar dan mengamati perkembangan, maka dengan tidak ragu-ragu ia menolak tawaran Pemerintah Pusat itu. Walaupun akan merugikan kepentingannya sendiri, dr. F.L. Tobing berani mengemukakan kebenaran. Apakah jadinya bila seorang dokter tidak berani melihat kebenaran dari keadaan pasiennya? Bisa fatal akibatnya. Tambahan lagi ia juga tidak bisa menerima tindakan Pemerintah Pusat yang begitu saja membubarkan DPR-

DPR ketiga daerah itu tanpa perundingan lebih dahulu. Padahal sudah terbukti selama masa revolusi tidak kecil jasanya dan tidak ringan tugas yang dijalankan oleh dewan-dewan perwakilan itu dalam memperjuangkan kemerdekaan. Memang dr. F.L. Tobing selalu berusaha mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan sendiri atau keluarganya. Karena menolak pengangkatan sebagai Gubernur Propinsi Sumatera Utara, Pemerintah kemudian mengangkatnya sebagai Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri.

Rupanya sifat dan sikap dr. F.L. Tobing yang bijaksana, penuh tanggungjawab dan selalu bersikap membimbing diperlukan oleh Pemerintah untuk membantu mengurus negara RI yang baru saja pulih kemerdekaannya. Sebenarnya untuk membangun dalam mengisi Kemerdekaan diperlukan orang-orang yang berjiwa ulet, jujur dan tidak punya pamrih untuk diri sendiri. Seperti seorang ayah yang bijaksana dan sadar akan kewajibannya, ia akan bekerja keras demi kesejahteraan anak-anak dan kebahagiaan keluarganya. Demikianlah sepatutnya sikap dan tindakan pemimpin yang bekerja demi rakyatnya. Sikap dan tindakan semacam ini telah sejak semula ditunjukkan oleh dr. F.L. Tobing.

Memasuki tahun 1953 karier dr. F.L. Tobing dalam lapangan politik semakin meningkat. Ia mulai menjadi tokoh Nasional karena tugas dan tanggung jawabnya meliputi hal-hal yang mencakup kebijaksanaan nasional. Ia diangkat menjadi Menteri Penerangan dalam Kabinet Ali-Wongso atau sering juga dinamakan Kabinet Ali Sastro Amidjojo I yang mempunyai masa kerja sejak tanggal 30 Juli 1953 sampai dengan tanggal 12 Agustus 1955. Pada waktu itu juga dr. F.L. Tobing ditugaskan untuk merangkap jabatan sebagai Menteri Kesehatan (*ad interim*) yang dijabatnya kurang lebih selama dua bulan yaitu sampai dengan tanggal 12 Oktober 1953. Pembebasannya sebagai Menteri Kesehatan *ad interim* ini ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Presiden No. 172/1953, yang sejak terhitung mulai 12 Oktober 1953 menetapkan antara lain :

1. Membebaskan dr. F.L. Tobing dari tugasnya sebagai Menteri Kesehatan *ai.* yang dipangkunya disamping jabatannya sebagai Menteri Penerangan sejak 1 Agustus 1953. dan mengangkat :
2. Saudara Moh. Ali alias dr. Lie Kiat Teng sebagai Menteri Kesehatan ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 1953.

Orang pun tentu bertanya "Mengapa F.L. Tobing yang dokter memilih jabatan sebagai menteri Penerangan dan bukan sebagai Menteri Kesehatan yang sesuai dengan tugasnya?". Dalam hal ini memang benar bahwa jabatan tinggi yang dipilihnya itu tidak sesuai dengan pendidikan formal yang pernah diperolehnya yaitu di bidang kedokteran atau dalam arti yang luas kesehatan. Akan tetapi bukanlah suatu hal yang tidak mungkin bagi seseorang untuk mengemban tugas lain di luar profesinya asalkan saja dia mampu menjalankannya. Dalam hal dr. F.L. Tobing sejarah telah membuktikan bahwa sudah sejak jaman Jepang (1943) dia berkecimpung di dunia yang bukan kedokteran — dan dia berhasil!

Dalam hubungan seperti ini mungkin kita dapat membuktikan kebenaran sebuah pendapat yang mengatakan bahwa pengalaman praktek dalam kehidupan masyarakat seringkali lebih berharga daripada pengalaman di bangku sekolah. Pengalaman pendidikan yang berbentuk formal seperti misalnya sekolah-sekolah baik yang umum maupun kejuruan sekalipun tanpa didukung dengan pengalaman dalam bentuk di luar sekolah, biasanya tidak akan banyak dapat menjawab tantangan-tantangan yang hidup di masyarakat. Tentu adalah paling sempurna kalau kedua hal tadi digabungkan; pengalaman yang diperoleh di bangku sekolah dengan pendidikan yang didapat dari masyarakat di sekitarnya. Jadi seseorang yang telah berkecimpung lama dalam bidangnya meskipun tanpa pendidikan yang formal, biasanya lebih banyak mengetahui bidangnya itu daripada mereka yang belajar dulu dalam pendidikan formal. Yang terakhir ini biasanya menguasai betul hal-hal yang bersifat teoritis. Demikian juga halnya dengan dr. F.L. Tobing ini. Di lapangan penerangan sebenarnya dia bukan orang baru. Penga-

lamannya telah terbukti ketika dia harus bekerja sebagai juru penerang selama masa bergerilya melawan Belanda. Dengan kemampuan memberikan penerangan yang tepat maka rakyat dapat dipersatukan dan dibangkitkan semangat juangnya. Sehingga dalam Perang Kemerdekaan yang kira-kira lima tahun lamanya itu, rakyat Tapanuli khususnya berhasil bertahan menghadapi serbuan Belanda yang berusaha untuk menjajah Indonesia kembali. <sup>2)</sup>

Bagi mereka yang bertugas di Kementerian Penerangan pada waktu itu pilihan dr. F.L. Tobing untuk tetap menjadi Menteri Penerangan sebagai suatu kebanggaan sendiri. Sebab ternyata bahwa Pak Tobing — demikian panggilan akrabnya benar-benar memahami betapa pentingnya tugas seorang juru penerang dalam negara yang masih muda seperti Republik Indonesia pada waktu itu. Lebih-lebih bila diingat bagaimana keadaan kehidupan politik di Indonesia pada waktu itu.

Kurun waktu di mana dr. F.L. Tobing menjadi Menteri Penerangan ini, sebenarnya termasuk bagian dari periode yang pada saat sekarang ini sering disebut sebagai periode demokrasi parlementer atau demokrasi liberal yang berjalan sejak 1950 sampai dengan 1959.

Untuk dapat lebih memahami bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan dr. F.L. Tobing selaku Menteri Penerangan, perlulah terlebih dahulu diperhatikan panggung politik Indonesia pada waktu itu. Kehidupan politik telah mengakibatkan terbengkalainya pembangunan bangsa yang sudah dicanangkan sejak merdeka, yaitu menuju pembentukan suatu negara yang aman dan makmur. Dalam kenyataannya hal itu jauh dari kenyataan. Para pemimpin rakyat atau kaum politisi saling bertentangan dan hanya mementingkan kelompok atau partainya saja.

Pada masa ini pemerintah tidak stabil, kabinet silih berganti dalam waktu yang singkat. Jatuh banggunnya sebuah kabinet tergantung dari dukungan yang diberikan oleh suara terbanyak anggota partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dukungan akan kuat bila partai-partai itu mempunyai banyak anggota yang duduk sebagai menteri dalam kabinet tersebut. Tetapi hal seba-

liknya yang akan terjadi. Bila partai oposisi dalam DPR lebih kuat maka dengan mudah kabinet tersebut dijatuhkan, karena kabinet bertanggungjawab kepada Parlemen (DPR). Bahkan pernah terjadi ada partai yang menarik kembali menteri-menterinya dari Kabinet dengan alasan bahwa kebijaksanaan partai tidak dijalankan oleh kabinet tersebut. Sehingga dalam hal ini partai pemerintah menjatuhkan kabinetnya sendiri.<sup>3)</sup>

Kabinet terdiri dari para menteri yang dikoordinasi oleh seorang Perdana Menteri yang ditunjuk Presiden, sebagai pemegang mandat. Pengangkatan seorang Perdana Menteri biasanya berdasarkan kompromi, artinya sejauh mana pihak partai-partai politik dapat menerima tokoh yang ditunjuk Presiden itu. Untuk ini pun Presiden tidak begitu saja menetapkan seorang menjadi Perdana Menteri, sebab harus dilihat konstelasi politik yang hidup. Dukungan yang besar dan kuat dari parpol merupakan syarat yang harus diperhatikan bagi kabinet yang akan terbentuk. Duduknya para menteri yang merupakan wakil dari tiap-tiap parpol akan memudahkan berlangsungnya sebuah kabinet. Berarti komposisi berimbang. Tentu saja partai yang besar yang akan mempunyai lebih banyak menteri-menterinya di sana dibanding partai yang kecil. Meskipun demikian persoalan akan timbul apabila jumlah menteri yang ada dalam kabinet itu tidak sama. Permintaan untuk menempati pos yang penting dari setiap parpol sering terjadi. Apalagi kalau pos itu banyak memberikan pengaruh yang besar dalam menentukan jalannya sebuah pemerintahan — berarti kekuatan politiknya makin kokoh pos itu akan menjadi rebutan. Politik "dagang sapi" terdengar santer pada masa ini. Pertikaian politik sering terjadi, sementara ditunjang perbedaan ideologi yang menyolok menyebabkan sebuah kabinet tidak bertahan lama. Kalau dihitung-hitung maka jarang sebuah kabinet yang berumur lebih dari dua tahun. Lihat saja masa Kabinet Natsir dari 6 September 1950 — 27 April 1951. Kabinet Sukiman — Suwiryo dari 27 April 1951 — 3 April 1952, Kabinet Wilopo dari 3 April 1952 — 30 Juli 1953. Hanya Kabinet Ali I inilah yang relatif lama umurnya yakni 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955,

di mana dr. F.L. Tobing menjabat sebagai Menteri Penerangannya.

Dilihat singkatnya masa sebuah Kabinet akibatnya terdapat ketidak-stabilan politik dalam negara untuk membangun. Bagaimana mungkin dapat mengadakan pembangunan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan dengan baik bila tidak cukup waktu untuk melaksanakannya. Biasanya kabinet baru yang menggantikan tidak akan melanjutkan program kabinet pendahulunya. Kabinet baru ini akan bekerja sesuai dengan kepentingan partai atau golongannya. Salah satu faktor penyebab lagi bagi jatuhnya kabinet-kabinet itu karena dijalkannya demokrasi parlementer di mana di dalam Parlemen terdapat lebih dari 20 buah partai dan beberapa fraksi, sedangkan mayoritas anggota dipegang oleh Masyumi dan Partai Nasional Indonesia.

Demikianlah dalam suasana seperti itu muncullah seorang tokoh yang lebih melihat persoalan-persoalan nasional di atas segala-galanya, terlepas dari kepentingan individu dan golongan. Orang tersebut adalah dr. F.L. Tobing yang memilih tugas sebagai Menteri Penerangan seperti yang telah dibicarakan di muka. Pada waktu kabinet Ali Sastroamidjojo I ini memerintah keadaan Republik Indonesia sangat tidak menggembirakan. Timbul gejolak-gejolak di daerah yang gejalanya ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keadaan ini sangat membahayakan bagi kehidupan negara Republik Indonesia yang masih muda dan sangat rapuh fondasinya itu. Dalam keadaan seperti ini tugas seorang Menteri Penerangan tidak ringan dan tidak mudah.

Dia beserta anak buahnya harus mampu menjelaskan kepada rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat di daerah-daerah yang bergolak pada khususnya tentang apa dan bagaimana negara Republik Indonesia itu. Rakyat harus diberi keyakinan tentang pentingnya arti persatuan karena musuh yang hendak menjajah kembali masih terus mengancam.

Penting pula dijelaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur itu tidak akan langsung tercipta dengan dicapainya kemerdekaan. Tetapi haruslah diperoleh dengan bekerja keras dan sungguh-sungguh dari semua warganya, dan sudah tentu memakan waktu. Sehingga bila keadaan tidak aman karena terjadi-

nya pertentangan-pertentangan suasana kerja pun akan terganggu, maka tujuan akhir pun akan sukar tercapai. Lebih-lebih karena rakyat Indonesia dalam jumlah terbesar masih kurang berpendidikan atau buta huruf. Maka untuk memberikan penerangan itu perlu dicari cara yang tepat agar pesan yang dimaksud akan sampai kepada rakyat.

Menurut dr. F.L. Tobing penerangan melalui *audio visual* adalah yang paling tepat di samping radio. Cara ini berujud hiburan berupa film, baik film dokumentasi, film khusus penerangan maupun film cerita yang tinggi mutunya. Maka diharapkan dengan melihat gambar-gambar dan mendengar penjelasan-penjelasananya pengaruhnya akan besar terhadap masyarakat terutama bila dilihat dari sudut moril. <sup>4)</sup>

Selain masalah yang bersifat nasional, Pak Tobing yang Menteri ini juga menghadapi masalah di dalam tubuh kementeriannya sendiri. Pada saat itu umumnya terdapat kelesuan atau kurangnya gairah kerja di kalangan pegawai-pegawai negeri di Indonesia. Seperti yang dikatakannya dalam pidato serah terima jabatan pimpinan Kementerian Penerangan pada tahun 1953 sebagai berikut :

"Saudara-saudara dengan melihat pada masyarakat pada saat yang seolah-olah lesu kurang air, seolah-olah kekurangan napsu sehingga manifestasi bagi kita merupakan sikap masa bodoh, yah sikap apatis dan jika kita pula mempertimbangkan jiwa yang meliputi seluruh pegawai kita di Indonesia seolah-olah bersikap kerja tetapi jangan kerja sampai berkeringat. Kerja melihat jam kapan pukul dua, maka Saudara-saudara mempertimbangkan ini semua dan mengingat Tri Prasetya. Maka kita mengukur dan menyukat betapa besarnya lagi, betapa hebatnya lagi yang dikehendaki dari kita semuanya untuk membawa perubahan, perbaikan dalam keadaan-keadaan yang sedemikian rupa". <sup>5)</sup>

Padahal seperti kita telah ketahui bahwa dr. F.L. Tobing adalah seorang yang tekun dan keras bekerja. Dia benar-benar menyadari bahwa untuk membangun tidak saja perlu modal dan teknologi, tetapi yang penting adalah orang-orangnya yang mau

bekerja keras dan penuh dedikasi. Dalam istilah asingnya *"the man behind the gun"* merupakan faktor penting akan keberhasilan setiap usaha.

Sebagai Menteri Penerangan dr. F.L. Tobing tidak saja hanya memberikan informasi-informasi tentang kebijaksanaan Pemerintah, tetapi juga bagaimana sarana ini dapat digunakan sebagai usaha ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Dr. F.L. Tobing ingin mewujudkan apa yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 karena dengan terbentuknya pemerintahan Negara R.I. di samping berkewajiban melindungi segenap tumpah darah Indonesia juga memajukan taraf kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan dan kepandaian itu tidak harus didapat dalam lembaga-lembaga pendidikan formal, akan tetapi dapat juga diperoleh dengan cara-cara lain, seperti dalam pergaulan di masyarakat dan dalam lapangan pekerjaan asalkan kita mau belajar. Sikap pandangannya ini tercermin dalam cara ia mendidik anak-anaknya. Walaupun tidak mencapai sekolah tinggi atau sarjana, anak-anaknya selalu didorong untuk belajar sendiri. Misalnya pada waktu bergerilya, walaupun tidak ada ruangan atau pun papan tulis anaknya yang kecil diberi pelajaran berhitung dan menulis bila kesempatan mengizinkan dengan memakai tanah sebagai papan tulisnya dan ranting kayu sebagai kapurnya. <sup>6)</sup>

Sifat-sifat kebapakan dr. F.L. Tobing selalu nampak dalam menjalankan tugasnya. Perhatiannya terhadap bawahan besar sekali. Ia sudah memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh bawahannya karena ia sendiri pernah merasakan bagaimana sukarnya hidup pada masa gerilya dulu. Dia memang lebih senang melihat kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat dan tidak puas hanya mendengar laporan yang dibuat oleh bawahannya. Selain itu Pak Tobing ini tidak suka pada hal-hal yang formal. Sebuah contoh terjadi pada akhir tahun 1953. Pada tanggal 3 Desember 1953 ia berkenan menghadiri suatu Kongres di Bogor. Dalam kesempatan ini, tanpa direncanakan sebelumnya, dia pergi mengunjungi kantor Jawatan Penerangan Kota Bogor. Kunjungan

yang mendadak ini sudah tentu sangat mengejutkan para karyawan kantor tersebut. Namun juga membanggakan sebab sudah sejak lama mereka itu mengharapakan kunjungan dari atasan mereka, Bapak Menteri atau Bapak Sekretaris Jenderal yang sebenarnya berada tidak jauh, hanya sekitar 60 km saja. Oleh karena itu kunjungan Bapak Tobing ini sangat menggembirakan Jawatan Penerangan kota Bogor karena memang baru pertama kali inilah mereka dikunjungi oleh seorang Menteri Penerangan sejak pengakuan kedaulatan. <sup>7)</sup>

Selain soal keamanan di daerah-daerah yang mengancam kesatuan negara Republik Indonesia, kabinet Ali Sastroamidjojo I juga menghadapi banyak masalah lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Satu soal di dalam negeri yang harus diselesaikan adalah persiapan untuk mengadakan Pemilihan Umum yang rencananya diadakan pada tahun 1955. Karena hal ini merupakan suatu peristiwa besar yang baru untuk pertama kalinya diadakan di Indonesia setelah delapan tahun merdeka, maka Pemerintah memberi tugas para menterinya untuk menjelaskan kepada rakyat tentang Pemilu itu. Khususnya tugas ini merupakan beban yang berat yang harus diemban oleh dr. F.L. Tobing sebagai Menteri Penerangan.

Untuk melaksanakan tugas ini ia harus banyak mengadakan kunjungan ke daerah-daerah di antaranya ke Tapanuli, Sulawesi dan Indonesia bagian Timur. Dalam wejangan-wejangannya yang disampaikan kepada rakyat-rakyat di daerah yang dikunjunginya, berkali-kali ditekankan perlunya ditumbuhkan jiwa kesadaran nasional sehingga persatuan nasional akan terwujud di bumi Ibu Pertiwi, dan inilah yang hendak dicapai oleh Pemilu yang akan datang. Sehingga dengan demikian kerukunan dan kedamaian hidup terjelma dan kesejahteraan akan tercapai. Dr. F.L. Tobing memang seorang nasionalis sejati karena ia tidak berpikir demi kepentingan daerah, tetapi dia berdiri di atas kepentingan semuanya. Kunjungannya ke daerah-daerah ini terutama juga untuk mendapatkan hubungan antara daerah dengan pusat dan agar terbina saling pengertian terutama dari pusat tentang keadaan daerah-daerah itu yang penting bagi kehidupan nusa dan bangsa. <sup>8)</sup>

Dengan dilaksanakannya Pemilu ini diharapkan kehidupan demokrasi bisa tumbuh di dalam negara Republik Indonesia. Bukan itu saja tetapi juga dengan terpilihnya wakil-wakil rakyat diharapkan dapat menyuarakan lebih banyak kenyataan-kenyataan yang memang ada di dalam masyarakat untuk segera dicarikan jawabannya atau penyelesaiannya.

Dengan Pemilu diharapkan juga agar arti dari suatu negara kesatuan benar-benar menjadi kenyataan; bukan saja secara fisik, tapi juga psikologis seperti rasa kesetiakawanan dan kebangsaan. Jadi integrasi nasional merupakan salah satu sasaran Pemilu pertama ini. Apabila tidak berhati-hati dan kurangnya pengertian atau penerangan, maka hal sebaliknya akan timbul. Rasa kedae-  
rahan, perbedaan budaya seperti bahasa, agama dan ideologi serta unsur-unsur pemecah yang lain akan menonjol dan tidak lagi merupakan kebhinnekaan yang menyatu tetapi akan bercerai berai, lebih-lebih yang baru lepas dari kekuasaan asing.

Walaupun kabinet Ali-Wongso dapat dikatakan merupakan kabinet yang paling lama bertahan, akhirnya pada tanggal 29 Juli 1955 mandat itu harus diserahkan kembali kepada Presiden. Sebab utama adalah persoalan dalam tubuh TNI-AD sebagai lanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952 dan soal pimpinan AD yang tidak dapat diselesaikan oleh Menteri Pertahanan. AD menolak pimpinan baru yang diangkat oleh Menteri Pertahanan tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan TNI-AD.<sup>9)</sup> Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah sebuah kejadian yang terkenal di mana pimpinan militer atau tepatnya pimpinan AD di bawah (pada waktu itu) Kolonel A.H. Nasution pernah berusaha meyakinkan atau memaksa Presiden Sukarno untuk membubarkan Parlemen, karena antara lain badan legislatif itu mereka anggap telah terlalu jauh mencampuri urusan intern Angkatan Darat.<sup>10)</sup> Dengan demikian berarti pula selesainya tugas Pak Tobing sebagai Menteri Penerangan.

Pada dasarnya pengabdian beliau di dalam melaksanakan kewajibannya sebagai menteri telah berhasil, begitu juga hubungannya dengan pegawai bawahannya, telah terjalin dengan

akrab. Setelah kurang lebih dua tahun dr. F.L. Tobing harus menyerahkan jabatannya kepada Sutan Makmur sebagai Menteri Penerangan yang baru dalam kabinet Burhanuddin Harahap.

Keadaan di dalam kehidupan ini memang tidak ada yang kekal, kejadian-kejadian timbul-tenggelam silih berganti laksana ombak di tepi pantai. Demikian pula dengan pergantian pimpinan-pimpinan kementerian di negara R.I. dalam masa Demokrasi liberal. Menteri yang lama pergi digantikan oleh yang baru. Panjang pendeknya waktu memegang tampuk pimpinan kementerian tergantung dari lama sebetulnya umur kabinet di mana ia menjadi anggota. Di dalam pidato perpisahannya Pak Tobing banyak membicarakan filsafat kehidupan. Ia berkata adalah wajar kita mendapat kritikan atau celaan dari pihak yang tidak menyetujui kebijaksanaan pemerintah di kala itu. Tugasnya diakui memang berat sekali. Dia harus dapat menerangkan kebijaksanaan pemerintah yang sedang berkuasa itu. Apalagi pada waktu itu kementerian berhubungan erat dengan pergerakan-pergerakan politik. Dalam situasi seperti itu dr. F.L. Tobing telah bersedia dikritik dan dikecam. Pedomannya memang baik kita camkan. Ia pernah berkata, "Kalau takut dilembur pasang, jangan berdiam di tepi pantai", jadi kalau takut terkena pukulan berupa celaan, kecaman dan sebagainya, janganlah ikut serta dalam pemerintahan umumnya dan memegang fungsi penerangan khususnya. <sup>11)</sup>

Tentu saja dr. F.L. Tobing tidak menganjurkan kepada kita untuk tidak berbuat apa-apa, sebab bagaimanapun seorang anggota masyarakat tidak mungkin mengasingkan diri dan tidak melakukan apa pun juga. Betapa pun kecilnya seseorang itu pasti mempunyai sesuatu peranan, kecuali mereka yang sakit atau cacat. Jadi maksudnya adalah bahwa orang itu tidak mungkin melepaskan diri dari kritik, sebab memang manusia itu tidak sempurna; banyak kekurangan yang dimilikinya. Namun Tuhan memberi manusia akal dan perasaan agar ia dapat berusaha untuk menutupi kekurangannya. Satu sikap yang penting yang harus dipunyai oleh seseorang adalah bertanggungjawab atas segala tindakan, sehingga ia bisa menerima dan memahami kritik yang dilontarkan kepadanya.

Satu peristiwa menarik telah dialami oleh dr. F.L. Tobing yang mencerminkan betapa besar rasa tanggungjawabnya dan betapa dalam rasa kemanusiaannya. Pada suatu hari sebagai Menteri dia diundang untuk menghadiri upacara pembukaan Makam Pahlawan Kalibata. Ketika sedang meluncur di Jl. Matraman Raya tanpa tak terduga mobilnya telah menabrak seseorang. Dengan segera Menteri yang dokter itu turun dari mobil dan memerintahkan kepada sang sopir untuk putar haluan membawa si korban ke rumah sakit. Untunglah korban hanya luka-luka dan tidak meninggal dunia, sehingga Menteri Tobing dapat meneruskan perjalanannya dan tidak terlambat di tempat upacara. <sup>12)</sup>

Pemilihan Umum baru saja dilaksanakan. Pada tanggal 29 September 1955 kira-kira 39 juta rakyat Indonesia menuju ke tempat-tempat yang ditentukan untuk memberikan suaranya. Dengan demikian salah satu hak rakyat di negara yang demokratis sudah terpenuhi, yaitu memilih wakil-wakilnya yang diharapkan akan menyuarakan hati nurani rakyat. Harapan masyarakat adalah bahwa Pemilihan ini akan dapat menyelesaikan masalah-masalah politik yang selama ini melanda negara Republik Indonesia.

Kenyataan yang terjadi hanyalah memberikan kekecewaan. Pemilu I ternyata tidak mengubah pola politik yang sudah ada. Sistem banyak partai yang berlaku selama ini tetap tak berubah. Di samping itu masa kampanye yang diadakan lama sekali sebelum pemungutan suara telah mempertajam pertentangan politik. Hal ini dapatlah difahami. Setiap partai berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan Pemilu itu agar memperoleh kursi yang banyak dalam DPR dan dengan demikian mempunyai kesempatan untuk berkuasa dalam pemerintahan. Upaya yang hebat yang dilakukan oleh setiap partai agar sukses bukan tidak menimbulkan akibat yang buruk. Pertentangan-pertentangan politik semakin menajam; setiap partai jelas-jelas mempertegas posisi ideologi masing-masing *vis-a-vis* partai lainnya.

Menajamnya pertentangan politik tidak saja bersifat pertentangan ideologi akan tetapi juga bersifat membangkitkan semangat

rasa solidaritas golongan, agama, suku bangsa dan lain-lainnya lagi yang semuanya itu mendorong anggota-anggota masyarakat untuk lebih merasa terpaut kepada ikatan-ikatan primordial. Sebagai akibatnya solidaritas nasional berangsur-angsur dikalahkan oleh perasaan kepentingan golongan, daerah, aliran dan ideologi politik dan ini sangat membahayakan kelangsungan integrasi nasional yang tampak belum begitu mantap, <sup>13)</sup>

Sementara itu di bidang ketahanan nasional pun sedang terancam. Sejak enam tahun sesudah pengakuan kedaulatan, Indonesia dilanda oleh berbagai krisis yang mengancam keutuhan republik yang masih muda ini. Selain gerakan anti-Cina yang berakar pada soal ekonomi, Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang menggantikan Kabinet Burhanuddin Harahap terutama harus menghadapi masalah kedaerahan yang lebih gawat lagi. Beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi merasa tidak puas terhadap politik keuangan Pusat yang dirasakan kurang memperhatikan kepentingan daerah. Oleh karena itu mereka mulai kehilangan kepercayaan pada Pemerintah Pusat. Apalagi gerakan-gerakan ini mendapat dukungan dari beberapa Panglima dan terbentuklah Dewan-Dewan Militer di daerah-daerah itu, seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol. Ahmad Hussen yang diproklamasikan pada tanggal 20 Desember 1956. Kemudian Dewan Gajah dibentuk oleh Kol.Simbolon di Medan pada tanggal 22 Desember 1956 dan Dewan Manguni dibentuk oleh Let.Kol. Ventje Sumual tanggal 18 Februari 1958 di Manado.

Peristiwa-peristiwa tersebut sangat melemahkan kedudukan Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Tak lama kemudian, pada tanggal 14 Maret 1957 ia mengembalikan mandatnya kepada Presiden Sukarno. Dalam keadaan yang gawat ini, di mana di daerah muncul dewan-dewan yang mengambil alih kekuasaan, Indonesia tidak mempunyai pemerintahan. Segera setelah menerima penyerahan mandat kembali Presiden Sukarno mengumumkan berlakunya keadaan bahaya di seluruh negara (SOB). Dengan demikian

tugas pengamanan negara sepenuhnya diserahkan kepada Angkatan Bersenjata. Selain itu Presiden Sukarno juga mencoba menghubungi partai-partai agar dapat segera dibentuk pemerintahan baru. Usaha Presiden Sukarno ini menemui jalan buntu sebab partai-partai politik tetap melakukan taktik "dagang sapinya". Akhirnya Ir. Djuanda seorang tokoh non-partai ditunjuk untuk menjadi formatur.

Dalam pada itu setelah bebas dari jabatannya sebagai Menteri Penerangan, dr. F.L. Tobing mengajukan permohonan agar dibebaskan dari segala tugas negara dengan hak pensiun. Pada waktu itu, yaitu akhir tahun 1955 usianya sudah mencapai 57 tahun. Sebagai seorang negarawan usia di bawah 60 tahun sebenarnya belum dapat dikatakan tua. Tetapi dr. F.L. Tobing memang tampak wajahnya jauh lebih tua dari usia yang sebenarnya, walaupun kemampuan kerjanya tetap besar. Memang dia sering mengabaikan kesehatannya bila sedang tekun bekerja.<sup>14)</sup>

Tentang hal usianya ini pernah ada suatu peristiwa yang menarik. Seseorang bertanya kepadanya,

"Apakah sebabnya Bapak begitu tua kelihatannya, sedang usia Bapak baru 50 tahun?"

Dr. F.L. Tobing menjawab,

"Karena banyaknya kesulitan yang saya hadapi sehari-hari dalam jabatan saya, harus saudara tiga kali lipatkan umur saya mulai Jepang masuk, sampai hari ini, karena beratnya tanggungan dan penanggungan ada 3x lipat pula. Seandainya keadaan biasa, umur saya baru 50 tahun; tapi menurut perkiraan di atas haruslah dikira  $43 \text{ tahun} + 8 \times 3 \text{ tahun} = 67 \text{ tahun}$ ".<sup>15)</sup>

Permohonan pensiunnya dikabulkan oleh Pemerintah dan mulailah ia menjalani kehidupan yang agak tenang sambil membantu penderitaan orang-orang sakit yang datang minta pertolongan kepadanya. Meskipun jumlah uang pensiunnya tidak besar kepada orang-orang yang kurang mampu ia tidak meminta pembayaran yang tinggi jika mereka datang berobat kepadanya. Bahkan bila dia benar-benar tahu bahwa pasiennya itu tidak

mampu maka selain tidak dimintai bayaran, juga sekaligus akan diberinya obat. Kebiasaannya yang bersifat sosial dan suka menolong ini memang sudah sejak mula kali membuka praktek di rumah. Oleh karena itu ketika meninggal pada tahun 1962, dr. F.L. Tobing meninggalkan sejumlah hutang pada apotik Rathkamp.<sup>16)</sup>

Tetapi belum lama dr. F.L. Tobing menikmati masa istirahatnya ia diminta segera datang ke Istana Bogor oleh Presiden Sukarno.<sup>17)</sup> Pembicaraan antara Presiden Sukarno dengan dr. F.L. Tobing menghasilkan pernyataan kesediaannya untuk memangku jabatan Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah dalam Kabinet Djuanda yang sedang diolah.

Dalam kemelut bahaya perpecahan bangsa ini rupanya Presiden Sukarno mengandalkan pada kemampuan dr. F.L. Tobing seorang tokoh yang benar-benar berjiwa nasional. Presiden percaya bahwa tokoh tersebut akan mampu mengatasi ketegangan-ketegangan pada masa itu atau paling tidak dapat mengurangi perbedaan yang ada antara Pusat – Daerah. Lebih-lebih bila diingat pengalaman-pengalaman dr. F.L. Tobing dalam Revolusi Kemerdekaan di Tapanuli.

Berbagai komentar dikeluarkan oleh beberapa kalangan mengenai pengangkatan dr. F.L. Tobing sebagai Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah dalam Kabinet Karya dari Djuanda akan berarti bahwa ketidakpuasan daerah akan mendapat penyalurannya dan dr. F.L. Tobing akan berkewajiban menjadi katalisator dari perasaan itu. Ini berarti bahwa kabinet nantinya harus menjalankan segala daya upaya untuk mengadakan kompromi dalam menyelesaikan tuntutan-tuntutan daerah dan segala-galanya yang termasuk dalam soal ini baik dalam kalangan militer maupun di lapangan sipil.<sup>18)</sup>

Agaknya dr. F.L. Tobing menjadi tumpuan harapan masyarakat luas untuk menanggulangi masalah besar tersebut di atas. Beban yang dipikul di pundaknya tidak ringan, ditambah lagi dengan beban kepercayaan masyarakat kepadanya. Sebagai tumpuan harapan memang tidak enak, apalagi kita diharapkan

menjadi dewa penyelamat. Kalau usaha kita berhasil, bukan saja kepuasan akan didapat manfaatnya pun akan sangat besar bagi masyarakat. Namun tekadnya sudah bulat, ia akan berusaha sekuat tenaga menjalankan tugas negara betapa pun beratnya.

Karena memang hidupnya diabdikan pada negara. Demikianlah dr. F.L. Tobing berani tampil meskipun pada saat genting seperti itu. Hanya jiwa yang besar yang berani memikul tanggungjawab yang besar pula. Demikianlah terlihat pada diri dr. F.L. Tobing. Begitu ia terjun ke dalam kancah begitu juga ia bersiap untuk menerima segala sesuatunya.

Kritik, adalah suatu hal yang biasa. "Bagaimana mungkin kita mengelakkan hal itu padahal kita berdiri di tengah-tengah gelombang yang sedang berkecamuk seperti telah tergambar di atas?", demikianlah menurut pendapat Pak Tobing. Jadi dengan penuh keyakinan dr. F.L. Tobing menerima jabatan sebagai Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah.

Pada kesempatan mengunjungi Sibolga, Tapanuli pada bulan Mei 1957 dia antara lain berkata, bahwa kabinet sekarang ini telah menyadari sedalam-dalamnya tentang keadaan Tanah Air dewasa ini terutama yang menyangkut persoalan daerah. Tindakan Perdana Menteri Juanda untuk mengunjungi Sumatera Tengah, Sulawesi Selatan dan Maluku serta daerah-daerah di kepulauan Indonesia lainnya menurut dr. F.L. Tobing merupakan langkah baik bagi Pemerintah karena dengan demikian pemerintah pusat tidak lagi hanya menerima laporan-laporan tetapi melihat sendiri tentang keluhan-keluhan daerah. Pemerintah ingin mengetahui langsung keadaan daerah-daerah itu.

"Bila jarang bertemu, seolah-olah hubungan jadi jauh, persoalan yang tadinya mudah untuk dipecahkan karena kita sering bertemu di antara teman kini seolah putus, persoalan yang harusnya dipecahkan terbenkakai. Masalahnya mungkin sederhana saja, karena kita tidak sering bertemu, tidak pernah berkomunikasi, hubungan menjadi tidak mesra lagi.

Demikian pula dengan perpecahan daerah-daerah ini, karena di antara kita terutama para pemimpinnya tidak sering bertemu tidak saja dalam bentuk fisik tetapi juga dalam hal-hal

yang prinsip seperti ideologi/pandangannya. Dalam hal ini memang diminta pemimpin yang berjiwa besar, tidak hanya melihat demi kepentingan golongannya apalagi kepentingan pribadi. Sebab kalau konflik sudah demikian menghebat rakyat jualah yang pertama-tama menjadi korban. Betapa tidak? Rusaknya sawah, ladang, pasar, jembatan dan lain-lain sarana vital, bukankah mengakibatkan penderitaan yang berat bagi pak tani, bagi buruh kecil, bagi si miskin dan bagi rakyat pada umumnya?"

Demikian juga tentang cara mengatasi persoalan itu. Ada pendapat yang mengatakan sebaiknya masalahnya dibawa ke dalam forum-forum yang dapat mempertemukan mereka yang berselisih, mempertemukan mereka dalam musyawarah menuju permufakatan. Bukankah salah satu prinsip yang melandasi kehidupan bangsa Indonesia sejak dahulu kala adalah musyawarah untuk mufakat? Prinsip inilah yang juga dianut oleh dr. F.L. Tobing. Ia tidak menyukai cara kekerasan, walaupun kalau perlu dia bisa bertindak tegas. Jalan yang terbaik untuk menyelesaikan pertentangan adalah dengan jalan damai, di mana semua pihak bertemu dan bertukar pikiran untuk mencari jalan keluar yang terbaik demi kelangsungan hidup damai bangsa Indonesia. Jadi tindakan kekerasan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh daerah tidak disetujuinya.<sup>19)</sup>

Memang Pemerintah telah mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) pada bulan September 1957, akan tetapi hasilnya tidak memuaskan. Pertentangan semakin meningkat dan beberapa daerah mengirim ultimatum akan melepaskan diri dari pusat bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Akhirnya kita semua tahu bahwa gerakan separatis seperti PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) telah mengisi lembaran hitam sejarah Indonesia.

Kurang lebih hanya satu tahun dr. F.L. Tobing memangku jabatan sebagai Menteri Negara Urusan Hubungan Antar Daerah, sebab dengan keluarnya surat keputusan Presiden R.I. No. 131. 1958 dia dibebaskan dari jabatan tersebut untuk kemudian diangkat menjadi Menteri Negara Urusan Transmigrasi pada Kabinet Karya yang telah dirombak yaitu sejak Juni 1958 sampai Juli 1959.<sup>20)</sup>

Sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang nampaknya masih belum mempunyai cukup sarana yang memadai, telah menyebabkan dr. F.L. Tobing tidak mampu berbuat banyak di bidang ini. Sebetulnya pendapatnya sendiri dapat dikembangkan menjadi suatu kebijaksanaan yang baik. Ia berpendapat bahwa antara daerah, antara suku bangsa dapat dipertemukan dalam upaya memecahkan persoalan yang timbul di dalam kita bernegara. Itulah perlunya usaha transmigrasi digalakkan demi integrasi bangsa. Sebelum dapat mempertemukan perbedaan pandangan atau nilai, kiranya langkah pertama adalah mempertemukan penduduk dalam bentuk fisik seperti bertemu muka, hidup bersama dan lain sebagainya. Dengan perpindahannya sebagian penduduk Jawa ke Sumatera misalnya, atau ke Kalimantan, Sulawesi dan daerah-daerah lain yang masih belum padat penduduknya diharap mereka mulai belajar kenal, mulai mengetahui bahwa di samping apa yang mereka kenal selama ini dianggap baik di tempatnya belum tentu dianggap sama di tempat lain. Proses sosialisasi seperti ini perlu bagi masyarakat Indonesia yang majemuk. Betapapun baik pemikiran dr. F.L. Tobing tanpa dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan yang kemudian dijalankan hanyalah sia-sia belaka. Kegagalan dr. F.L. Tobing melaksanakan buah pemikirannya ini bukan karena dia sebagai menteri tetapi juga karena Kabinet Juanda secara keseluruhan itu sendiri belum sanggup menangani dengan baik.

Masa antara tahun 1957 – 1959 keadaan politik di Indonesia berangsur-angsur bergeser dari dasar Demokrasi Liberal atau Parlementer menuju ke arah Demokrasi Terpimpin. Lambat laun DPR hasil Pemilu 1955 kehilangan kekuasaannya. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 dengan Dekrit Presiden dinyatakan berlakunya kembali ke UUD 1945. Dengan berlakunya Dekrit Presiden ini maka Kabinet Djuanda pun harus mengembalikan mandatnya untuk diganti dengan Kabinet Presidensial sesuai dengan UUD 1945. Dengan demikian berakhirilah jabatan dr. F.L. Tobing sebagai Menteri Negara Urusan Transmigrasi. Baru semenjak inilah ia benar-benar dapat menikmati masa pensiunnya dengan tenang di lingkungan anak-isterinya yang selalu mendampingi.

Namun ternyata hanya tiga tahun saja ia menikmati kehidupan yang tenang itu. Seperti kata pepatah, "berjalan sampai ke batas, berlayar sampai ke pulau" dan hidup pun sampai pada akhirnya. Demikian pula kehidupan dr. F.L. Tobing yang berakhir dengan tenang pada suatu malam tanggal 7 Oktober 1962 di Jakarta. Semuanya telah ditinggalkannya. Orang mulai mengadakan penilaian akan segala amal ibadah dan dharmabhaktinya. Neraca kehidupan mulai ditimbang seperti sebuah badan usaha yang mengadakan tutup buku pada akhir tahun.

Dari perjalanan kehidupan dr. F.L. Tobing banyak hal yang dapat kita resapi dan memang sewajarnya bila penghargaan dianugerahkan kepadanya. Ia dikenal sebagai seorang yang berbudi luhur, sederhana dan jujur. Sebagai seorang penganut agama Protestan ia taat beribadah namun tidak fanatik. Toleransinya besar, baik terhadap yang berlainan agama maupun pada mereka yang berasal dari daerah lain. Semuanya adalah warga Indonesia, walaupun diakuinya bahwa masing-masing daerah atau suku mempunyai kekhususan sendiri-sendiri.

Misalnya di daerah Tapanuli saja sudah dilihatnya adanya orang-orang yang berbeda agama atau bahasa. Lebih-lebih ketika bergerilya ia berkesempatan bergaul langsung dengan penduduk dan semakin disadari betapa beraneka ragamnya komposisi bangsa Indonesia itu. Jelaslah bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dan diperlukan semangat toleransi yang besar untuk memahami dan menerapkan motto *Bhinneka Tunggal Ika*. Bukti nyata dari kesadarannya yang tinggi dan toleransinya yang besar adalah keberhasilannya menyelamatkan daerah Republik dan memimpin Rakyat Tapanuli ke luar dari kancah perang saudara yang hebat di masa Revolusi.

Selain itu orang yang mengenalnya dari dekat juga sangat terkesan oleh kesederhanaannya; baik dalam penampilan maupun dalam sikap. Pakaian yang dikenakannya jauh dari mentereng, sekalipun setelah ia menjadi Menteri, tetapi bersih dan rapi. Memang kedua hal ini yang antara lain selalu ditekankan sebagai landasan hidup yang utama. Kesederhanaan mencegah orang

bersifat materialistis dan korup, karena tak akan ada hasrat untuk menumpuk harta untuk dirinya sendiri sedang bagian terbesar dari rakyat masih hidup menderita.

Sewaktu ia meninggal satu-satunya rumah peninggalan untuk keluarganya di Sibolga belum selesai diperbaiki. Sehingga ketika jenazahnya tiba dari Jakarta, sebagian atapnya belum terpasang. Padahal semasa gerilya dia mempunyai wewenang untuk mencetak Orita dan tergantung kepadanya berapa jumlah uang yang akan dikeluarkan. Seandainya ia mau memperkaya diri tidak kecil kesempatan yang ada.

Suatu cerita lain tentang sikapnya yang sederhana yang mungkin sukar dimengerti oleh kita pada masa sekarang. Dr. F.L. Tobing suka merokok, bahkan bisa disebut pecandu rokok. Semakin tekun dan giat bekerja semakin banyak rokok yang diisapnya. Pada suatu hari di masa yang sukar karena blokade Belanda yang ketat, ia kehabisan rokok. Ia hanya merokok yang dibuat dari daun nipah dan tembakau yang dapat dibeli di pasaran, karena rokok putih sukar didapat di Sibolga dan kalau pun ada harganya sangat mahal karena merupakan barang selundupan. Sekretarisnya, Sahil Sitompul, pada waktu itu mengetahui bahwa ia kehabisan rokok lalu menyuruh sopirnya untuk membelikan satu bungkus rokok putih agar sesekali Bapak Residen ini juga bisa menikmati rokok impor. Ketika Residen F.L. Tobing disodori rokok itu ia menanyakan berapa harganya. Setelah diberi tahu tentang harganya dan dirasakan terlalu mahal, ia minta agar rokok itu dikembalikan dan dibelikan rokok daun nipah seperti biasa. Ia merasa belum waktunya menikmati kemewahan itu di mana bagian terbesar rakyat masih hidup menderita. Karena sikapnya yang demikian ini orang menaruh hormat kepadanya.

Sikapnya yang lain yang dikagumi orang adalah keberanian dan ketegasannya. Kalau ia merasa bahwa prinsipnya itu benar karena telah ia teliti dan yakini kebenarannya, ia akan gigih mempertahankannya. Misalnya ketika ia ditawarkan jabatan sebagai Gubernur Sumatera Utara oleh Presiden Sukarno, ditolakny

karena pada pendapatnya daerah Aceh tidak dapat dipersatukan dengan daerah Sumatera Timur dan Tapanuli. Dan pendapatnya itu diyakini benar, karena ia memahami perbedaan-perbedaan yang ada antara Aceh dan kedua wilayah yang lain.

Jadi kebesaran dr. F.L. Tobing sebagai Pahlawan bukanlah karena ia telah berhasil menghancurkan tank musuh atau menyapu bersih patroli lawan. Selama bergerilya tidak seorang pun serdadu Belanda yang pernah dibunuhnya. Namun ia telah berhasil menyelamatkan dan menegakkan pemerintah dan negara Republik Indonesia di Tapanuli di masa gerilya yang penuh dengan kesukaran. Kebesarannya juga tercermin dari sifat dan sikapnya yang telah dikemukakan di atas. Kalau meminjam istilah Indonesia sekarang barangkali ia bisa disebut sebagai manusia Indonesia yang pancasilais.

## CATATAN BAB I

1. Terdapat di rumah yang ditinggalkan oleh dr. F.L. Tobing almarhum di Kolang yang sekarang keadaannya sudah sangat rusak. Padahal rumah tersebut semasa Revolusi telah dipakai sebagai salah satu markas gerilya.
2. Sumber utama yang dipakai adalah: Drs. Payung Bangun, "Kebudayaan Batak" dalam Koentjaraningrat (ed.), *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Jakarta 1973, h. 94 – 117; Lance Gastles, *The Political Life of a Sumatran Residency*: Tapanuli 1915 – 1940, Yale University, 1972; N.Sahaan BA, *Sejarah Kebudayaan Batak Suatu Studi tentang Suku Batak*, Medan, 1964; *Provinsi Sumatera Utara*, Jakarta, 1952.
3. Drs. Payung Bangun, *Ibid.*, h. 108 – 109 memuat tabel nama-nama marga pada orang Karo, orang Toba, dan orang Simalungun.
4. Wawancara dengan Bapak Alamsyah L.Tobing, tgl. 25 Oktober 1977 di Kolang.
5. Wawancara dengan Bapak Johan L.Tobing dan Ibu F.L. Tobing pada tgl. 21 Oktober 1977 di Medan.
7. Gedung STOVIA yang sekarang menjadi Gedung Kebangkitan Nasional di Jakarta.
8. Sebuah sumber yang baik untuk mendapat bahan tentang perkembangan STOVIA adalah sebuah terbitan untuk memperingati 75 tahun STOVIA dan berjudul *Ontwikkeling van het Geneeskundig Onderwijs te Weltevreden 1851 – 1926*, Weltevreden, Batavia, 1926.
9. Wawancara dengan Ibu F.L. Tobing, tgl. 21 Oktober 1977 di Medan.
10. *Ibid.*
11. Wawancara dengan Bapak K.Sibuea, tgl. 25 Oktober 1977 di Sibolga.

## CATATAN BAB II

1. Wawancara dengan Bapak Sahil Sitompul, tgl. 29 Oktober 1977 di Medan.
2. Wawancara dengan Ibu F.L. Tobing, tgl. 22 Oktober 1977 di Medan.
3. Wawancara dengan Bapak K.Sibuea, tgl. 25 Oktober 1977 di Sibolga.
4. Wawancara dengan Ibu F.L. Tobing; Zaidir Jalal, *Dr. F.L. Tobing*, Jakarta 1978, h. 22 – 25; Badan Pembina Pahlawan Pusat, *Pahlawan Pembela Kemerdekaan*, Jakarta, 1972, h. 92.
5. Wawancara dengan Bapak Sahil Sitompul, *op.cit.*
6. *Ibid.*
7. Wawancara dengan Ibu F.L. Tobing, *op.cit.*
8. Biro Sejarah PRIMA, *Medan Area Mengisi Proklamasi*, I, Medan, 1976, h. 50.
9. Wawancara dengan Bapak Paul L. Tobing, tgl. 24 Oktober 1977 di Sibolga.
10. Wawancara dengan Bapak Sahil Sitompul, *op. cit.*
11. Wawancara dengan Ibu F.L. Tobing, *op.cit.*

12. Wawancara dengan Bapak Sahil Sitompul, *op. cit.*
13. Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, dkk. (eds), *Buku Sejarah Nasional*. VI, Jakarta, 1976, h. 15.
14. *Propinsi Sumatera Utara*, hl. 21.
15. Forum Komunikasi, *Perjuangan Rakyat Semesta Sumatera Utara*, Jakarta, 1976, h. 56.

### CATATAN BAB III

1. Wawancara dengan Bapak Sahil Sitompul, *op.cit.*
2. *Ibid.*, wawancara dengan Ibu F.L. Tobing, *op.cit.*
3. *Perjuangan Rakyat Tapanuli – S. Timur*, Sibolga, 1950, h. 76.
4. Forum Komunikasi, *op.cit.*, hal. 90.
5. Zaidir Jalal, *op.cit.*, h. 32.
6. Wawancara dengan Ibu F.L. Tobing, *op.cit.*
7. *Propinsi Sumatera Utara*, h. 33.
8. Forum Komunikasi, *op.cit.*, h. 92 – 93.
9. *Propinsi Sumatera Utara*, h. 32.
10. *Ibid.*, h. 33.
11. Wawancara dengan Bapak Sahil Sitompul, *op.cit.*
12. Sebagai Residen R.I., dr. F.L. Tobing telah mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa sebelum ada peraturan dari Pemerintah Pusat, maka Ketua KNI di karesidenan, kabupaten, kecamatan dan negeri merangkap jabatan eksekutif, yaitu sebagai Kepala Pemerintahan. Mereka itu dipilih oleh rakyat, sehingga tidak terjadi pertentangan dengan rakyat. (wawancara dengan Bapak Sahil Sitompul).  
dengan rakyat. (wawancara dengan Bapak Sahil Sitompul).
13. Biro Sejarah PRIMA, *op.cit.*, h. 145; Propinsi Sumatera Utara, h. 34; wawancara dengan Ibu F.L. Tobing, *op.cit.*
14. *Propinsi Sumatera Utara*, h. 33.
15. Biro Sejarah PRIMA, *op.cit.*, h. 197 – 200.
16. Terdapat di daerah istimewa yang diperintah oleh Sultan, Raja, Sibayak dan sebagainya. Mereka itu oleh Pemerintah Hindia Belanda diberi hak istimewa dan otonomi yang luas (*Inlands-zelfbestuur*).

### CATATAN BAB IV

1. Forum Komunikasi, *op.cit.*, h. 215 – 218.
2. Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, dkk. (eds.), *op. cit.*, h. 47 – 50.

3. Wawancara dengan Bapak Sahil Sitompul, *op.cit.*
4. *Ibid.*; wawancara dengan Bapak Paul L. Tobing, *op.cit.*
5. Wawancara dengan Bapak Sahil Sitompul, *op.cit.*
6. *Ibid.*; Forum Komunikasi, *op.cit.*, h. 263.
7. *Ibid.*, h. 281.
8. *Propinsi Sumatera Utara*, h. 174 – 1975.
9. Forum Komunikasi, *op.cit.*, h. 285.
10. *Propinsi Sumatera Utara*, h. 256.
11. Bapak Paul Tobing menceritakan bagaimana ia diperintah oleh ayahnya, dr. F.L. Tobing untuk menemui Tk. Daud Beureuh di Aceh untuk meminta bantuan. Mereka berlima naik sampan menyusur pantai sambil terus berjaga-jaga agar tidak diketahui Belanda sebab kapal-kapal Belanda yang mengadakan blokade terus mengadakan perondaan. Sesampainya di wilayah Aceh mereka harus berjalan berhari-hari, menerobos hutan rimba, sehingga tidak kecil kesukaran yang mereka hadapi. Sering mereka hanya makan buah-buahan atau umbi-umbian yang dapat ditemukan di hutan bila mereka tidak bertemu dengan perkampungan. Karena pada umumnya penduduk Aceh adalah penganut Islam yang saleh, maka Bapak Paul beserta keempat temannya turut bersembahyang untuk menyesuaikan diri dengan penduduk yang mereka singahi, walaupun mereka itu beragama Kristen.
12. *Propinsi Sumatera Utara*, h. 256.

## CATATAN BAB V

1. Republik Indonesia, *Susunan Kabinet RI, 1945 – 1950*. Departemen Penerangan Jakarta, 1970, h. 18.
2. Sriati, "Memperingati sejenak Ulangtahun ke-56 Menteri Penerangan: Dr. F.L. Tobing", *Mimbar Penerangan*, VI, 3, 1955, h. 172.
3. Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, dkk. (eds.), *op.cit.*, h. 81
4. *Mimbar Penerangan*, VI, 8, 1955, h. 571.
5. "Tiga Pidato", *Mimbar Penerangan*, IV, 8, 1953, h. 8.
6. Wawancara dengan Ibu F.L. Tobing, *op.cit.*
7. *Mimbar Penerangan*, IV, 12, 1953, h. 34 – 35.
8. "Mengikuti Perjalanan Menteri Penerangan dr. F.L. Tobing ke daerah Sumatera Utara", *Mimbar Penerangan*, V, 6, 1954, h. 463 – 465.
9. Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, *op.cit.* h. 91 – 92.
10. Dr. Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta, 1978, h. 35.
11. Diucapkan pada serahterima jabatan Menteri Penerangan dalam *Mimbar Penerangan*, VI, 8, 1955, h. 570.
12. *Nasional*, 16 November 1954.

13. Dr. Alfian, *op.cit.*, h. 35 – 36.
14. Wawancara dengan Bapak Johan L. Tobing, di Medan, tgl. 21 Oktober 1977.
15. Rupanya pertanyaan itu diajukan kepada dr. F.L. Tobing pada tahun 1949 ketika ia berusia 50 tahun. *Perjuangan Rakyat Tapanuli – S. Timur*, h. 72.
16. Wawancara dengan Ibu F.L. Tobing, *op.cit.*
17. *Merdeka*, 8 April 1957.
18. *Ibid.*, 9 April 1957.
19. Wawancara dengan Bapak Paul L. Tobing, *op.cit.*
20. *Susunan Kabinet RI, 1945 – 1950*, h. 23.

## DAFTAR SUMBER

Alfian, DR.

*Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta, 1978.

Badan Pembina Pahlawan Pusat,

*Pahlawan Pembela Kemerdekaan*, Departemen Sosial R.I., Jakarta, 1972.

Bangun, Drs. Payung,

"Kebudayaan Batak" dalam Koentjaraningrat (ed.), *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Bhratara, Jakarta, 1973.

Biro Sejarah PRIMA

*Medan Area Mengisi Proklamasi*, jilid I, Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia Medan Area, Medan, 1976.

Castles, Lance

*The Political Life of a Sumatran Residency: Tapanuli 1915 – 1940.*

Desertasi dari Universitas Yale, Amerika Serikat, 1972.

Forum Komunikasi Ex Sub Territorium VII Komando Sumatra

*Perjuangan Rakyat Semesta Sumatera Utara*, Jakarta, 1976.

Jalal, Zaidir

*Dr. F.L. Tobing*, Penerbit "Mutiarra", Jakarta, 1978.

Kartodirdjo, Prof. Dr. Sartono, dkk (eds.)

*Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid V dan VI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1976.

"Kunjungan Menteri Penerangan dr. F.L. Tobing pada tgl. 4 Desember 1953 di Bogor", *Mimbar Penerangan*, IV, 12, 1953, h. 34

"Mengikuti Perjalanan Menteri Penerangan Dr. F.L. Tobing ke daerah Sumatera Utara, *Mimbar Penerangan*, V, 6, 1954, h. 463

Republik Indonesia,

*Perjuangan Rakyat Tapanuli – S.Timur*. Jabatan Penerangan R.I., Sibolga, 1950.

Republik Indonesia

Propinsi Sumatera Utara, Kementerian Penerangan, Jakarta, 1952.

*Ontwikkeling van het Geneeskundig Onderwijs te Weltevreden 1851 – 1926*, Weltevreden, Batavia, 1926.

## Republik Indonesia

*Susunan Kabinet R.I. 1945 – 1950. Departemen Penerangan, Jakarta, 1970.*

"Sambutan Menteri Penerangan yang Lama Dr. F.L. Tobing", *Mimbar Penerangan*, VI, 8, 1955, h. 569 – 571.

## Siahaan, N. BA

*Sejarah Kebudayaan Batak, Suatu Studi tentang Suku Batak. Medan, 1964.*

## Sriati

"Memperingati sejenak hari ulang tahun ke-56 Menteri Penerangan: Dr. F.L. Tobing", *Mimbar Penerangan*, VI, 3, 1955, h. 171 – 175.

"Tiga Pedato", *Mimbar Penerangan*, VI, 8, 1953, h. 1 – 9.

## Surat Kabar

Merdeka, 9 April 1951

Indonesia Observer, 8 Oktober 1962

Nasional, 16 November 1954

## Wawancara

Ibu F.L. Tobing, istri Dr. F.L. Tobing, di Medan (21 dan 22 Oktober 1977).

Ibu Fortina Siahaan – Tobing, kakak kandung dr. F.L. Tobing, di Medan (21 Oktober 1977).

Johan L. Tobing, anak ke-4, di Medan (21 Oktober 1977).

Ibu Sahil Sitompul, istri Bapak S. Sitompul, di Medan (22 Oktober 1977).

Bapak Patuan Natigor L. Tobing, Pensiunan Gubernur Tapanuli, di Medan, (22 dan 23 Oktober 1977).

Bapak Paul L. Tobing, putra ke-2, di Sibolga, (24 Oktober 1977).

Bapak Alamsyah L. Tobing, kemenakan, di Kolang (25 Oktober 1977).

Bapak K. Sibuea, di Sibolga, (25 Oktober 1977).

Bapak Sahil Sitompul, Pensiunan Gubernur Muda, di Medan, (29 Oktober 1977).













U.C. BERKELEY LIBRARIES



C008663206



